



PEMERINTAH
KABUPATEN
GORONTALO

2019



LKIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan kehendak-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, sesuai waktu yang ditetapkan.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2018, sebagai konsistensi untuk menciptakan transparansi sebagai pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo yakni “Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat Madani” sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Kewajiban penyusunan LKIP bagi setiap instansi pemerintah ini, berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Gorontalo tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam implementasi dan pengawasannya. Akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kabupaten Gorontalo Tahun 2018.

Limboto, Maret 2019

BUPATI GORONTALO


NELSON POMALINGO



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumberdaya dengan mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021 dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gorontalo 2016 – 2021.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator - indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dimana untuk Tahun 2018 telah ditetapkan 25 (dua puluh lima) sasaran strategis dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Pencapaian kinerja pada Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Tahun 2016 – 2021. Adapun capaian akhir masing-masing sasaran strategis berdasarkan target akhir RPJMD berdasarkan pelaksanaan 5 (lima) Misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, adalah sebagaimana berikut:



A. Misi 1 : Menciptakan Sumberdaya Manusia Sehat Cerdas dan Berkarakter, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Pemenuhan Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **164.70%** atau bermakna Sangat Berhasil.
2. Terpenuhinya Layanan Kesehatan Berkualitas, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **93,46%** atau bermakna Berhasil.
3. Terbinanya Tenaga Kerja Produktif, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **100,83%** atau bermakna Berhasil.
4. Terbinanya Wirausahawan Muda Mandiri, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **70,57%** atau bermakna Kurang Berhasil.
5. Terbentuknya Pemuda Berprestasi, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **160%** atau bermakna Sangat Berhasil.
6. Terbinanya Seni Budaya Lokal, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **350 %** atau bermakna Sangat Berhasil.

B. Misi 2 : Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis, dengan sasaran strategis :

1. Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **112,23 %** atau Sangat Berhasil.
2. Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berintegritas, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **103,32%** atau bermakna Berhasil.
3. Tercapainya pelayanan publik yang berkualitas, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **115,26%** atau bermakna Sangat Berhasil.

C. Misi 3 : Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian, dengan sasaran strategis :

1. Peningkatan Ekonomi Wilayah yang Berkualitas, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **162.66 %** atau bermakna Sangat Berhasil.
2. Peningkatan Kemajuan dan Perkembangan Desa, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **94,67 %** atau bermakna Berhasil.
3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 100% atau bermakna Berhasil.



4. Ketersediaan keterjangkauan dan kelembagaan pangan, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **96,6** % atau bermakna Berhasil.
5. Revitalisasi jalan, jembatan dan sungai, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **109%** atau bermakna Berhasil.
6. Ketersediaan sarana air bersih dan minum, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **6,71** % atau bermakna Tidak Berhasil.
7. Ketercapaian perumahan dan sanitasi yang baik, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **101%** atau bermakna Berhasil.
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Rencana Tata Ruang, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **41%** atau bermakna Tidak Berhasil.
9. Ketersediaan Bangunan dan Gedung yang Refresentatif sebesar 30,5% atau bermakna Tidak Berhasil.

D. Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran strategis :

1. Penurunan Angka Kemiskinan, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **88,93%** atau Kurang Berhasil.
2. Pengendalian Penduduk, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **134,26%** atau bermakna Sangat Berhasil.
3. Pengarustamaan gender dan Perlindungan anak, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **66,26** % atau bermakna Tidak Berhasil.
4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **108,41%** atau bermakna Berhasil.
5. Peningkatan kualitas baku lingkungan hidup, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **80,24%** atau bermakna Kurang Berhasil.
6. Penurunan tingkat kerentanan bencana, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **88,33** % atau Kurang Berhasil.



E. Misi 5 : Melakukan Kerjasama Global Untuk Pembangunan Daerah, dengan sasaran strategis :

1. Terlaksananya Kemitraan Antar Daerah, dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 109,47% atau bermakna Sangat Berhasil.
2. Peningkatan Kontribusi Sektor Swasta dan Lembaga Donor Terhadap Pembangunan Daerah, dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar **82,2 %** atau bermakna Kurang Berhasil.

Terwujudnya capaian kinerja ini, tentunya karena adanya komitmen dari seluruh jajaran Pemerintahan di Kabupaten Gorontalo baik jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gorontalo serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini tentunya akan menjadi modal utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo, khususnya dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 - 2021.

Limboto, Maret 2019

BUPATI GORONTALO



NELSON POMALINGO



DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN REVIU	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Aspek Strategis	3
C. Isu Strategis Daerah Tahun 2018	17
D. Sitematika Penyajian	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo	20
B. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018	37
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	55
A. Capaian Kinerja.....	55
1. Evaluasi Kinerja	56
2. Analisis Capaian Kinerja	59
B. Realisasi Anggaran.....	142
BAB IV PENUTUP	162
LAMPIRAN :	
Revisi Perjanjian Kinerja Kabupaten Gorontalo Tahun 2018	
Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018	
Perjanjian Kinerja Kabupaten Gorontalo Tahun 2019	
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2019	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan, dan Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan.....	4
Tabel 1.2 Komposisi Penduduk menurut jenis kelamin dan KK menurut Kecamatan Tahun 2017	16
Tabel 2.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	23
Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018.....	46
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	49
Tabel 2.4 Jumlah Program dan Alokasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018	52
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	55
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2017.....	56
Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran Misi I Tahun 2018	60
Tabel 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah	63
Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran Terpenuhinya Layanan Kesehatan Yang Berkualitas	70
Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Pendukung Layanan Kesehatan Berkualitas Kabupaten Gorontalo	70
Tabel 3.7 Pencapaian Sasaran Terbinanya Tenaga Kerja Produktif.....	75
Tabel 3.8 Pencapaian Sasaran Terbinanya Wirausahawan Mandiri.....	75
Tabel 3.9 Pencapaian Sasaran Terbentuknya Pemuda Berprestasi.....	77
Tabel 3.10 Pencapaian Sasaran Terbinanya Seni Budaya Lokal	78
Tabel 3.11 Sanggar Budaya Jenis Budaya Lokal	78
Tabel 3.12 Pencapaian Sasaran Terbinanya Seni Budaya Lokal	79
Tabel 3.13 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas Tahun 2017 - 2018.....	80
Tabel 3.14 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah.....	82
Tabel 3.15 Rasio Aktivitas Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 - 2018.....	83
Tabel 3.16 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	



	Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas Berdasarkan Target RPJMD	84
Tabel 3.17	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berintegritas Tahun 2016 - 2017	87
Tabel 3.18	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berintegritas Berdasarkan Target RPJMD	89
Tabel 3.19	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Gorontalo	91
Tabel 3.20	Indikator Yang Menyebabkan Turunnya Nilai Reformasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Gorontalo Tahun 2017	92
Tabel 3.21	Rekomendasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	94
Tabel 3.22	Capaian dan Evaluasi Indikator Peningkatan Ekonomi Wilayah yang Berkualitas	97
Tabel 3.23	Gambaran ICOR Kabupaten Gorontalo	102
Tabel 3.24	Pencapaian Indikator Peningkatan Kemajuan dan Pembangunan Desa	106
Tabel 2.25	Pencapaian Indikator Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu	107
Tabel 3.26	Perkembangan NTP Gorontalo menurut Sub Sektor Tahun 2018	108
Tabel 3.27	Capaian Sektor Pola Pangan Harapan Tahun 2018	110
Tabel 3.28	Evaluasi Pencapaian Sasaran Revitalisasi Jalan.....	111
Tabel 3.29	Jumlah Jembatan yang Tebangun Tahun 2013 - 2018.....	112
Tabel 3.30	Kondisi Jembatan Tahun 2017 - 2018	113
Tabel 3.31	Irigasi yang Dipelihara Tahun 2017 - 2018.....	114
Tabel 3.32	Evaluasi Pencapaian Sasaran	115
Tabel 3.33	Evaluasi Ketercapaian Perumahan dan Sanitasi yang Baik.....	117
Tabel 3.34	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Rencana Tata Ruang	119
Tabel 3.35	Evaluasi Pencapaian Sasaran Penurunan Angka Kemiskinan.....	122
Tabel 3.36	Capaian Indikator Capaian Kemiskinan Lainnya	123
Tabel 3.37	Evaluasi Pencapaian Sasaran Pengendalian Penduduk	124



Tabel 3.38	Capaian Indikator Sasaran Pengendalian Penduduk Lainnya.....	126
Tabel 3.39	Evaluasi Pencapaian Sasaran Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak.....	128
Tabel 3.40	Evaluasi Pencapaian Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan untuk Memenuhi Kepentingan Publik dan Pembangunan Daerah	130
Tabel 3.41	Evaluasi Pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Baku Lingkungan Hidup	133
Tabel 3.42	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana	134
Tabel 3.43	Evaluasi Pencapaian Sasaran Kemitraan Antar daerah, Dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen Tahun 2018	137
Tabel 3.44	Evaluasi Pencapaian Sasaran Kemitraan Antar daerah, Dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen Tahun 2017	138
Tabel 3.45	Evaluasi Pencapaian Sasaran Peningkatan Kontribusi Sektor Swasta dan Lembaga Donor Terhadap Pembangunan Daerah	139
Tabel 3.46	Trend Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	140
Tabel 3.47	Data Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	141
Tabel 3.48	Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) s.d 2018	141
Tabel 3.49	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terpenuhinya Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas	143
Tabel 3.50	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terpenuhinya Layanan Kesehatan Berkualitas	143
Tabel 3.51	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terbinanya Tenaga Kerja Produktif	145
Tabel 3.52	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian	



	Sasaran Terbitnya Wirausahawan Mandiri.....	146
Tabel 3.53	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terbentuknya Pemuda Berpestasi Nasional	147
Tabel 3.54	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terbinanya Seni Budaya Lokal	147
Tabel 3.55	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terselenggaranya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	148
Tabel 3.56	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Berintegritas	148
Tabel 3.57	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terlaksananya Reformasi Birokrasi	149
Tabel 3.58	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Peningkatan Ekonomi Wilayah yang Berkualitas	150
Tabel 3.59	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Peningkatan Kemajuan dan Perkembangan Desa	150
Tabel 3.60	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peranian Terpadu.....	151
Tabel 3.61	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Pencapaian sasaran Ketersediaan Keterjangauan dan Kelembagaan Pangan.....	152
Tabel 3.62	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Revitalisasi Jalan, Jembatan dan Sungai.....	153
Tabel 3.63	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Ketersediaan Sarana Air Bersih dan Minum	154
Tabel 3.64	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Ketercapaian Perumahan dan Sanitasi yang Baik.....	154
Tabel 3.65	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Rencana Tata Ruang	155
Tabel 3.66	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Penurunan Angka Kemiskina.....	155



Tabel 3.67	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Pengendalian Penduduk.....	157
Tabel 3.68	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak.....	158
Tabel 3.69	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan	158
Tabel 3.70	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Baku Lingkungan Hidup	159
Tabel 3.71	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Penurunan Tingkat Kerentanan Bencana	160
Tabel 3.72	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terlaksananya Kemitraan Antar Daerah dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen.....	160
Tabel 3.73	Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Peningkatan Kontribusi Sektor Swasta dan Lembaga Donor Terhadap Pembangunan Daerah	161



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Indikator SPM Pendidikan Dasar	61
Grafik 3.2	Capaian Kinerja Indikator Angka Rata – Rata Lama Sekolah	62
Grafik 3.3	APK dan APM Kabupaten Gorontalo	64
Grafik 3.4	Jumlah Sekolah Terakreditasi A di Kabupaten Gorontalo	65
Grafik 3.5	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs.....	66
Grafik 3.6	Perbandingan Capaian Jumlah Siswa Berprestasi Nasional	67
Grafik 3.7	Angka Melek Huruf Kabupaten Gorontalo	69
Grafik 3.8	Realisasi Penerimaan PAD Terhadap Penerimaan Transfer Dan Total Pendapatan APBD Tahun 2014 - 2018.....	81
Grafik 3.9	Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Transfer Ke Desa Terhadap Belanja APBD Tahun 2014 - 2018	84
Grafik 3.10	Capaian Nilai LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2015-2018.....	88
Grafik 3.11	Capaian Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo Terhadap Kabupaten Lainnya Tahun 2017.....	89
Grafik 3.12	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 - 2018	98
Grafik 3.13	Komposisi PDRB ADHK Kabupaten Gorontalo Tahun 2018	98
Grafik 4.14	Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Kabupaten Gorontalo Tahun 2018	99
Grafik 3.15	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2013 - 2017	100
Grafik 3.16	Trend PDRB Perkapita ADHK Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo	101
Grafik 3.17	Inflasi Gorontalo Tahun 2012-2017	103
Grafik 3.18	Indeks Gini Ratio Kab. Gorontalo Tahun 2015-2018.....	104
Grafik 3.19	NTP Gorontalo Tahun 2018	107
Grafik 3.20	Trend Skor PPH Kabupaten Gorontalo	109



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Kabupaten Gorontalo Tahun 2018**

Grafik 3.21 Komposisi Skor PPH (gram/kapita/hari) Tahun 2018	110
Grafik 3.22 Panjang Jalan Kabupaten Gorontalo dalam Kondisi Baik	112
Grafik 3.23 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih (%)	115
Grafik 3.24 Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (MDM)	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Gorontalo terbentuk pada tahun 1959 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi. Saat ini, Kabupaten Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi di pulau Sulawesi yang terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Dengan adanya era reformasi dan otonomi daerah, Kabupaten Gorontalo telah mengalami beberapa kali pemekaran.

Tugas Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka tugas pokok tersebut Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selengkapnya, landasan yuridis Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo 2016 –2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;



B. ASPEK STRATEGIS

1. Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten 3 Staf Ahli, dan 10 Bagian, terdapat juga Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6 Badan, 23 Dinas, dan 19 Kecamatan.

2. Karakteristik Lokasi Wilayah dan Lokasi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah sebesar 2.125,47 Km² atau 17,24% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Secara administratif Kabupaten Gorontalo memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Tomini

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Boalemo

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango

dan Kota Gorontalo

Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan, 191 desa dan 14 kelurahan, dengan ibu kota Kabupaten berada di wilayah Kecamatan Limboto. Kecamatan terluas yakni Kecamatan Asparaga dan terkecil adalah Kecamatan Tilango. Rincian luas wilayah masing – masing Kecamatan di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan, dan
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan *
		Km ²	%		
1	Batudaa Pantai	63,13	2,97	Kayubulan	9
2	Biluhu	79,20	3,73	Lobuto Timur	8
3	Batudaa	32,86	1,55	Payunga	8
4	Bongomeme	144,16	6,78	Dulamayo	15
5	Dungaliyo	46,62	2,19	Dungaliyo	10
6	Tabongo	54,80	2,58	Tabongo Timur	9
7	Tibawa	145,34	6,84	Isimu Selatan	16
8	Pulubala	240,57	11,32	Pulubala	11
9	Boliyohuto	60,59	2,85	Sidomulyo	13
10	Bilato	112,34	5,29	Totopo	10
11	Mootilango	211,49	9,95	Paris	10
12	Tolangohula	171,75	8,08	Sukamakmur	15
13	Asparaga	430,51	20,25	Karya Indah	10
14	Limboto	103,32	4,86	Kayubulan	14
15	Limboto barat	79,61	3,75	Huidu	10
16	Telaga	28,16	1,32	Luhu	9
17	Telaga Biru	108,84	5,12	Tuladenggi	15
18	Talaga Jaya	6,41	0,30	Luwoo	5
19	Tilango	5,79	0,27	Tilote	8
Kabupaten Gorontalo		2.125,47	100,00	Kec. Limboto	205

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Gorontalo terletak antara 0 24'– 10 02' LU dan 121 59' – 123 32' Bujur Timur. Letak ini menempatkan Kabupaten Gorontalo pada posisi strategis karena disamping sebagai transit area dari dan ke Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, juga merupakan *melting pot*, karena terdapat gerbang udara yakni Bandara Jalaludin Gorontalo.



c. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Gorontalo didominasi kemiringan 15 – 40° (45 – 46%) dengan luas wilayah 2.125,47 Km, sebagian besar permukaan tanahnya merupakan perbukitan dan bergunung-gunung dengan jenis tanah yang sering mengalami erosi. Ketinggian dari permukaan laut berada pada 0 – 50 meter DPL kurang lebih 7,9%, ketinggian 50 – 100 meter sebanyak 21,26 % dan sebagian besar lagi pada ketinggian 100 – 500 meter DPL sebanyak 51,08 %, dan sisanya berada ketinggian 500 – 1000 meter DPL sebanyak 15,68 %, dan > 1000m DPL sebanyak 4.49 %.

Wilayah Kabupaten Gorontalo merupakan perbukitan dengan prosentase luasan 71,83 %. Kabupaten Gorontalo mempunyai gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Gunung yang tertinggi adalah gunung Boliyohuto dengan ketinggian 2.065 m yang terletak di Kecamatan Tolangohula.

d. Kondisi Geografi

Berdasarkan peta geologi dari Direktorat Geologi (Tjetje Appandi, 1977) di Kabupaten Gorontalo dijumpai batuan gunung api (berupa breksi gunung api, tufa dan lava yang mengandung batu apung warna kuning); batuan gamping koral berwarna putih, pejal pada perbukitan; batuan beku terobosan granodiorit, dijumpai menerobos batuan gunung api maupun batu gamping terjal di wilayah bagian selatan; dan alluvium berupa lumpur, pasir dan kerikil pada satuan morfologi daratan.

Pembagian zona bentang alam yang merupakan representasi batuan dan struktur geologinya, Kabupaten Gorontalo termasuk pada zona fisiografis utama, yaitu Zona Pegunungan Utara Tilongkabila- Boliyohuto, dan Zona Dataran Interior Paguyaman-Limboto. Zona Pegunungan Utara Tilongkabila-Boliyohuto umumnya



terdiri dari formasi-formasi batuan gunung api berumur Miosen – Pliosen (kira-kira 23 juta hingga 2 juta tahun yang lalu).

Umumnya terdiri dari batuan beku intermedier hingga asam, yaitu batuan-batuan intrusif berupa diorit, granodiorit, dan beberapa granit. Batuan lainnya merupakan batuan sedimenter bersumber dari gunung api terdiri dari lava, tuf, breksi, atau konglomerat. Asosiasi batuan-batuan tersebut membawa pada kandungan mineral logam yang berharga, khususnya emas. Tambang-tambang emas rakyat tersebar di zona ini, seperti di Dutula Nantu, sungai yang berasal dari Pegunungan Boliyohuto (± 2.065 m).

e. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Kabupaten Gorontalo memiliki 55 buah sungai besar dan kecil dengan total panjang sungai dan anak sungai tersebut sebesar 1.007,65 km yang bermuara di Danau Limboto. Terdapat dua daerah aliran sungai (DAS) utama yang mengalir di wilayah ini yaitu DAS Paguyaman dan DAS Bone – Bolango yang bermuara di Teluk Tomini. Sumber air untuk keperluan penduduk disuplai melalui PDAM, namun sebagian besar masyarakat masih menggunakan air tanah dangkal dan sumur serta sebagian yang lainnya masih menggunakan air sungai. Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis bantuan induk dan sebagainya.

Dari total luas wilayah Kabupaten Gorontalo, 22.748 Ha (sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : 452/KPTS-II/1999) diarahkan untuk peruntukan kawasan hutan lindung yang dalam kenyataannya juga merupakan kawasan resapan air. Curah hujan wilayah kabupaten pada umumnya tergolong cukup rendah, Sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh waktu maka besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain,



seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu.

f. Kondisi Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan dan hari hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Begitupun halnya dengan suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2018 menurut data BPS Kabupaten Gorontalo suhu udara rata-rata pada berkisar antara 23,3°C sampai 33,4°C, sedangkan untuk kelembaban berkisar antara 79,4°C sampai 85°C.

g. Penggunaan Lahan (*Land Use*)

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Penggunaan lahan di Kabupaten Gorontalo diatur dalam Rencana Pola Ruang Wilayah yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan Lindung Kabupaten Gorontalo meliputi : Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya; Kawasan perlindungan setempat; Kawasan rawan bencana alam.

Untuk kawasan budidaya diusahakan untuk menumbuh kembangkan dan melestarikan kawasan lindung setempat baik ruang darat, laut maupun udara untuk menjaga keasrian dan kelestarian ragam hayati, yang juga merupakan mata rantai sistem ekologi wilayah, seperti ruang terbuka hijau, baik berupa hutan kota, jalur hijau di sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau, sempadan jalan luar kota dan atau sempadan jalan bebas hambatan.



3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Gorontalo memiliki beberapa potensi untuk dikembangkan yakni sebagai berikut :

a. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Gorontalo dikembangkan di perairan darat atau perairan umum dan di perairan pesisir dan laut. Di perairan darat, potensi kawasan berupa danau dan kolam-kolam. Danau Limboto merupakan potensi kawasan perikanan penting, baik untuk pengembangan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Demikian halnya kawasan sekitar-sungai (DAS) dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan budidaya kolam menggunakan air sungai sebagai media pemeliharaan.

Di kawasan pesisir dan laut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan budidaya (pertambakan dan marikultur), disamping perikanan tangkap (*coastal fisheries*). Pengembangan kawasan perikanan di pesisir selatan Kabupaten Gorontalo dapat dilakukan pada bentangan pantai sepanjang 79,4 km. Potensi ini dapat dimanfaatkan terutama sebagai lokasi *marinecultuur*, baik untuk areal budidaya rumput laut maupun budidaya ikan-ikan laut (kakap, baronang, kerapu). Pengembangan kawasan perikanan tangkap lebih diarahkan pada penata-kelolaan daerah penangkapan di wilayah perairan pantai (*coastal waters*).

Berdasarkan kategori ruang, wilayah perikanan pantai untuk daerah penangkapan terbentang dari garis pantai ke arah luar hingga kedalam ± 200 m (*flat continent*). Berdasarkan kondisi topografi dan *bathimetrik*, pesisir selatan memiliki *flat* kontinen relatif sempit, diperkirakan kurang 4 mil-laut. Kawasan *flat* kontinen merupakan lokasi '*hunting*' bagi nelayan, khususnya nelayan tradisional.

Kawasan perikanan tangkap di bagian luar perairan pantai dikategorikan sebagai kawasan pengembangan perikanan *oseanic*.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

Kawasan perairan sebelah selatan Kabupaten Gorontalo (Teluk Tomini) memiliki potensi stok ikan yang diperkirakan sebesar 32.560 ton/tahun, terdiri dari ikan pelagis sebesar 19.536 ton/tahun dan ikan demersal 13.024 ton/tahun. Potensi stok ini merupakan 'stok-bersama' bagi seluruh pemerintah daerah yang memiliki akses terhadap perairan Teluk Tomini.

Kegiatan usaha pertanian di subsektor perikanan terdiri dari kegiatan budidaya ikan dan kegiatan penangkapan ikan. Dari kedua kegiatan tersebut, hasil ST 2017 mencatat bahwa terdapat 4.585 rumah tangga yang berusaha disubsektor perikanan. Jumlah rumah tangga yang mengusahakan kegiatan penangkapan ikan hampir sama dengan usaha rumah tangga budidaya ikan. Berdasarkan hasil ST 2017, terdapat sebanyak 3.461 rumah tangga yang mengusahakan kegiatan penangkapan ikan dan jumlah rumah tangga yang mengusahakan kegiatan budidaya ikan adalah sebanyak 1.124 rumah tangga. Berikut peta sebaran usaha dibidang perikanan.

Gambar 1.1
Peta Sebaran Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan, ST 2017

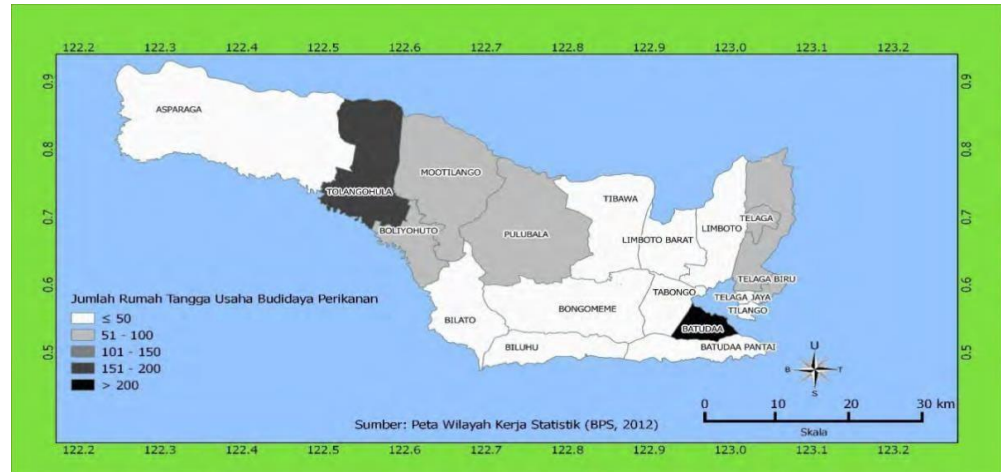


Sumber : BPS, 2018



Peta berwarna ungu merupakan konsentrasi wilayah dengan rumah tangga yang berusaha disektor perikanan tangkap. Sebaran rumah tangga dengan kegiatan usaha budidaya ikan dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 1.2
Peta Sebaran Rumah Tangga Usaha Budidaya Ikan, ST 2017



Sumber : BPS, 2018

Warna hitam pada peta menunjukkan lokasi rumah tangga dengan kegiatan usaha budidaya perikanan. Nampak warna hitam tersebut merupakan lokasi Kecamatan Batudaa dan Tolangohula.

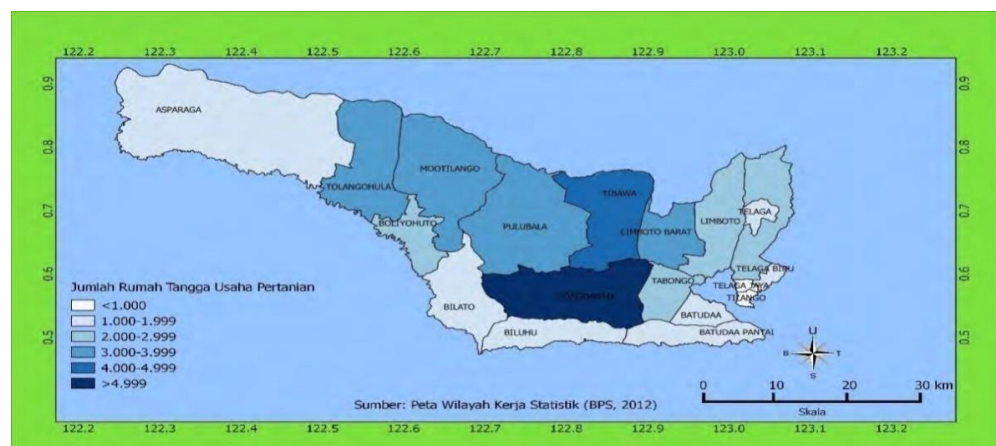
b. Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian

Pengembangan komoditas pertanian pada wilayah yang sesuai dengan persyaratan pedo-agroklimat tanaman (seperti iklim, tanah, dan topografi) akan memberikan hasil yang optimal dengan kualitas prima. Keragaman sifat lahan ini merupakan modal dasar yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pewilayahan komoditas (zonasi ruang) pertanian. Perencanaan pembangunan pertanian yang berdasarkan pewilayahan akan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang, serta menjamin efektivitas perencanaan yang sinergis dan berkelanjutan.



Berdasarkan data BPS Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 menunjukkan bahwa komoditi pertanian di Kabupaten Gorontalo didominasi oleh rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbadan hukum atau pelaku usaha lainnya yaitu selain rumah tangga dan perusahaan pertanian berbadan hukum.

Gambar 1.3
Peta Sebaran Rumah Tangga Usaha Pertanian, ST 2017



Sumber :BPS, 2018

Sub sektor tanaman pangan masih mendominasi usaha pertanian di Kabupaten Gorontalo. ST 2017 mencatat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di Kabupaten Gorontalo adalah di sub sektor tanaman pangan dan sub sektor peternakan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian sub sektor tanaman pangan adalah sebanyak 28.011 rumah tangga dan jumlah rumah tangga usaha pertanian sub sektor peternakan adalah sebanyak 28.797 rumah tangga.



c. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pada tahun 2017 tercatat di Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kominfo bahwa terdapat 15 jenis wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan membutuhkan pengembangan agar memiliki daya tarik tersendiri baik wisatawan lokal, wisatawan domestik maupun mancanegara. Adapun Obyek wisata yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Gorontalo meliputi :

- 1) Obejek wisata pemandian Taluhu Barakati yang berlokasi di Desa Barakati Kecamatan Batudaa.
- 2) Objek wisata Pentadio Resort yang berlokasi di Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru.
- 3) Objek Wisata air panas Diloniyohu yang berlokasi di Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto.
- 4) Objek wisata Pantai Taulaa berlokasi di Desa Taulaa Kecamatan Bilato.
- 5) Objek wisata Pantai Ilomata berlokasi di Desa Ilomata Kecamatan Boliyohuto.
- 6) Objek wisata Rumah adat Gorontalo (Bantayo Poboide) berlokasi di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto.
- 7) Aneka order kerawang berlokasi di Kecamatan Limboto.
- 8) Aneka kopian keranjang berlokasi di kecamatan Pulubala.
- 9) Desa wisata religi berlokasi di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai.
- 10) Makam Raja Panipi berlokasi di Desa Barakati Kecamatan Batudaa.
- 11) Objek wisata batu buaya di Desa Barakati Kecamatan Batudaa.
- 12) Objek wisata Batu Babi di Desa Barakati Kecamatan Batudaa.
- 13) Objek wisata Kebun Binatang di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto.
- 14) Objek wisata Menara Pakaya Tower Limboto.



- 15) Objek wisata Bukit Puncak Penghijauan Nasional (PPN) Bongohulawa.

d. Potensi Pengembangan Kawasan Industri

Saat ini, kegiatan industri di Kabupaten Gorontalo bersifat menyebar (kegiatan home industri). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo dapat dibagi atas: (i) industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri); (ii) industri aneka; dan (iii) industri logam, mesin, dan kimia; dan (iv) industri perikanan.

Empat jenis industri tersebut dijumpai di seluruh Kecamatan. Namun, untuk keperluan jangka panjang diperlukan penetapan wilayah dengan fungsi utama pengembangan industri. Karena skalanya yang masih kecil, dalam rencana ini digunakan istilah kawasan industri terbatas atau sentra industri kecil. Kedepan ini merupakan cikal bakal untuk tumbuh menjadi suatu kawasan industri. Sentra industri kecil merupakan suatu area/lahan peruntukan dimana terdapat berbagai kegiatan usaha industri kecil sejenis, yang tumbuh dan berkembang dalam suatu lokasi tertentu.

Berdasarkan jumlah, sebaran, kecenderungan perkembangan industri kecil, dan proksimitas dengan bahan baku, alokasi ruang bagi pengembangan kawasan industri terbatas (sentra industri kecil) di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

- 1) Agro-industri di Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Bongomeme.
- 2) Sentra Industri Kecil Aneka di Kecamatan Telaga dan Kecamatan Telaga Biru.
- 3) Sentra Industri Kecil logam, mesin, dan kimia di Kecamatan Telaga dan Limboto Barat.
- 4) Industri perikanan terbatas di Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Bilato.



e. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan

Berdasarkan hasil penelitian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (2004) di Kabupaten Gorontalo ditemukan wilayah indikasi logam emas di Kecamatan Boliyohuto. Sedangkan wilayah dengan potensi mineral non-logam tersebar diberbagai wilayah kecamatan :

- 1) Grint, terbesar di Kecamatan Batudaa.
- 2) Batu Gamping, yang sangat melimpah yang penyebarannya meliputi daerah perbukitan dengan bentuk morfologi yang khas yaitu di Kecamatan Tibawa, Kecamatan Batudaa.
- 3) Lempung dengan penyebarannya di Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Limboto.
- 4) Sirtu dengan penyebarannya berada di Kecamatan Telaga, Kecamatan Batudaa dan Kecamatan Limboto.

4. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah dengan kejadian bencana cukup besar mulai dari bencana geologi, klimatologi, dan lingkungan, akibatnya penggunaan ruang yang cenderung semakin intensif menjadikan kondisi fisik kawasan terbangun dan kawasan budidaya semakin rentan terhadap bencana banjir. Selain kondisi fisik yang rentan, struktur bangunan rumah, gedung, maupun infrastruktur juga memperparah keadaan karena cenderung tidak tahan gempa dan tidak tahan gerakan tanah, serta konstruksinya tidak ramah banjir.

Kondisi daerah yang berbukit sampai pegunungan mengkondisikan mengkondisikan wilayah Kabupaten Gorontalo rawan terhadap bencana gerakan tanah/batuan. Gempa di darat dapat dihasilkan dari patahan geser yang berarah utara barat laut – tenggara dan melewati Danau Limboto. Patahan ini merupakan patahan aktif yang ditimbulkan oleh kedua pusat pergeseran kulit bumi (gempa) di atas, Patahan yang melewati Danau Limboto adalah patahan akibat pergeseran kulit bumi



yang disebabkan bergerakanya mikro kontinen Filipina ke selatan dan mikro kontinen di sebelah timur Sulawesi ke arah relatif barat.

Untuk Kabupaten Gorontalo pada khususnya dan Provinsi Gorontalo pada umumnya, terdapat dua Kawasan pusat gempa di laut dan satu di darat, pada daerah laut terdapat pada kawasan laut pantai selatan. Sedangkan di darat yaitu di sekitar Danau Limboto, dengan demikian potensi Tsunami dapat terjadi dari wilayah pantai utara dan pantai selatan.

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Gorontalo umumnya tersebut terdapat di beberapa lokasi sebagai berikut: (i) wilayah sekitar sungai-sungai besar yaitu Bilato, Asparaga, Tolangohula dan (ii) wilayah sekitar danau yaitu Limboto Barat, Limboto, Telaga, Talaga Jaya, Telaga Biru, Tilango, Batudaa, Tabongo, Dungaliyo, Bongomeme dan Tibawa.

5. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo pada akhir tahun 2017 sebanyak 374.523 jiwa yang terdiri atas 187.301 jiwa penduduk laki-laki dan 187.622 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Gorontalo mengalami pertumbuhan 0.55 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0.49 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,62 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99.83 persen. Berikut komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2017 terlihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.2
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan
Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Batudaa Pantai	6.078	5.888	11.96	1.03
Biluhu	4.454	4.161	8.615	1.07
Batudaa	7.234	7.183	14.417	1,00
Bongomeme	9.680	9.394	19.074	1.03
Tabongo	9.507	9.260	18.767	1.02
Dungaliyo	8.804	8.860	17.454	1.01
Tibawa	20.646	20.480	41.126	1.00
Pulubala	13.194	12.896	26.090	1.02
Boliyohuto	8.535	8.358	16.893	1.02
Mootilango	9.947	9.561	19.508	1.04
Tolangohula	11.519	11.156	22.675	1.03
Asparaga	7.136	6.631	13.767	1.07
Bilato	4.997	4.871	9.868	1.02
Limboto	24.497	24.744	49.241	0.99
Limboto Barat	12.668	12.901	25.569	0.98
Telaga	11.308	11.343	22.651	0.99
Telaga Biru	14.699	14.679	29.378	1,00
Tilango	7.566	7.411	14.977	1.02
Talaga Jaya	6.103	6.059	12.612	1,00
Kabupaten Gorontalo	198.171	195.767	394.484	1.01

Sumber : BPS, 2018



C. ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2018

Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, yaitu **“Akselerasi Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas melalui Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Ketahanan Pangan”**, serta mempertimbangkan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya, maka pelaksanaan pembangunan program dan kegiatan pada Tahun 2018, ditekankan kepada penanganan isu – isu strategis sebagai berikut:

- a. Kemiskinan.
 - Prosentase penduduk miskin
 - Redesain kebijakan penanggulangan kemiskinan
 - Upaya Penanggulangan Kemiskinan pada laporan kerja sector pertanian
 - Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Pengangguran.
 - Akses lapangan kerja
 - Keterampilan dan keahlian pencari kerja
 - Arus investasi
- c. Indeks Gini Ratio Cukup Tinggi
 - Pertumbuhan yang berkeadilan
 - Kesenjangan antar wilayah
 - Transformasi pembangunan sektrol ke pembangunan wilayah
- d. Indeks Pembangunan Manusia
 - Akses dan kualitas pendidikan
 - Akses dan kualitas layanan kesehatan
 - Akses terhadap sumber – sumber penghidupan masyarakat
- e. Angka Kematian Ibu
 - Kualitas Pelayanan Kesehatan
 - Perilaku Hidup Sehat
 - Ketersediaan pusat – pusat layanan kesehatan



- f. Kemandirian Fiskal Daerah
 - Rasio antara Pendapatan Asli daerah dengan dana Perimbangan
 - Minimnya *income generating*
 - Minimnya kewenangan pemerintah daerah untuk intensifikasi dan extensifikasi penerimaan.
- g. Belum Terpenuhinya Pencapaian SPM
 - SPM Pendidikan
 - SPM Kesehatan
 - SPM Sosial
 - SPM Pekerjaan Umum
 - SPM Perumahan dan Pemukiman
 - SPM Keamanan Ketertiban Umum
- h. Pencapaian SDGs.
 - Progres capaian indicator SDGs
- i. Reformasi Birokrasi
 - Capaian delapan (8) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan informasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018. Adapun sistematika penulisan dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, adalah sebagai berikut ini :

Kata Pengantar

Ikhtisar eksekutif

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi dan sistematika penyajian.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan hasil Pengukuran Kinerja. Untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN GORONTALO

Penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo tahun 2016 – 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Daerah.

VISI

Visi pembangunan sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat Madani”**

Adapun makna yang dimaksud dalam Visi tersebut adalah seperti berikut :

1. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang

Kata “Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang menunjukkan kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk kesejahteraan dan kemandirian rakyat. Dengan kata lain Gemilang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kejayaan dan kemasyhuran berupa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dalam konteks gerakan sosial (*social change*), kata “GEMILANG” merupakan kontekstualisasi dari akronim “Gerakan Etis Masyarakat untuk membangun Insan Cemerlang”. Maknanya adalah gerakan bersama yang bersifat massif dan partisipatif, namun tetap mengacu pada norma dan etika yang berlaku, dalam rangka membangun daerah, agar masyarakat



meraih kejayaan dan kemasyhuran dalam bentuk kesejahteraan dan kemandirian.

2. Masyarakat Madani

Visi madani adalah menggambarkan atmosfir Kabupaten Gorontalo pada jangka panjang. Dengan demikian maka pemenuhan indikator pembangunan diharapkan dapat memberi manfaat jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang bernuansa kota menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Menciptakan Sumber daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan tercipta SDM yang produktif dan kompetitif dengan karakter yang dilandasi kearifan lokal yang siap menghadapi era globalisasi.

2. Memantapkan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga, serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

3. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mewujudkan kemandirian masyarakat yang berbasis potensi lokal dan keunggulan daerah yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.



4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kependudukan dan lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan berbasis kependudukan sebagai dasar dalam menilai jalannya proses pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam perencanaan pembangunan dan kesetaraan. Sedangkan pembangunan berbasis lingkungan hidup bermakna bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh merusak lingkungan. *Equalibrium* antara pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pembangunan harus linier dengan kelestarian lingkungan sehingga diharapkan terbina sebuah ekosfer yang gemah ripah loh jinawi (kekayaan alam yang melimpah).

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga eksternal (lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo.

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah serta targetnya.

Keterkaitan antara Visi, Misi Tujuan dan Sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun serta rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI			
“ TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG MENUJU MASYARAKAT MADANI ”			
MISI I : MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA CERDAS, SEHAT DAN BERKUALITAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya SDM cerdas dan sehat	Terpenuhinya Layanan Pendidikan Dasar berkualitas	Memfokuskan pemenuhan Standar Layanan Minimal pendidikan dasar Meningkatkan standar kualitas pendidikan	Pemenuhan 14 indikator SPM Pelayanan Pendidikan Dasar Kabupaten
			Peningkatan Angka Partisipasi Pra Sekolah
			Peningkatan Angka Rata-Rata lama sekolah
			Peningkatan Jaminan Mutu Eksternal Sekolah (Perangkat Akreditasi)
			Peningkatan Jaminan Mutu Manajemen Sekolah melalui Sertifikasi ISO
			Peningkatan Jumlah Siswa/ Peserta Didik Berprestasi Nasional
			Pencapaian Indeks Integritas UAN SD/MI/SMP/MI yang tinggi
		Pemenuhan layanan pendidikan dasar berkelanjutan	Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
			Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
			Peningkatan Angka Melanjutkan (SM) dari SD/MI ke SMP/MTs
	Terpenuhinya layanan kesehatan berkualitas	Pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, responsive, terjangkau, dan berkeadilan	Peningkatan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
			Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan Kabupaten
			Pemenuhan indikator SPM Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
			Penurunan cakupan Balita Gizi Buruk
		Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

			Peningkatan Akreditasi Puskesmas
			Penurunan Prevalensi Stunting Pada Anak di Bawah 2 Tahun
			Penurunan Angka Kematian Bayi
			Penurunan Angka Kematian Ibu
Terciptanya SDM yang berkarakter kompetitif	Terbinanya tenaga kerja produktif	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Peningkatan partisipasi angkatan kerja
			Peningkatan serapan tenaga kerja yang berasal dari kategori Pengangguran Terbuka
			Penyediaan lapangan kerja bagi pencari kerja
			Pemenuhan permintaan tenaga kerja terampil dari luar daerah
	Terbinanya wirausahawan muda mandiri	Mengembangkan jiwa kewirausahaan pada kalangan generasi muda	Pencapaian target penambahan jumlah Wirausahawan muda baru
			Peningkatan jumlah UMKM Aktif dengan pelaku utama berasal dari kalangan muda
	Terbentuknya pemuda berprestasi	Mendorong pembinaan atlit dengan fokus kecabangan unggulan	Penciptaan atlit berprestasi Nasional
		Mendorong pembinaan pemuda bertalenta untuk meraih prestasi nasional	Pembinaan Pemuda Berprestasi Nasional
	Terwadahnya kreativitas dan inovasi masyarakat	Mendorong terbentuknya sistem inovasi daerah	Pengembangan produk-produk inovasi daerah
			Pengembangan produk-produk kreativitas daerah
			Pengembangan produk-produk Teknologi Tepat Guna



	Terbentuknya zona satelit pendidikan	Mengembangkan Limboto dan sekitarnya sebagai kawasan satelite pendidikan di Propinsi Gorontalo	Pencapaian Rasio Ideal ASN Berpendidikan S2 dengan S3
			Peningkatan kompetensi ASN melalui proses-proses sertifikasi Keahlian
			Peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan S1, S2, dan S3 pada bidang ilmu unggulan dan prioritas
			Penerapan Implementasi Hasil-hasil Riset dalam program pemerintah daerah
			Peningkatan Indeks literasi perpustakaan
			Fasilitasi Lembaga-lembaga pendidikan sebagai bagian upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM
			Peningkatan transfer pengetahuan dan teknologi antara pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi
			Penguatan pengelolaan laboratorium pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan oleh Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat
	Terbinanya seni budaya lokal	Mendorong penguatan nilai-nilai karakter melalui pendidikan formal	Penguatan nilai-nilai toleran, akhlak mulia, moral, etika dan tetap terjaganya semangat gotong royong
			Pengelolaan warisan budaya lokal
		Meningkatkan apresiasi seni dan karya budaya	Pengembangan Kelompok seni budaya yang dapat perform di event nasional untuk memperkenalkan budaya lokal Gorontalo
			Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Gorontalo



MISI II : MEMANTAPKAN PEMERINTAHAN YANG HARMONIS, BERSIH DAN DINAMIS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEG	ARAH KEBIJAKAN
Terbangunnya sinergisitas antara institusi pemerintahan	Terbangunnya sinergi antara eksekutif dan legislative dalam pembentukan regulasi	Meningkatkan harmonisasi eksekutif dan legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan produktivitas legislative dalam melahirkan regulasi daerah
			Optimalisasi fasilitasi pemerintah daerah terhadap peran-peran legislative
			Penciptaan atmosfir kerja yang kondusif dan nyaman bagi proses-proses legislasi daerah (Pembangunan Kantor DPRD Baru)
		Meningkatkan efektifitas penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya	Optimalisasi penegakan perda yang telah diundang-undangkan
			Optimalisasi analisis dampak pemberlakuan perda dan produk hukum daerah lainnya secara berkelanjutan
			Optimalisasi proses-proses review terhadap perda dan produk hukum daerah lainnya
	Meningkatnya koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	Mendorong penguatan hubungan Pemerintah Daerah dengan Provinsi dan Pusat	Peningkatan peran Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam perumusan dan pelaksanaan regulasi
			Deregulasi terhadap produk hukum daerah yang dinilai tidak sesuai
			Penyelarasan dan sinkronisasi prioritas pembangunan kabupaten terhadap prioritas nasional
			Penyelarasan dan sinkronisasi prioritas pembangunan kabupaten terhadap prioritas provinsi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Mendorong terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, selaras dan konsisten	Peningkatan keselarasan RKPD terhadap RPJMD
			Peningkatan keselarasan APBD terhadap RKPD
			Peningkatan keselarasan DPA terhadap Renja SKPD
			Peningkatan capaian indikator RPJMD
			Optimalisasi akomodasi APBD terhadap Usulan-usulan Musrenbang
	Terselenggara nya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan	Meningkatkan capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan	Terus mempertahankan opini laporan keuangan pemda WTP
			Peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD : APBD)
			Peningkatan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
			Peningkatan rasio efisiensi pendapatan asli daerah
			Peningkatan angka rasio aktivitas
			Penurunan angka rasio ketergantungan
			Memproporsionalkan rasio pertumbuhan (<i>Growth Ratio</i>) (Pendapatan, Aset, Utang, Ekuitas, Belanja, Surplus/Defisit, Silpa & Sikpa)
			Peningkatan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah
	Terbentuknya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Mendorong terbentuknya Sistem Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan perolehan nilai AKIP Kabupaten Gorontalo
			Peningkatan perolehan nilai LPPD Kabupaten Gorontalo
			Pencapaian Indeks Persepsi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

	berintegritas	Pemerintah (SAKIP) daerah yang berintegritas	Korupsi (IPK) pada kategori baik
			Optimalisasi pengembalian TGR
	Tercapainya pelayanan publik yang berkualitas	Mendorong pencapaian reformasi birokrasi menuju layanan publik berkualitas	Penguatan SKPD dalam Melaksanakan Survei atas Indeks Kepuasan Masyarakat
			Optimalisasi SKPD dalam memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan dan penganggaran
			Pemantapan SKPD dalam pelaksanaan Standar Prosedur Layanan
			Penerapan proses perekrutan jabatan melalui Job Bidding dan melembagakan Asessment Centre di Badan Kepegawaian
Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan	Terselenggaranya manajemen perubahan dalam pemerintahan	Meningkatkan penatakelolaan perubahan berdasarkan azas kepatuhan	Ratifikasi regulasi nasional kedalam regulasi lokal Pemerintah Daerah
			Penyelenggaraan riset dan evaluasi pengembangan potensi daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah
	Terlaksananya e-Government (<i>Stepping Stone menuju Digital Government</i>)	Mendorong pengembangan e-Government sebagai modal transformasi ke digital Government	Penerapan aplikasi dan sistem informasi dalam pelayanan pada SKPD
			Pengintegrasian Sistem-sistem informasi SKPD
			Pengembangan data digital pada SKPD
			Penguatan penguasaan IT bagi kalangan ASN (SKPD)



MISI III : MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA ALAM MENUJU KEMANDIRIAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kondisi ekonomi wilayah	Peningkatan ekonomi wilayah yang berkualitas	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkualitas	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan titik tekan pada aspek keseimbangan rasio antara kapital dengan output dihasilkan, dan aspek efektivitas penyerapan tenaga kerja
			Pengendalian inflasi baik di tingkat perkotaan maupun di tingkat pedesaan baik dari sisi kebijakan fiskal maupun kebijakan riil pemda
			Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat
			Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Penurunan kesenjangan pembangunan antar kecamatan baik di Ibukota Kabupaten maupun Kecamatan terjauh
			Pembentukan <i>Central Bussines Distric</i> , pemukiman dan ekonomi kreatif untuk Telaga, Telaga Biru, Tilango
			Pengembangan sistem transportasi murah, nyaman, dan berkualitas
	Mengurangi tingkat kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan	Mendorong percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan di desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setempat
Berkembangnya sektor-sektor unggulan	Peningkatan produksi dan produktivitas	Meningkatkan produksi dan produktivitas	Pengembangan wilayah Boliyohuto CS sebagai pusat pertanian dan agro industri



daerah	pertanian terpadu	pertanian terpadu	Pengendalian volatilitas harga pertanian untuk meningkatkan indeks harga diterima petani
			Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman Padi
			Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman jagung
			Rehabilitasi lahan-lahan non produktif ke fungsi budidaya pertanian
			Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan
			Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura
			Pengembangan wilayah Batudaa Cs sebagai pusat peternakan dan perikanan
			Peningkatan rasio populasi ternak Ruminansia dan penduduk
			Peningkatan rasio populasi ternak unggas dan penduduk
			Peningkatan produksi perikanan
	Ketersediaan insentif bagi petani	Penyediaan insentif bagi petani	Peningkatan rasio penyuluh pertanian terhadap komoditi dan jumlah Desa/Kelurahan
			Pembangunan jalan usaha tani untuk mengakses lokasi pertanian
			Peningkatan cakupan lahan pertanian yang teraliri oleh irigasi
Menguatnya Ketahanan Pangan Daerah	Menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kelembagaan pangan	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kelembagaan pangan	Fasilitasi kepesertaan petani dan ternak pada asuransi
			Peningkatan produksi pangan strategis
			Pengembangan zona distribusi pangan
			Peningkatan skor pola pangan harapan
			Peningkatan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

			cadangan pangan masyarakat
			Pelaksanaan analisa neraca bahan makanan
			Pembukaan akses seluas-luasnya KK miskin rawan pangan terhadap bahan pangan
			Optimalisasi saluran distribusi cadangan pangan pemerintah ke wilayah kategori rawan pangan
			Pemberian subsidi pada komoditi pangan yang mengalami volatilitas harga
			Pembinaan poktan dan gapoktan pengolah cadangan pangan
			Pembentukan lumbung-lumbung pangan
	Pelestarian pangan lokal	Pelestarian pangan lokal	Pengembangan budidaya komoditas tanaman pangan lokal di budidaya
			Optimalisasi upaya-upaya pengelolaan jenis pangan lokal
			Pelaksanaan promosi panganan lokal sebagai bagian integral dari wisata kuliner
Kuatnya Daya Dukung Infrastruktur Wilayah	Revitalisasi Jalan, jembatan dan sungai	Meningkatkan kualitas jalan, jembatan dan sungai sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang	Pemeliharaan berkelanjutan pada jalan kabupaten
			Perbaikan secara intense jembatan rusak
			Pelaksanaan normalisasi sungai dan penguatan tebing
			Pembangunan irigasi baru sesuai kebutuhan dan memelihara irigasi terbangun
	Ketersediaan	Meningkatkan	Peningkatan akses jaringan air



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

	sarana air bersih dan minum	kualitas infrastruktur jaringan air bersih dan air minum yang memadai	bersih pada KK sasaran
	Ketercapaian perumahan dan sanitasi yang baik	Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman	Penurunan jumlah lokasi pemukiman kumuh
			Peningkatan cakupan rumah layak huni
			Peningkatan cakupan rumah tangga dengan sanitasi yang layak
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Rencana Tata Ruang	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan
			Penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
			Optimalisasi upaya pengendalian, evaluasi dan penegakan aturan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah disusun
			Penerapan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi
	Ketersediaan bangunan dan gedung representatif	Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan dan gedung untuk meningkatkan pelayanan masyarakat	Penyediaan bangunan pemerintah yang representatif
			Pembangunan fasilitas- fasilitas publik



MISI IV : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
integrasi kependudukan dengan kebijakan pembangunan	penurunan angka kemiskinan	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui perlindungan, pemberdayaan, kemitraan dan partisipasi sosial	Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian PMKS
			Pemenuhan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi yang berkualitas dan terjangkau, serta ketersediaan pangan dan gizi
			Penanggulangan kemiskinan bersasaran rumah tangga/keluarga, komunitas dan usaha mikro dan kecil
			Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat desa
			Penyediaan data base secara terpadu dalam pelayanan data kemiskinan dan data PMKS
			Peningkatan upaya kerjasama dan sinergitas dengan instansi terkait dalam penanganan masalah sosial
			Pembukaan peluang usaha ekonomi produktif bagi penduduk kurang mampu dan rentan
			Peningkatan investasi padat pekerja
			Peningkatan profesionalisme pelayanan social yang berbasis pekerjaan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Penguatan dan pepaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
	Pengendalian penduduk	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di	Penyediaan sarana dan



		setiap wilayah dan kelompok masyarakat	prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan kesehatan reproduksi serta jejaring pelayanan
			Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat
			Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, advokasi dan sosialisasi
	Pengarustamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan
			Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan	Meningkatkan upaya penataan dan fasilitasi administrasi kependudukan	Peningkatan cakupan pelayanan administrasi kependudukan
			Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi kependudukan
			Peningkatan diseminasi,



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

			aksesibilitas pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan
Penciptaan lingkungan yang lestari	Peningkatan kualitas baku lingkungan hidup	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya alam secara berkelanjutan melalui upaya penataan, rehabilitasi, konservasi dan pelibatan peran serta masyarakat	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian dan fungsi lingkungan
			Penataan Ruang Terbuka Hijau
			Optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan
	Penurunan tingkat kerentanan bencana	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di daerah
			Peningkatan upaya sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio
			Penerapan upaya mitigasi bencana yang berbasis kearifan lokal yang dimiliki masyarakat
			Penyediaan dokumen masterplan pencegahan dan penanggulangan bencana
			Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiaga (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

MISI V : MELAKUKAN KERJASAMA GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kemitraan bersama yang mendorong percepatan pembangunan daerah	Terlaksananya Kemitraan dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen	Pembentukan Protokol Kerjasama antar lembaga pemerintahan dan lembaga non departemen serta Pemerintah daerah lainnya	Pelaksanaan Kerjasama yang erat dengan Lembaga Kementerian dan Non Departemen
			Optimalisasi Kerja sama Kementerian dan Non Departemen dalam kerangka sinkronisasi dan harmonisasi program
			Pelaksanaan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah
			Optimalisasi MoU/MoA antar daerah
	Peningkatan kontribusi sektor swasta dan lembaga donor terhadap pembangunan daerah	Pembentukan Protokol Kerjasama Pemda dengan Pihak Luar Negeri	Pelaksanaan inisiasi Kerjasama Luar Negeri dengan penekanan pada nilai manfaat bagi pemda dan masyarakat Kabupaten Gorontalo
			Optimalisasi Kerjasama/MoU lembaga donor yang telah ditandatangani melalui pelaksanaan rencana-rencana aksi
		Optimalisasi pertumbuhan investasi dan export komoditi serta pemanfaatan CSR	Peningkatan Pertumbuhan nilai investasi baik PMA maupun PMDN
			Optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan anggaran CSR untuk membiayai pembangunan daerah
			Peningkatan jumlah Komoditi Export

Sumber : RPJMD Kabupaten Gorontalo 2016 - 2021



B. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021 berisikan perencanaan yang bersifat makro sehingga perlu dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan.

Rencana Pembangunan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 dengan tema “**Akselerasi Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas melalui Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Ketahanan Pangan**” didalamnya memuat sasaran yang hendak dicapai dan Prioritas Pembangunan Daerah akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2018 berdasarkan Misi Kabupaten Gorontalo disajikan pada tabel di bawah ini :

1. Misi 1 : Menciptakan Sumber daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terciptanya SDM cerdas dan Sehat	1 Terpenuhinya Layanan Pendidikan Dasar berkualitas	1. % pemenuhan indikator SPM Pendidikan Dasar
			2. Angka Partisipasi Pra Sekolah
			3. Angka rata-rata lama sekolah
			4. % Sekolah Terakreditasi A
			5. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
			6. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
			7. Indeks Integritas UAN SD/MI/SMP/MI
			8. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
			9. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

				SMA/SMK/MA
				10. Σ Siswa/Peserta Didik Berpretasi Nasional
		2	Terpenuhinya Layanan Kesehatan berkualitas	1. % pemenuhan indikator SPM Kesehatan
				2. % pemenuhan indikator SPM Rumah Sakit
				3. Cakupan Balita Gizi Buruk
				4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
				5. % Puskesmas Terakreditasi
				6. Prevalensi Stunting pada Anak di Bawah 2 Tahun
				7. Angka Kematian Bayi
				8. Angka Kematian Ibu
				9. Prevalensi TB Paru
				10. Prevalensi HIV/AIDS
				11. Insiden malaria
2	Terciptanya SDM yang berkarakter kompetitif	1	Terbinanya tenaga kerja produktif	1. Tingkat Partisipasi angkatan kerja
				2. % Pencari kerja yang ditempatkan
		2	Terbinanya wira usahawan mandiri	1. Σ Wirausahawan baru
				2. % Koperasi aktif
				3. Σ unit usaha industri
		3	Terbentuknya pemuda berprestasi	1. Σ Atlit Berpretasi Nasional
				2. Σ Pemuda Berpretasi Nasional
		4	Terwadahnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1. Σ Produk inovasi daerah
				2. Σ Produk kreativitas daerah
		5	Terbentuknya zona satelite pendidikan	1. Rasio ASN Berpendidikan S2 dengan S3
				2. Indeks literasi perpustakaan
				3. Σ Kemitraan dengan Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

				4. Σ Sarana Laboratorium Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi
				5. Σ ASN yang tersertifikasi kompetensi
		6	Terbinanya seni budaya lokal	1. Σ Kelompok seni budaya yang memperoleh apresiasi di event nasional
				2. Σ cagar budaya terpelihara
				3. Σ kunjungan wisatawan

2. Misi : 2 Memantapkan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
1	Terbangunnya sinergisitas antar institusi pemerintahan	1	Terbangunnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan regulasi	1. % Perda yang ditetapkan tepat waktu berdasarkan target prolegda
				2. % Perda yang dilaksanakan (<i>Law Enforcement</i>)
				3. % Perda yang diterima oleh Kemendagri
				4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
2	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	1. Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kabupaten terhadap prioritas nasional
				2. Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kabupaten terhadap prioritas provinsi
				3. Tingkat Kesesuaian RKPD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

				terhadap RPJMD
				4. Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD
				5. Prosentase kesesuaian Usulan Musrenbang terhadap APBD
				6. % SKPD yang memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan dan penganggaran
		2	Terselenggaranya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	1. Opini Laporan Keuangan Pemda
				2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
				3. Rasio Ketergantungan
				4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
				5. Rasio Aktivitas
				6. % Pertumbuhan (<i>Growth Ratio</i>) (Pendapatan, Aset)
				7. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah
		3	Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berintegritas	1. Nilai AKIP Kabupaten Gorontalo
				2. Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo
				3. Indeks Persepsi Korupsi
				4. Nilai Pengembalian TGR
		4	Tercapainya pelayanan publik yang berkualitas	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
				2. Σ SKPD yang melaksanakan Standar Prosedur Layanan
				3. % SKPD menerapkan jaminan mutu layanan (Sertifikasi, Akreditasi, ISO:9001)
				4. % Jabatan yang direkrut melalui Job Bidding/Assessment Centre
3	Terciptanya	1	Terselenggaran	Σ Riset dan Evaluasi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

	pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan	2	ya manajemen perubahan dalam pemerintahan Terlaksananya e government (<i>Stepping Stone</i> menuju <i>Digital Government</i>)	pengembangan potensi daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan
				1. Σ SKPD yang menerapkan aplikasi dan Sistim Informasi dalam pelayanan
				2. Σ SKPD yang menerapkan integrasi Sistim Informasi
				3. % SKPD yang telah mengakuisi data
				4. % Angka melek IT di Kalangan ASN (SKPD)

3. Misi 3 : Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kondisi ekonomi wilayah	1	Peningkatan Ekonomi Wilayah yang berkualitas	1. % pemenuhan indikator SPM Pendidikan Dasar
				2. Incremental Capital Output Ratio
				3. Incremental Labour Output Ratio
				4. Inflasi (Y on Y)
				5. PDRB Perkapita
				6. Pendapatan Perkapita
				7. Indeks Gini Ratio
				8. Purchasing Power Variety
				9. Indeks Wiliamson (Ketimpangan Antar Kecamatan)
		2	Peningkatan kemajuan dan perkembangan desa	1. Indeks Desa Membangun
				2. Jumlah desa tertinggal
2	Berkembangnya sektor unggulan daerah	1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu	1. Nilai Tukar Petani
				2. Σ Produksi Padi
				3. Produktivitas Padi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

				4. Σ Produksi Jagung
				5. Produktivitas Jagung
				6. Pertumbuhan Populasi Ternak Ruminansia
				7. Σ Populasi Ternak Unggas terhadap Penduduk
				8. Σ Produksi Perikanan
				9. Σ Luas Lahan non produktif menjadi fungsi budidaya pertanian
				10. Σ Produksi Perkebunan
				11. Produktivitas Perkebunan
				12. Produktivitas Hortikultura
				13. Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Komoditi dan Jumlah Desa/Kelurahan
		2	Ketersediaan Insentif bagi petani	1. Panjang jalan usaha tani yang terbangun
				2. Luas lahan pertanian teraliri oleh irigasi(kondisi baik)
				3. Σ perusahaan asuransi petani dan peternak yang beroperasi
3	Menguatnya Ketahanan Pangan Daerah	1	Ketersediaan, keterjangkauan dan kelembagaan Pangan	1. Ketersediaan Pangan Strategis (padi, jagung, ketela, sagu, ubi kayu)
				2. Σ Zona Distribusi Pangan
				3. Skor Pola Pangan Harapan
				4. Σ CPP daerah dan CPM
				5. Σ Poktan dan Gapoktan Pengolah Cadangan Pangan
		2	Pelestarian pangan lokal	1. Σ Komoditas tanaman pangan lokal dibudidaya
				2. Σ Jenis pangan lokal yang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

				diolah
				3. Σ Jenis pangan lokal yang diperkenalkan
4	Kuatnya Daya Dukung Infrastruktur Wilayah	1	Revitalisasi jalan, jembatan dan sungai	1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi layak
				2. % jembatan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik
				3. % sungai kewenangan kabupaten yang dinormalisasi dan penguatan tebing
				4. % Irigasi kewenangan kabupaten yang terbangun dan dipelihara
		2	Ketersediaan sarana air bersih dan minum	1. Cakupan penduduk dengan akses air bersih
				2. Σ KK yang tercakup oleh jaringan air bersih
		3	Ketercapaian perumahan dan sanitasi yang Baik	1. Penurunan luasan kawasan kumuh
				2. Prosentase Rumah Tangga dengan sanitasi yang layak
		4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Rencana Tata Ruang	1. Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB
				1. Jumlah dokumen RDTR yang ditetapkan
				2. Σ bangunan ber IMB
		5	Ketersediaan bangunan dan gedung representatif	1. Σ Bangunan pemerintah yang representative
				2. % pasar rakyat yang memenuhi standar



4. Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
1	Integrasi kependudukan dengan kebijakan pembangunan	1	Penurunan angka kemiskinan	1. % Penduduk miskin
				2. % APBD untuk penanggulangan kemiskinan
				3. Tingkat pengangguran terbuka
				4. Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		2	Pengendalian Penduduk	1. <i>Contraceptive Prevalence Rate (CPR)</i>
				2. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>
		3	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender
				2. Rasio KDRT terhadap Jumlah RT
		4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan Informasi kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak
				2. Tingkat kepemilikan KTP
				3. Cakupan penerbitan akta kelahiran
2.	Penciptaan lingkungan yang lestari	1	Peningkatan kualitas baku lingkungan hidup	1. % penanganan sampah
				2. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 10.000 penduduk
				3. Cakupan wilayah layanan penanganan sampah
				4. Tingkat Kualitas Air Sungai
		2	Penurunan tingkat kerentanan bencana	1. Prosentase desa tangguh/siaga bencana
				2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran
				3. Indeks resiko bencana



5. Misi 5 : Melakukan Kerjasama Global Untuk Pembangunan daerah

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kemitraan bersama yang mendorong percepatan pembangunan daerah	1	Telaksananya Kemitraan antar daerah, dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen	1. Σ Lembaga Kementerian dan Non Departemen yang bekerja sama dengan Pemda
				2. Σ Kerja sama Kementerian dan Non Departemen yang ditindak lanjuti
				3. Σ Inisiasi Kerjasama Luar Negeri bernilai manfaat bagi pemerintah daerah
				4. Σ Inisiasi Kerjasama Antar Daerah
				5. Σ MoU/MOA antar daerah ditindaklanjuti
		2	Peningkatan kontribusi sektor swasta dan lembaga donor terhadap pembangunan daerah	1. Pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN
				2. Σ Anggaran CSR yang dimanfaatkan membiayai pembangunan daerah
				3. Σ Komoditi Export

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi arah pembangunan dan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2018, maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gorontalo 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran strategis, Indikator kinerja dan target kinerja. RKT merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. Sasaran strategis, Indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjadi referensi bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Rincian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja		Target	
				Satuan	Nilai
1	2	3		4	5
A.	Misi ke 1 : Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter				
1	Terpenuhinya Layanan Pendidkan dasar Berkualitas	a.	Terpenuhinya Layanan Pendidkan dasar Berkualitas	Persen	60
		b.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,32
		c.	% sekolah terakreditasi A	Sekolah	SD=126
		d.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,148
		e.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,076
		f.	Σ Siswa/Peserta didik berprestasi nasional	Siswa	20
		g.	Angka Melek Huruf	Angka	99,66
2	Terpenuhinya Layanan Kesehatan Berkualitas	a.	% capaian indikator SPM Kesehatan	Persen	78
3	Terbinanya Tenaga Kerja Produktif	a.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	63,53
4	Terbinanya Wirausahawan Mandiri	a.	Σ Wirausahawan Mandiri	Orang	781
5	Terbentuknya Pemuda Berprestasi	a.	Σ Pemuda Berprestasi Nasional	Orang	5
6	Terbinanya Seni Budaya Lokal	a.	Σ Jenis seni budaya lokal dilestarikan	Jenis	1
B.	Misi ke 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter				
1	Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	a.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio	18 – 21
		b.	Rasio Aktifitas	Rasio	49,52
		c.	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Persen	25 – 28



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

			Daerah		
2	Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berintegritas	a.	Nilai AKIP Kabupaten Gorontalo	Angka	62,50
		b.	Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo	Nilai	Sangat Tinggi
3	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60-70 (Kategori B)
C.	Misi ke 3 : Mengoptimalkan Sumber daya Alam Menuju Kemandirian				
1	Peningkatan Ekonomi wilayah yang berkualitas	a.	Pertumbuhan ekonomi	Persen	7,82
		b.	Pendapatan Perkapita	Rp.	18.386,11
		c.	Incremental Capital Output Ratio	Persen	0,15
		d.	Inflasi (Y on Y)	Persen	3,8
		e.	PDRB Perkapita	Rp.	18.912,21
		f.	Indeks Gini Ratio	Indeks	0,41
2	Peningkatan kemajuan dan perkembangan desa	a.	Indeks desa membangun	Indeks	0,6200
3	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian terpadu	a.	Nilai tukar petani	Indeks	104
4	Ketersediaan, keterjangkauan dan kelembagaan pangan	a.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	84
5	Revitalisasi jalan, jembatan dan sungai	a.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi layak	Km	759,21
6	Ketersediaan sarana air bersih dan minum	a.	Σ KK yang tercakup oleh jaringan air bersih	KK	5.290
7	Ketercapaian perumahan dan sanitasi yang baik	a.	Penurunan luasan kawasan kumuh	Ha	117
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Rencana Tata Ruang	a.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	39,41
		b.	Jumlah dokumen RDTR	Dokumen	1
D.	Misi ke 4 : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup				
1	Penurunan Angka Kemiskinan	a.	% Penduduk miskin	Persen	18,76
		b.	% APBD untuk penanggulangan	Persen	11,50



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

			kemiskinan		
		c.	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3,73
2	Pengendalian Penduduk	a.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	65,25
		b.	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,31
3	Pengarustamaan gender dan perlindungan anak	a.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85
		b.	Rasio KDRT terhadap jumlah RT	Rasio	0,61
4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan	a.	Persentase Kepemilikan Identitas Penduduk	Persen	88,55
5	Peningkatan kualitas baku lingkungan hidup	a.	% penanganan sampah	Persen	100
		b.	Tingkat kualitas air sungai	BOD COD	3 mg/liter 25mg/liter
6	Penurunan tingkat kerentanan bencana	a.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	KK	16,44
		b.	Indeks resiko bencana	Indeks	130
E. Misi ke 5 : Melakukan Kerjasama Global untuk pembangunan Daerah					
1	Terlaksananya kemitraan antar daerah dengan lembaga Pemerintahan dan lembaga Non Departemen	a.	Σ Kerjasama Kementerian dan Non Departemen yang ditindaklanjuti	Lembaga	19
		b.	Σ Inisiasi Kerjasama Luar Negeri bernilai manfaat bagi pemerintah daerah	Kerjasama	5
2	Peningkatan kontribusi sektor swasta dan lembaga donor terhadap pembangunan daerah	a.	Pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN	Persen	75

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo 2018

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, yang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

memuat sasaran strategis dan indikator yang mengukur pencapaian indikator sasaran- sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator-indikator sasaran tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021.

Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Adapun revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
Misi Ke 1 : Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter					
1	Terpenuhinya Layanan Pendidikan Dasar berkualitas	1.	% pemenuhan 49able49tor SPM Pendidikan Dasar	60	%
		2.	Angka Rata-Rata lama sekolah	7,32	Tahun
		3.	% Sekolah Terakreditasi A	SD=126	Sekolah
		4.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,148	%
		5.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,076	%
		6.	Σ Siswa/Peserta Didik Berpretasi Nasional	20	Siswa
		7.	Angka Melek Huruf	99,72	%
2	Terpenuhinya Layanan Kesehatan berkualitas	8.	% pemenuhan 49able49tor SPM Kesehatan	78	%
3	Terbinanya tenaga kerja produktif	9.	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	63,53	%
4	Terbinanya wirausahawan mandiri	10.	Σ Wirausahawan Mandiri	781	Orang
5	Terbentuknya pemuda berprestasi	11.	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	5	Orang
6	Terbinanya seni	12.	Σ Jenis seni budaya 49able	1	Jenis



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

	budaya lokal		dilestarikan		
Misi Ke 2 : Memantapkan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis					
7	Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	13	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	18 – 21	Rasio
		14	Rasio Aktivitas	49,52	Rasio
		15	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	25 – 28	%
8	Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berintegritas	16	Nilai AKIP Kabupaten Gorontalo	62,50	Angka
		17	Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo	Sangat Tinggi	Nilai
9	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	18	Indeks Reformasi Birokrasi	60 – 70	Kategori B
Misi Ke 3 : Mengoptimalkan Sumber daya Alam Menuju Kemandirian					
10	Peningkatan Ekonomi Wilayah yang berkualitas	19	Pertumbuhan Ekonomi	7,82	%
		20	Pendapatan Perkapita	18.386,11	Rp
		21	Incremental Capital Output Ratio	0,15	%
		22	Inflasi (Y on Y)	3,8	%
		23	PDRB Perkapita	18.912,21	Rp
		24	Indeks Gini Ratio	0,41	Indeks
11	Peningkatan kemajuan dan perkembangan desa	25	Indeks Desa Membangun	0,6200	Indeks
12	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu	26	Nilai Tukar Petani	104	Indeks
13	Ketersediaan, keterjangkauan dan kelembagaan Pangan	27	Skor Pola Pangan Harapan	84	Skor
14	Revitalisasi Jalan, Jembatan dan Sungai	28	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi layak	759,21	Km
15	Ketersediaan sarana air bersih dan minum	29.	Σ KK yang tercakup oleh jaringan air bersih	5.290	Ka
16	Ketercapaian perumahan dan sanitasi yang baik	30.	Penurunan luasan kawasan kumuh	117	Ha



17	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Rencana Tata Ruang	31.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	39,41	%
		32.	Jumlah dokumen RDTR yang ditetapkan	1	Dokumen
Misi Ke 4 : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup					
18	Penurunan angka kemiskinan	33	% Penduduk miskin	18,76	%
		34	% APBD untuk penanggulangan kemiskinan	11,50	%
		35	Tingkat pengangguran terbuka	3,73	%
19	Pengendalian Penduduk	36	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	65,25	%
		37	Total Fertility Rate (TFR)	2,31	%
20	Pengarustamaan gender dan Perlindungan anak	38	Indeks Pembangunan Gender	82	Indeks
		39	Rasio KDRT terhadap Jumlah RT	0,61	%
21	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan	40	Persentase kepemilikan Identitas Penduduk	88,55	%
22	Peningkatan kualitas baku lingkungan hidup	41	% penanganan sampah	100	%
		42	Tingkat kualitas air sungai	3 mg/liter 25 mg/liter	BOD; COD
23	Penurunan tingkat kerentanan bencana	43	Presentase desa tangguh/siaga bencana	16,44	%
		44	Indeks resiko bencana	130	Indeks
Misi Ke 5 : Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah					
24	Terlaksananya Kemitraan antar daerah, dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen	45	Σ Kerja sama Kementerian dan Non Departemen yang ditindak lanjuti	19	Lembaga
		46	Σ Inisiasi Kerjasama Luar Negeri bernilai manfaat bagi pemerintah daerah	5	Kerjasama



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

25	Peningkatan kontribusi sector swasta dan lembaga donor terhadap pembangunan daerah	47	Pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN	75	%
----	--	----	--------------------------------------	----	---

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo 2018

Pencapaian target pada 52able52tor kinerja utama tentunya tak lepas dari pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di jajaran Pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang terkait secara langsung dengan pencapaian target RPJMD pada tahun 2018. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, terdapat 87 (Delapan) Program yang berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian 25 (Dua Puluh Lima) Sasaran Strategis dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Indikator yang telah ditetapkan, sebagaimana 52able di bawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Program dan Alokasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Pagu Anggaran (Rp)	SKPD Terkait
1	Terpenuhinya layanan pendidikan dasar berkualitas	6	15.856.886.451,00	Dinas Pendidikan
2	Terpenuhinya Layanan Kesehatan berkualitas	17	172.867.996.105,00	Dinas Kesehatan
3	Terbinanya tenaga kerja produktif	3	1.321.489.960,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Terbinanya wirausahawan mandiri	4	1.600.110.600,00	Dinas Koperasi
5	Terbentuknya Pemuda Berprestasi Nasional	2	4.469.814.227,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6	Terbinanya Seni Budaya Lokal	2	724,936,100,00	Dinas Pendidikan
7	Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang	1	13,224,490,000,00	Badan Keuangan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

	Berkualitas			
8	Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berintegritas	1	861,679,791,00	Badan Perencanaan
9	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1		Bagian Organisasi RB
10	Peningkatan Ekonomi Wilayah yang Berkualitas	1	347,927,400,00	Badan Perencanaan
11	Peningkatan kemajuan dan perkembangan desa	2	2,299,009,110,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
12	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu	12	16,422,393,944,00	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan
13	Ketersediaan, keterjangkauan dan kelembagaan pangan	1	3,183,742,675,00	Dinas Pertanian
14	Revitalisasi jalan, jembatan dan sungai	5	112,751,370,951,00	Dinas PU
15	Ketersediaan sarana air bersih dan minum	1	14,318,277,762,00	Dinas PU
16	Ketercapaian perumahan dan sanitasi yang baik	3	9,108,337,750,00	Dinas PU, Dinas Perumahan dan Pemukiman
17	Meningkatnya kuantitas dan kualitas rencana tata ruang	1	384,531,200,00	Dinas PU
18	Penurunan angka kemiskinan	8	7,476,010,762,00	Dinas Sosial, BPM Pemdes
19	Pengendalian Penduduk	1	5,906,407,246,00	Dinas PP dan KB
20	Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak	3	2,922,478,006,00	Dinas PP dan PA
21	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi kependudukan	1	1,574,027,630,00	Dinas Kependudukan dan Capil
22	Peningkatan kualitas baku lingkungan hidup	5	3,154,415,600,00	Dinas LH
23	Penurunan Tingkat Kerentanan Bencana	4	1,090,341,000,00	BPBD
24	Terlaksananya Kemitraan antar daerah dengan Lembaga Pemerintah dan	1	827,400,424,00	Sekretariat Daerah, Bag. Kerjasama Global



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

	Lembaga Non Departemen			
25	Peningkatan Kontribusi sector swasta dan lembaga donor terhadap pembangunan daerah	1	562,595,300,00	Dinas PTSP
TOTAL		86	393,256,669,994,00	

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo 2018



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018, serta kaitannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir masa berlakunya RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021.

Untuk mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target dengan menggunakan pijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Kinerja	Kriteria Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah



1. Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Evaluasi dan pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) sasaran dan 47 (empat puluh tujuh) indikator kinerja sasaran, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
			Satuan	Nilai		
A. MISI KE 1 : MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA CERDAS, SEHAT DAN BERKARAKTER						
1	Terpenuhinya Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas	1. % pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar	%	60	96,66	161,10
		2. Angka Rata-Rata lama sekolah	Tahun	7,32	9,6	131,14
		3. \sum Sekolah Terakreditasi A	Sekolah	126	130	103
		4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,148	0,26	185.71
		5. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,076	0,31	442
		6. \sum Siswa/Peserta Didik Berprestasi Nasional	Siswa	20	6	30
		7. Angka Melek Huruf	%	99.72	99,66	99,93
2	Terpenuhinya Layanan Kesehatan berkualitas	% pencapaian indikator SPM Kesehatan	%	78	72,90	10
3	Terbinanya tenaga kerja produktif	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	63,53	64,06	100,83



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

4	Terbinanya wirausahawan Mandiri	Σ Wirausahawan baru	Orang	781	150	70,57
5	Terbentuknya pemuda berprestasi	Σ Pemuda Berprestasi Nasional	Orang	5	8	160
6	Terbinanya seni budaya lokal	Σ Jenis seni budaya lokal dilestarikan	Jenis	1	35	350
B. MISI KE 2 : MEMANTAPKAN PEMERINTAHAN YANG HARMONIS, BERSIH DAN DINAMIS						
1	Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio	18 - 21	15,72	87,3
		2. Rasio Aktivitas	%	49,52	77,53	156,56
		3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	%	25 – 28	23,21	92,84
2	Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berintegritas	1. Nilai AKIP Kabupaten Gorontalo	Angka	62,50	64,74	103,58
		2. Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo	Nilai	Sangat tinggi (3,2000)	Sangat Tinggi (3,2980)	103,06
3	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,64 (kategori baik)	58,37	115,26 CC
C. MISI KE 3 : MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA ALAM MENUJU KEMANDIRIAN						
1	Peningkatan Ekonomi Wilayah yang berkualitas	1. Pertumbuhan Ekonomi		7,82	6,93	88,61
		2. Pendapatan Perkapita	Rupiah	18.912,21	19.852.446,29	104,97
		3. Incremental Capital Output Ratio	%	0,15	5,527	351
		4. Inflasi (Y on Y)	%	3,8	4,03	106,05
		4. PDRB Perkapita ADHK	Rupiah	18.912,21	20.784.168*	113,04
		6. Indeks Gini Ratio	Indeks	0,41	0,4163	101,5
2	Peningkatan kemajuan dan perkembangan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6200	0,587	94,67



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

3	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu	Nilai Tukar Petani	Ton/Tahun	104	104,03	100
4	Ketersediaan, keterjangkauan dan kelembagaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	84	81,4	96,9
5	Revitalisasi Jalan, jembatan dan sungai	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi layak	KM	759,21	828,78	109
6	Ketersediaan sarana air bersih dan minum	Σ KK yang tercakup oleh jaringan air bersih	KK	5.290	355	6
7	Ketercapaian perumahan dan sanitasi yang baik	Penurunan luasan kawasan kumuh	Ha	117	118,14	101
8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Rencana Tata Ruang	1. Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	39,41	22,37	82
		2. Jumlah dokumen RDTL	Dok.	1	0	0
D. MISI KE 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						
1	Penurunan angka kemiskinan	1. % Penduduk miskin	%	18,76	19,84	105,75
		2. % APBD untuk penanggulangan kemiskinan	%	11,50	84,4	73,39
		3. Tingkat pengangguran terbuka	%	3,73	3,27	87,66
2	Pengendalian Penduduk	1. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	65,25	80,33	123,11
		2. Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2,31	3,359	145,41
3	Pengarusutamaan gender dan Perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	85	52,73	62,03
		2. Rasio KDRT terhadap Jumlah RT	Rasio	0,61	0,43	70,49
4	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi kependudukan	Persentase kepemilikan Identitas Penduduk	%	88,55	96	08,4



5	Peningkatan kualitas baku lingkungan hidup	1. % penanganan sampah	%	100	60,48	60,48
		2. Tingkat Kualitas Air Sungai	BOD;COD	BOD ≤ 3 mg/liter COD ≤ 25 mg/liter	BOD ≤ 3 mg/liter COD ≤ 25 mg/liter	100
6	Penurunan tingkat kerentanan bencana	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	16,44	10,53	64,05
		2. Indeks resiko bencana	Indeks	130	146,4	112,61
E. MISI KE 5 : MELAKUKAN KERJASAMA GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH						
1	Telaksananya Kemitraan antar daerah, dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen	1. Σ Kerja sama Kementerian dan Non Departemen yang ditindak lanjuti	Lembaga	19	34	178,95
		2. Σ Inisiasi Kerjasama Luar Negeri bernilai manfaat bagi pemerintah daerah	Kerja sama	5	2	40
2	Peningkatan kontribusi sektor swasta dan lembaga donor terhadap pembangunan daerah	Pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN	%	75	61,65	82,2

2. Analisis Capaian Kinerja

MISI 1 : Menciptakan Sumber daya Manusia Sehat Cerdas dan Berkarakter

Sasaran – 1 : Pemenuhan Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilaksanakan pada Kabupaten Gorontalo dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati Gorontalo yakni Menciptakan Sumber Daya Manusia Sehat, Cerdas dan Berkarakter.



Dalam konteks menciptakan sumber daya manusia sehat, cerdas dan berakarakter perlu disasar melalui layanan pendidikan dasar. Namun tidak sekedar menyelenggarakan layanan pendidikannya, akan tetapi fokus pada aspek kualitas layanan. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar telah berlangsung lama, tetapi belum tentu dapat menjamin terciptanya generasi cerdas apalagi berakarakter. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengarahkan pemenuhan layanan pada titik tekan kualitas penyelenggaraan.

Capaian indikator sasaran pemenuhan layanan pendidikan dasar berkualitas berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2018 secara agregate rata-rata capaiannya adalah 164,71% sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran Misi I Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Capaian Kinerja Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	% Pemenuhan indikator SPM pendidikan dasar	Persen	58,5	60	96,66	161,10
2.	Angka rata – rata lama sekolah	Tahun	6,9	7,32	9,6	131,14
3.	Σ Sekolah terakreditasi A	Persen	151	126	130	103
4.	Angka putus sekolah SD/MI	Persen	0,18	0,14	0,26	185.71
5.	Angka putus sekolah SMP/MTs	Persen	0,11	0,07	0,31	442
6.	Σ Siswa/Peserta Didik Berprestasi Nasional	Siswa	14	20	6	30
7.	Angka Melek Huruf	%	99,81	99,67	99,70	100,03
Rata-Rata Capaian Kinerja						164.71

Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Kab. Gorontalo, 2019



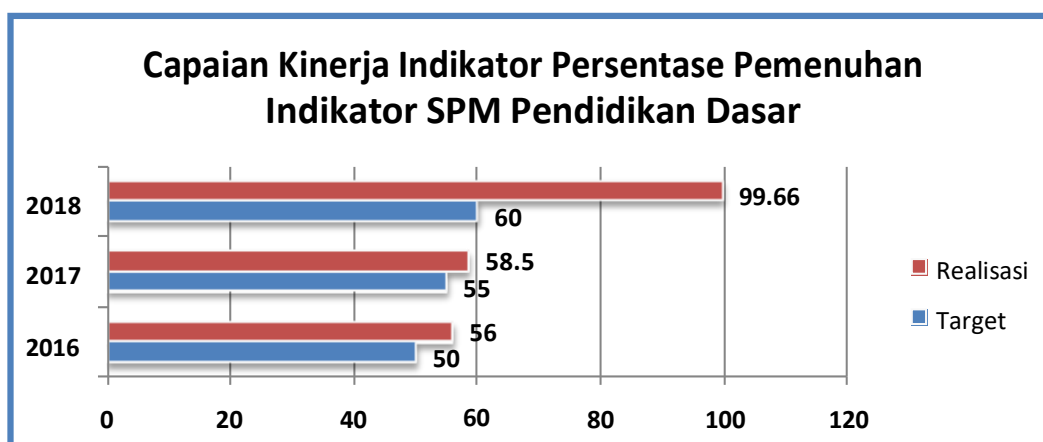
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan dan tanggungjawab kabupaten/kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengembangan kapasitas dalam mencapai SPM. Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan.

Ketentuan pasal 2 Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten adalah berkaitan dengan akses, kenyamanan belajar siswa, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan serta pengawas sekolah. Sedangkan kewenangan tingkat satuan pendidikan mencakup 13 item yang terdiri dari ; ketersediaan buku, alat laboratorium, kurikulum dan kelder akademik, jam mengajar guru, supervisi kepala sekolah, dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

Pencapaian persentase pemenuhan indikator SPM pendidikan dasar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1



Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Kab. Gorontalo, 2019

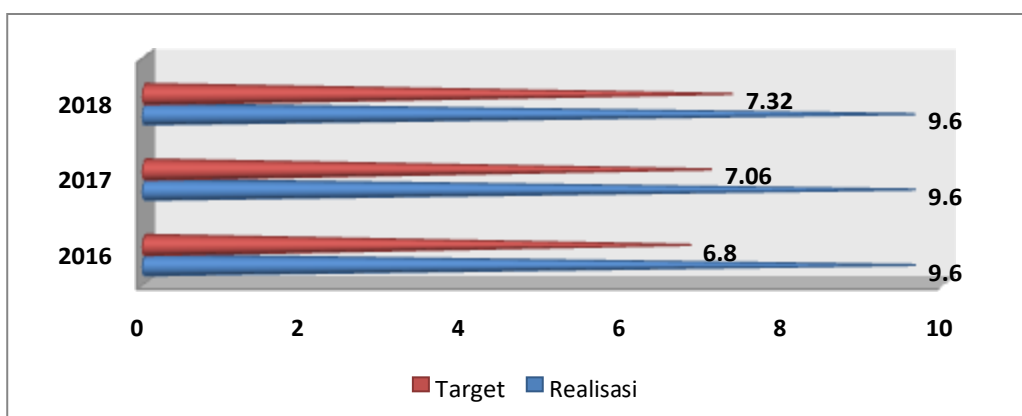


Pada Tahun 2018, pencapaian pemenuhan indikator SPM Pendidikan Dasar sebesar 99,66% dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen, dengan demikian capaian kinerja indikator tersebut sebesar 161,10%. Prestasi ini tidak terlepas dari diberlakukannya *Full Day School* di seluruh sekolah se-Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2017. *Full Day School*, secara nyata telah berhasil meningkatkan jumlah jam mengajar guru, dan jam efektif guru/kepala sekolah di sekolah.

Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, karena asumsi yang dibangun adalah dengan melalui sekolah, maka masyarakat akan meningkat pengetahuan, keterampilan dan kecakapannya. Indikator Sasaran “Angka Rata – Rata Lama Sekolah” capaian kinerjanya telah mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 3.2
Capaian Kinerja Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Kab. Gorontalo, 2019

Capaian indikator tersebut disebabkan oleh adanya kesadaran orang tua wali siswa agar anaknya dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Kesadaran ini merupakan output kinerja Dinas dalam mensosialisasikan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun.



Rata – rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak Tahun 2013, perhitungan rata– rata lama sekolah mengalami perubahan sedikit penyesuaian yaitu terkait penetapan batas usia penduduk yang diamati dari sebelumnya 15 tahun dinaikan menjadi 25 tahun.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggiatkan penerapan Program Wajib Belajar 9 Tahun, dimana program ini memberikan kesempatan seluas– luasnya kepada anak untuk mengikuti pendidikan dasar yang difasilitasi oleh pemerintah. Selain dukungan Program Wajib Belajar 9 Tahun, pencapaian indikator rata– rata lama sekolah juga didukung melalui program nasional berupa Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM).

Memotret angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gorontalo di antara Kabupaten Kota Lain di Propinsi Gorontalo untuk tahun 2014 - 2017, nampak bahwa posisi Kabupaten Gorontalo berada di urutan ke 3 dibandingkan tahun lalu pada urutan ke 4. Berikut tabel perbandingan rata-rata lama sekolah antar Kabupaten kota se Propinsi Gorontalo.

Tabel 3.4
Rata-Rata Lama Sekolah

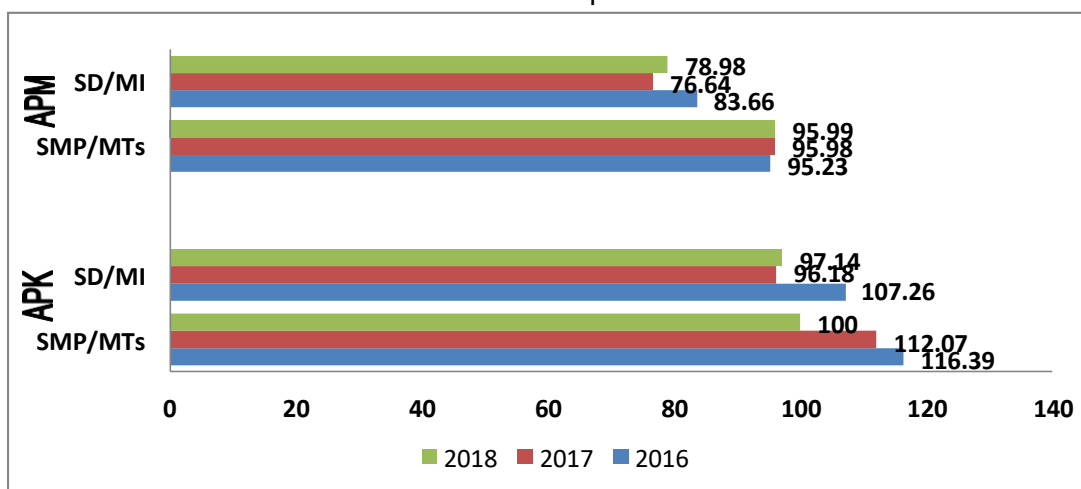
Provinsi	Mean Years Scholling (Year)			
	2014	2015	2016	2017
Kab. Boalemo	6.15	6.23	6.3	6.38
Kab. Gorontalo	6.97	6.63	6.64	6.81
Kab. Pohuwato	6.54	6.62	6.67	6.84
Kab. Bone Bolango	7.7	7.73	7.81	7.84
Kab. Gorontalo Utara	6.59	6.61	6.62	6.68
Kota Gorontalo	10.28	10.29	10.3	10.32
Gorontalo	6.97	7.05	7.12	7.28

Sumber : IPM Badan Pusat Statistik, 2017



Rerata lama sekolah dibentuk oleh partisipasi masyarakat pada setiap jenjang Pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah pada semua level Pendidikan mulai pada jenjang PAUD hingga S3, maka akan meningkatkan rerata lama sekolah. Dengan demikian ada linieritas antara angka partisipasi kasar dan murni dengan rerata lama sekolah.

Grafik 3.3
APK dan APM Kabupaten Gorontalo



Sumber : Badan Perencanaan, 2019

Capaian APK dan APM untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan dari tahun 2017. Capaian ini dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya ; (1) makin meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, tersedianya dana BOS dari Pemerintah Pusat dan dana penyelenggaraan Sekolah Dasar bersumber APBD Pemerintah Kabupaten Gorontalo; (2) Adanya bantuan bagi siswa berupa BSM yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin; (3) dan terdapat siswa dari luar Kabupaten Gorontalo yang bersekolah di Kabupaten Gorontalo.

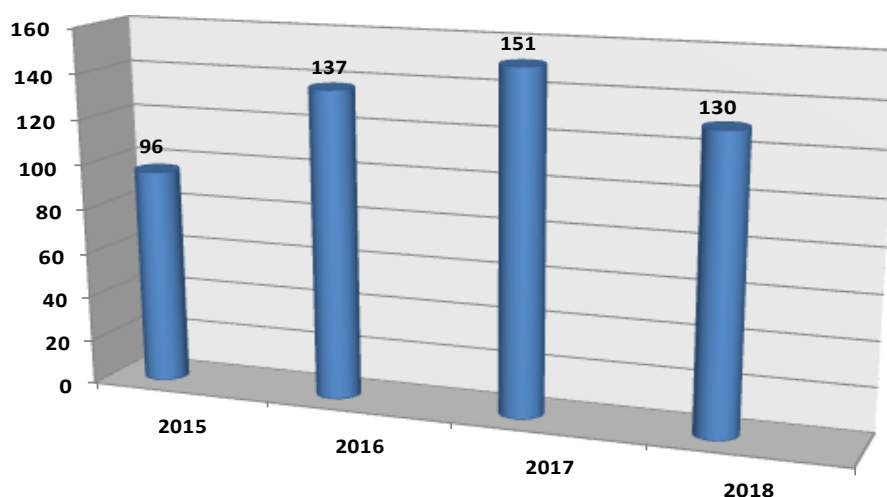


Jumlah Sekolah Terakreditasi A

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan upaya pemerintah dalam melakukan standarisasi lembaga pendidikan sebagai garansi atas kualitas yang ditawarkan bagi pelayanan publik. Dengan demikian, kehadiran sekolah terakreditasi merupakan salah satu tolok ukur kualitas pendidikan di suatu daerah.

Jumlah sekolah terakreditasi di Kabupaten Gorontalo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari data yang ada bahwa sejak tahun 2015 – 2018 sekolah yang terakreditasi A yaitu sebanyak 130 dari dari jumlah yang ditargetkan sebesar 126 sekolah atau mencapai 103%. Hal ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah melalui peningkatan alokasi anggaran bagi dunia pendidikan.

Grafik 3.4
Jumlah Sekolah Terakreditasi A di Kab Gorontalo



Sumber: Dinas Dikbud, 2018

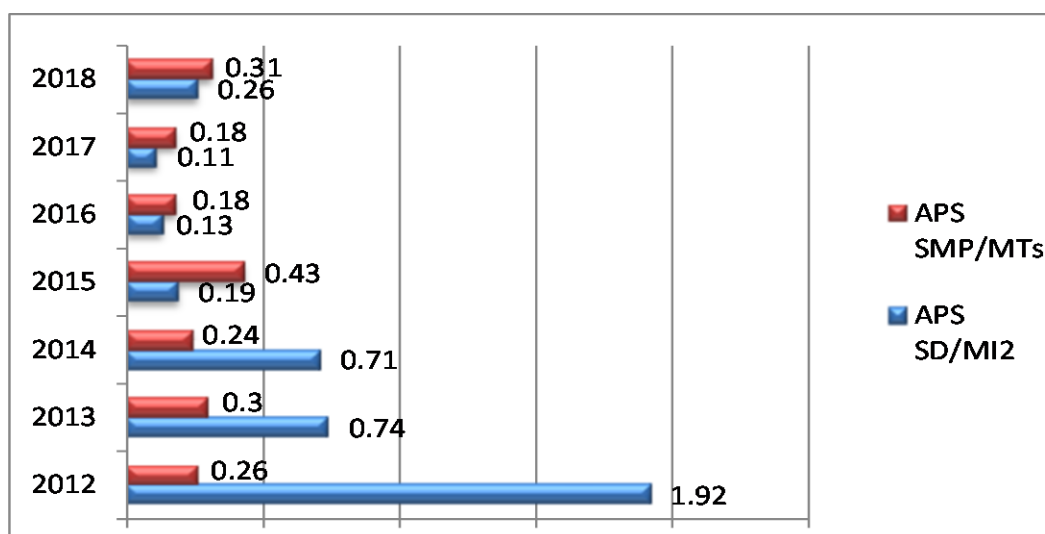
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI sedikit mengalami kenaikan dimana tahun 2017 berada di angka 0,18 dan pada tahun 2018



berada diangka 0,26 dengan tingkat realisasi capaian sebesar 185,71%. Hal menunjukkan masih perlunya upaya pemerintah kabupaten gorontalo dalam menekan putus sekolah ditingkat SD/MI. Hal yang sama juga terjadi untuk tingkat SMP/MTs dengan tingkat capaian pada tahun 2017 sebesar 100%.

Grafik 3.5
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs



Sumber: Dinas Dikbud Kab Gorontalo, 2019

Akses pendidikan dalam hal ini infrastruktur Pendidikan yang terbangun, setiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah SD/MI negeri maupun swasta di adalah 333 unit. Sedangkan jumlah SMP/MTs negeri maupun swasta sebanyak 150 unit, TK sejumlah 286 sekolah negeri dan swasta, sedangkan untuk SLB sudah berada dibawah naungan pemerintah provinsi namun data yang ada masih berjumlah 76 buah. Di Kabupaten Gorontalo terdapat 3 perguruan tinggi, terdiri atas universitas 2 buah dan Institut 1 buah. Dengan infrastruktur pendidikan sebagaimana di atas, maka diharapkan masyarakat memiliki akses Pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi.

Akses Pendidikan yang inklusif memberi ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan strata Pendidikan sehingga dapat mendorong angka rerata lama sekolah. Akses yang inklusif juga nampak pada bantuan operasional sekolah yang berasal dari BOS Nasional, Bantuan



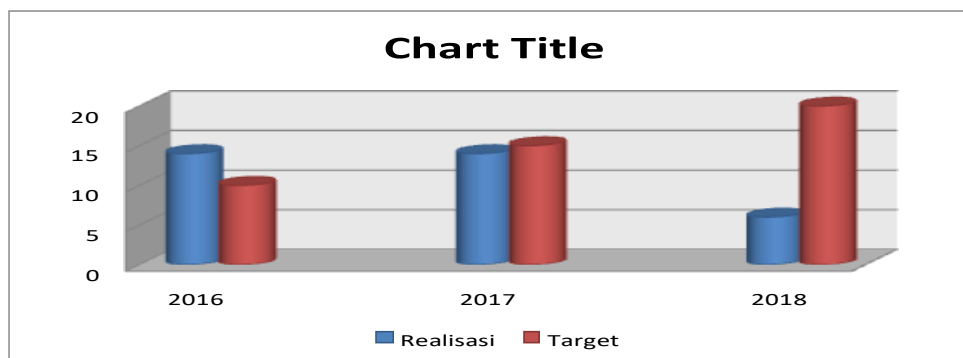
pembangunan sarana prasarana, Penyediaan beasiswa prestasi, Penyelenggaraan Paket B setara SMP/ MTs, Pengembangan mutu SMP. Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, Paket C sebenarnya membantu anak-anak usia sekolah ataupun warga masyarakat yang putus sekolah sebelum tamat, dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang pendidikannya, bahkan dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

Jumlah Siswa/Peserta Didik Berprestasi Nasional

Upaya nyata yang dilaksanakan oleh seluruh elemen pendidikan di Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Usaha untuk meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut antara lain dengan: penataran guru, program penyetaraan (sesuai dengan jenjang pendidikan), penyediaan buku pegangan bagi siswa, mengikutsertakan siswa-siswa di semua jenjang pendidikan dalam berbagai perlombaan seperti OSN, O2SN, FLS2N dan perlombaan-perlombaaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional. Dengan prestasi dimiliki, siswa akan menjadi calon pemimpin masa depan sebagaimana yang diharapkan bahwa Indonesia akan menjadi bangsa besar dunia dimana para siswa akan berada dalam titik kulminasi negara Indonesia sebagai negara maju.

Peningkatan prestasi dunia pendidikan harus menjadi semangat bersama pada seluruh elemen di Kabupaten Gorontalo, semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam mendorong penciptaan prestasi tersebut.

Grafik 3.6
Perbandingan Capaian Jumlah Siswa Berprestasi Nasional



Sumber: Dinas Dikbud, 2019



Capaian realisasi jumlah siswa yang memiliki prestasi tingkat nasional pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni dari target yang ditetapkan sebesar 20 peserta didik dan yang terealisasi hanya sebesar 6 peserta didik di tahun 2018. Menurunnya target kinerja ini terjadi karena pemberlakuan *full day school* yang masih relatif memenuhi target kuantitas jam pelajaran yang dipadatkan tetapi belum diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan.

Angka Melek Huruf

Di Indonesia masih 3.4 juta orang atau 2.07% orang yang buta aksara, dan masih terdapat 11 provinsi yang berada di atas rata-rata angka nasional. Data menunjukkan bahwa eksistensi pemerintah kabupaten gorontalo dalam menurunkan buta huruf memberi kontribusi yang sangat besar bagi keberlangsungan di dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Gorontalo masuk dalam 23 provinsi yang dibawah rata-rata nasional angka buta aksara.

Angka melek huruf juga merupakan salah satu komponen penyusun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dari dimensi pendidikan. Semakin tinggi angka melek huruf penduduk di suatu wilayah maka mendorong capaian IPM daerah. Indikator ini bertujuan mengukur proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab atau huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji dan lainnya) terhadap seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas. Grafik di bawah menggambarkan nilai angka melek huruf Kabupaten Gorontalo selama tahun 2016 - 2018.



Gambar 3.7
Angka Melek Huruf Kab. Gorontalo



Sumber : Dinas Dikbud, 2019

Selama tahun 2016 dan 2017 angka melek huruf di Kabupaten Gorontalo nilainya mengalami kenaikan, capaian realisasi angka melek huruf pada tahun 2018 adalah 99.66 persen sedangkan yang ditargetkan adalah 99.72 atau hanya 99.93%.

Untuk meningkatkan angka melek huruf, pemerintah kabupaten gorontalo khususnya para pemangku kepentingan memprioritaskan program dan kegiatan dibidang pendidikan melalui perluasan dan peningkatan pendidikan non formal. Kegiatannya, berbentuk Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pengembangan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; Program Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; dan Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan mencakup kegiatan Rintisan PKBM dan PAUD Unggulan. PKBM yang berkembang di Kabupaten Gorontalo berjumlah 37 PKBM, sementara PAUD berjumlah 177 buah.

Hambatan dalam mencapai sasaran ini, orang yang tidak bisa baca tulis umumnya masalah usia yang makin lanjut, sehingga dari tinjauan animo umumnya mereka kesulitan mengikuti Kejar Paket A dan C.

Sasaran Ke – 2 : *Terpenuhinya Layanan Kesehatan Berkualitas*

Pemenuhan layanan kesehatan merupakan salah satu *basic need* yang harus tersedia dan disediakan oleh pemerintah dari kota hingga



pelosok desa. Ketersediaannya bukan hanya dari aspek kuantitas, tetapi yang juga harus diperhatikan dan di kedepankan adalah aspek kualitas pelayanan. Kemajuan teknologi membuat masyarakat akan lebih mudah membandingkan kualitas layanan kesehatan antara satu daerah dengan daerah lain atau antara institusi kesehatan yang satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui kualitas pelayanan ini digunakan pendekatan indikator SPM kesehatan.

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran Terpenuhinya Layanan Kesehatan Yang Berkualitas

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Capaian Kinerja Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	% Pemenuhan indikator SPM Kesehatan	Persen	70	78	72,90	93,46
Capaian kinerja sasaran						93,46

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo, 2019

Pencapaian indikator SPM kesehatan Kabupaten Gorontalo sangat signifikan selama tahun 2017 dan 2018. Dengan capaian diatas target RPJMD memberikan indikasi bahwa pelayanan kesehatan mengalami peningkatan kuantitas dan kualitas dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari capaian 9 indikator pendukung sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Pencapaian Indikator Pendukung Layanan Kesehatan Berkualitas
Kabupaten Gorontalo

No	Indikator	2017			2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	% pemenuhan indikator SPM Rumah Sakit	60	70	87.97	78	96	123
2	Cakupan Balita Gizi Buruk	1.1	0.3	366.67	1.05	0.9	85,71
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	97	98.3	101.34	98	99.3	101



4	Prevalensi Stunting Pada Anak di Bawah 2 Tahun	35.68	24.8	130	33.2	189.6	571
5	Angka Kematian Bayi	10.6	7.2	132	10.4	4.2	40,38
6	Angka Kematian Ibu	278	141	149	268	98.4	331,3
7	Prevalensi TB Paru	135	135	100	100	106	106
8	Prevalensi HIV/AIDS	0.5	0.5	100	100	19.22	19,22
9	Insiden malaria	<1	0.02	197	<1	0.1	186
Capaian Rata - Rata		151,55			173,73		

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Gorontalo, 2018

Persentase Pemenuhan Indikator SPM Rumah Sakit

Pencapaian indikator SPM rumah sakit meskipun belum memenuhi target RPJMD tetapi ikut berperan dalam pencapaian indikator SPM Kesehatan. Hal ini didukung dengan prestasi RSUD M.M. Dunda Limboto memperoleh akreditasi A (Paripurna).

Cakupan Balita Gizi Buruk

Ukuran gizi masyarakat dapat dilihat dari perkembangan gizi balita. Prevelensi gizi buruk balita tahun 2018 sebesar 0.9%, dimana status gizi buruk balita di kabupaten gorontalo mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2017 cakupan gizi buruk balita dikabupaten gorontalo sebesar 0.3% dan mengalami penurunan 0,6% pada tahun 2018. Penurunan persentase ini merupakan hasil dari upaya proaktif pemerintah daerah dalam pencapaian indikator tersebut yaitu Pembentukan Pos Gizi, Pelaksanaan pusat rehabilitasi dan pemulihan Gizi dan Pemantauan Status Gizi (PSG) serta peran sektor terkait dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Sistem yang menjamin masyarakat miskin di era sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari fenomena masyarakat miskin Indonesia masih banyak yang bergantung kepada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hasil capaian indikator Cakupan Kepesertaan



Jaminan Kesehatan pada tahun 2016 sebesar 97,58% selanjutnya meningkat menjadi 98,3% ditahun 2017. Untuk tahun 2018 penduduk kabupaten gorontalo yang terdaftar sebagai peserta JKN adalah sebanyak 393.401 jiwa dengan rincian peserta Jamkesmas sebanyak 243.104 jiwa, peserta Jamkesta sebanyak 48.777 jiwa dan peserta Jamkesda 34.222 jiwa dengan capaian indikator sebesar 99,3% dari target yang ditetapkan sebesar 98% atau 101% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Prevalensi Stunting pada Anak di Bawah 2 Tahun

Pada kondisi awal tahun 2015 prvelensi stunting sebesar 40,8% pada tahun 2016 capaiannya sebesar 12%, dan pada tahun 2017 sebesar 24,8%. Sedangkan untuk tahun 2018 capaian indikator ini mencapai 3,4% terpaut jauh dari target yang ditetapkan sebesar 33,12% dengan kriteria **Sangat Baik** (189%). Indikator ini merupakan ukuran pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat yang sifatnya jangka panjang dan merupakan masalah nasional karena berhubungan dengan tumbuh kembang anak akibat kurangnya supply gizi selama masa kehamilan dan pasca melahirkan.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Indikator Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gorontalo dalam 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun AKB 2016 sebesar 13,32 /1000 KH dibanding tahun 2017 sebesar 10,06/1000 KH, dan pada tahun 2018 ini AKB dikabupaten gorontalo mencapai 4,2/1000 KH yang artinya angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 10,4/1000 KH dengan criteria **Sangat Baik**. Jumlah kematian bayi terdiri dari 21 kasus kematian neonatal usia 0 – 28 hari dan 9 kasus kematian bayi usia 1 – 11 bulan. Peran kader posyandu yang senantiasa memberikan pelayanan imunisasi dan pos gizi merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan capaian indikator ini.



Angka Kematian Ibu (AKI)

Gambaran Kematian Ibu di Kabupaten Gorontalo tahun 2018 sebesar 9 kasus kematian atau sebesar 98,4/100.000 LH dan terjadi penurunan dibanding tahun 2016 sebesar 257/100.000 LH dan tahun 2017 sebesar 141/100.000 LH dengan kriteria **Sangat Baik**. Pencapaian AKI ini telah melampaui target RPJMD yakni 250/100.000 LH dan RPJMN sebesar 306/100.000 LH. Intensifnya pelaksanaan posyandu hingga pelosok desa bukan hanya menekan AKB tetapi juga berpengaruh sangat signifikan dalam menekan AKI. Pemantauan kesehatan ibu hamil di posyandu tidak sebatas menunggu mereka, tetapi lebih proaktif melalui kegiatan *home visit*/kunjungan rumah dalam program pekan sayang ibu anak (PSIA), peningkatan kegiatan pendampingan Ibu bersalin melalui Gugus Tugas (G-Gas) dan pembentukan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) melalui program Jampersal.

Prevalensi TB Paru

Secara kuantitatif, tingkat capaian angka prevalensi TB Paru dari 2016 sampai dengan 2018 adalah konstan sesuai target. Namun secara kuantitatif telah terjadi penurunan sebesar 29 point dari 135/100.000 penduduk pada tahun 2017 menjadi 106/100.000 pada tahun 2018. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan layanan kesehatan sehingga terjadi pula peningkatan penemuan dini kasus TB Paru melalui pemeriksaan kontak dan pengobatan teratur. Selain itu pemahaman masyarakat akan TB Paru semakin luas sehingga dapat mengubah pola hidup dari hal – hal yang dapat memicu penyakit tersebut.

Prevalensi HIV/AIDS

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 dari 9032 orang yang beresiko terinfeksi HIV, yang mendapatkan pelayanan sebesar 1736 orang atau hanya sebesar 19,22% dari target 100%. Capaian indikator ini masih sangat rendah karena prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Gorontalo



masih berada di kisaran 0,001% per penduduk beresiko (46 kasus) dari standar batas tertinggi nasional yakni <0,5%. Hal ini bukan berarti tidak adanya perhatian terhadap penanganan HIV/AIDS. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV antara lain : pemetaan kelompok sasaran, promosi/penyuluhan, sosialisasi, dan pemeriksaan HIV. Namun dari berbagai upaya – upaya tersebut yang paling utama adalah upaya pencegahan.

Insiden Malaria

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu bayi, anak balita, dan ibu hamil. Di Kabupaten Gorontalo kasus malaria cenderung menurun, berdasarkan data tahun 2018 sebesar 0,1/1000 penduduk atau 186% dengan kriteria **Sangat Baik** dibandingkan tahun 2016 tingkat capaian terhadap insiden malaria hanya 5,51% dan tahun 2017 yang terealisasi adalah 0.02/1000 penduduk. Kondisi ini merupakan keberhasilan upaya pencegahan melalui program kulambunisasi, dan upaya penanggulangan dengan penyemprotan serta larvasida dan upaya-upaya monitoring terhadap daerah-daerah endemis. Pendukung lainnya adalah menggiatkan peran petugas kesehatan desa dan PPKBD/Sub PPKBD dalam sosialisasi dan pembiasaan hidup sehat melalui PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Sasaran Ke – 3 : Terbinanya Tenaga Kerja Produktif

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu masalah fundamental ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk Kabupaten Gorontalo. Di satu sisi kemajuan teknologi dan informasi tidak dapat dibendung dan menuntut skill untuk dapat berkompetisi di dalamnya. Untuk memediasinya maka pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja produktif.



Tabel 3.7
Pencapaian Sasaran Terbinanya Tenaga Kerja Produktif

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Capaian Kinerja Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	63,32	63,53	68,40	107,66
Capaian kinerja sasaran						107,66

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019

Hasil dari pembinaan tenaga kerja produktif di Kabupaten Gorontalo tahun 2018 mampu menaikkan 5,8 point TPAK dari tahun 2017. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan/kesempatan kerja di Kabupaten Gorontalo. Untuk itu pemerintah harus memberikan alternative lapangan kerja melalui pusat – pusat pertumbuhan baru yang potensial di Kabupaten Gorontalo sehingga masyarakat tidak harus mencari pekerjaan di wilayah lain terutama wilayah Kota Gorontalo.

Sasaran Ke – 4 : Terbinanya Wirausahawan Muda Mandiri

Mengajak masyarakat berwirausaha merupakan salah satu trik untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan selanjutnya mengurangi pengangguran. Hal ini ditempuh karena adanya keterbatasan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakatlah yang dirangkul untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan jika dimungkinkan juga untuk orang lain.

Tabel 3.8
Pencapaian Sasaran Terbinanya Wirausahawan Mandiri

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Capaian Kinerja Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Jumlah wirausahawan baru	Orang	410	781	150	19,21
Capaian kinerja sasaran						19,21

Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Gor 2019



Peran pemerintah dalam menciptakan tumbuhnya Wirausaha Muda Mandiri bukan hanya dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata, akan tetapi juga diprogramkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun 2018, Dinas Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata belum menganggarkan program ini sedangkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menciptakan sebanyak 150 orang Wirausahawan Muda Mandiri atau sebesar 19,21% dari target RPJMD.

Meskipun capaian realisasi kinerja masih dibawah 80%, tetapi progress peningkatan jumlah wirausahawan baru di tahun 2017 naik 173% dibanding tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa stimulan pemerintah untuk merangsang masyarakat berwirausaha cukup mendapat respon positif. Kedepannya yang dibutuhkan adalah pembinaan dan pendampingan yang intensif agar masyarakat konsen dalam usahanya sehingga dapat meningkatkan income keluarga, juga dapat lebih berkembang sehingga dapat mereduksi jumlah pengangguran.

Sasaran Ke – 5 : *Terbentuknya Pemuda Berprestasi*



Penyiapan pemuda sebagai penerus penggerak pembangunan harus dilakukan sejak dini. Keseimbangan perkembangan fisik dan mental merupakan modal pembentukan pribadi dan jati diri pemuda. Untuk itu pemerintah

senantiasa memberikan fasilitasi dan peluang bagi pemuda dalam mengembangkan diri dan berkompetisi menjadi yang terbaik.

Sasaran terbentuknya pemuda berprestasi di Kabupaten Gorontalo diukur dari banyaknya pemuda berprestasi nasional yang pencapaiannya sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.9
Pencapaian Sasaran Terbentuknya Pemuda Berprestasi

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Capaian Kinerja Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Jumlah Pemuda Berprestasi Nasional	Orang	8	5	8	160
Capaian kinerja sasaran						160

Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Gor 2019

Tingkat capaian sasaran indikator selama 2 tahun terakhir senantiasa melampaui target RPJMD. Kedelapan pemuda berprestasi tersebut terdiri dari 1 orang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara (KPN), 3 orang mengikuti Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), 4 orang pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Keseluruhan kegiatan yang mereka ikuti pada tahun 2018 dapat dibagi dalam 3 event, yaitu:

- Event Pemuda Antar Negara (KPN),
- Event Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan,
- Event Jambore Pemuda Indonesia (JPI)



pada asian games di Palembang.

Selain pencapaian tersebut, Kabupaten Gorontalo juga menorehkan prestasi internasional pada ajang Asian Games tahun 2018. Melalui cabang sepak takraw, 3 orang atlet dari Kabupaten Gorontalo berkontribusi bagi Indonesia menyapu bersih medali emas



Sasaran Ke – 6 : Terbinanya Seni Budaya Lokal

Keberlanjutan dan kelestarian budaya nasional diawali dari pembinaan dan pelestarian seni budaya lokal agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu dari daerah adat di Indonesia senantiasa konsen dalam menghidupkan kembali marwah nilai – nilai budaya lokal yang dimiliki. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sanggar seni budaya yang senantiasa meningkat. Pada tahun 2015 sanggar seni budaya berjumlah 20 jenis, tahun 2016 sebanyak 25 jenis dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 35 jenis, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pencapaian Sasaran Terbinanya Seni Budaya Lokal

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Capaian Kinerja Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Jumlah Jenis Budaya Lokal yang dilestarikan	Jenis	35	1	35	3500
Capaian kinerja sasaran						3500

Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Kab. Gorontalo, 2019

Tabel 3.11
Sanggar Budaya Jenis Budaya Lokal

1. Sanggar Budi Utomo (Janger),	18. Limututu (Kolokoo, Polopalo,
2. Sri Rejeki (Kuda Lumping),	Saronde), Bulalo (Gambus, Dana-
3. Tirta Kencono (Kuda Lumping),	dana),
4. Warga Budaya 1 (Kuda Lumping),	19. Bulalo (Gambus, Dana-dana)
5. Warga Budaya 2 (Janger),	20. Nurul Yakin (Kasidah, Wunungo,
6. Esa Genang (Salawat Jowo Hadra,	Debe),
Zamra),	21. Al-Ikhsan (Turunani, Zikir),
7. Puspa Kencana (Salawat Jowo	22. Iloheluma (Gambus, Marwas),
Hadra, Zamra),	23. Iloheluma (Zamra, Zikir),
8. Al-Muttaqia (Salawat Jowo Hadra,	24. Pondok Karawo (Kerawang),
Zamra),	25. Al-Munawar (Hadra, Salawat Jowo),
9. Walipuneto Hulontalo (Saronde,	26. Al-Mubarak (Hadra, Danes),
Tulunani, Buruda, Dikili, Tidi),	27. Nhizhiva (Pelaksana Adat Perkawinan,
10. Bongkartiu (Zamra, Polopalo, Tari	Tari, Teater),
Daerah),	28. Jabal Rahma (Pelaksana Adat
11. Bandung Rejo (Hadra),	Perkawinan, Tari, Buruda, Turunani),
12. Reog Ponorogo (Reog Ponorogo),	29. Hunginaa (Tari, Teater),



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

13. Tunas Baru (Pencak Silat), 14. Kuda Kepang (Kuda Lumping), 15. Gorontalo (Turunani, Buruda, Dana-dana), 16. Hunggaluwa (Marwas, Turunani, Buruda, Dikili, Dana-dana Debe, Yasin Fadilah) 17. Tinelo (Teater, Drama, Tari Modern)	30. Woliponelo (tari, Musik Etnik), 31. Alberki (Dana-dana, Pantun), 32. Molotulo (Tari Tradisional), 33. Mopootota (Seni Pertunjukan Rakyat), 34. Motilango (Tari Tradisional, Musik Etnik), 35. Tupalo (Musik Etnik dan Tari Tradisional)
--	--

Sumber: Dinas Dikbud, 2019

Dengan melakukan pembinaan terhadap sanggar seni budaya tersebut diharapkan dapat memperkaya khasanah budaya lokal sehingga dapat menjadi daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut merupakan indikator dari terbinanya seni budaya lokal sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12
Pencapaian Sasaran Terbinanya Seni Budaya Lokal

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Capaian Kinerja Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kunjungan	189,01	200,84	200,04	99,59
Rata - Rata Capaian		%	189,01	99,59		

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Gorontalo 2019

Dari tabel di atas, bahwa capaian jumlah kunjungan wisata sudah bisa dikatakan memenuhi target RPJMD, tetapi pemerintah daerah masih mempunyai tugas berat untuk dapat meningkatkan jumlahnya. Peningkatan perhatian terhadap budaya lokal belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi ketertarikan wisatawan. Berbagai festival budaya yang dilaksanakan seperti Festival Danau Limboto harus lebih menampilkan pertunjukan dan atraksi yang lebih bernilai jual tinggi untuk bisa menarik wisatawan berkunjung ke kabupaten gorontalo.



MISI 2 : Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis

Misi ke 2 RPJMD mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga, serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Dalam rangka pencapaian misi tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja daerah, sebagai berikut :

Sasaran Ke – 1 : Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas

Ketercapaian sasaran strategis terselenggaranya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas didukung melalui pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, yakni : (1) rasio kemandirian keuangan daerah; (2) rasio aktifitas; dan (3) rasio belanja modal terhadap total belanja daerah. Berikut ini, capaian indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis terselenggaranya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, sebagaimana berikut :

Tabel 3.13
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas
Tahun 2017 - 2018

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	15	17,92	118,77	18	15,72	87,33



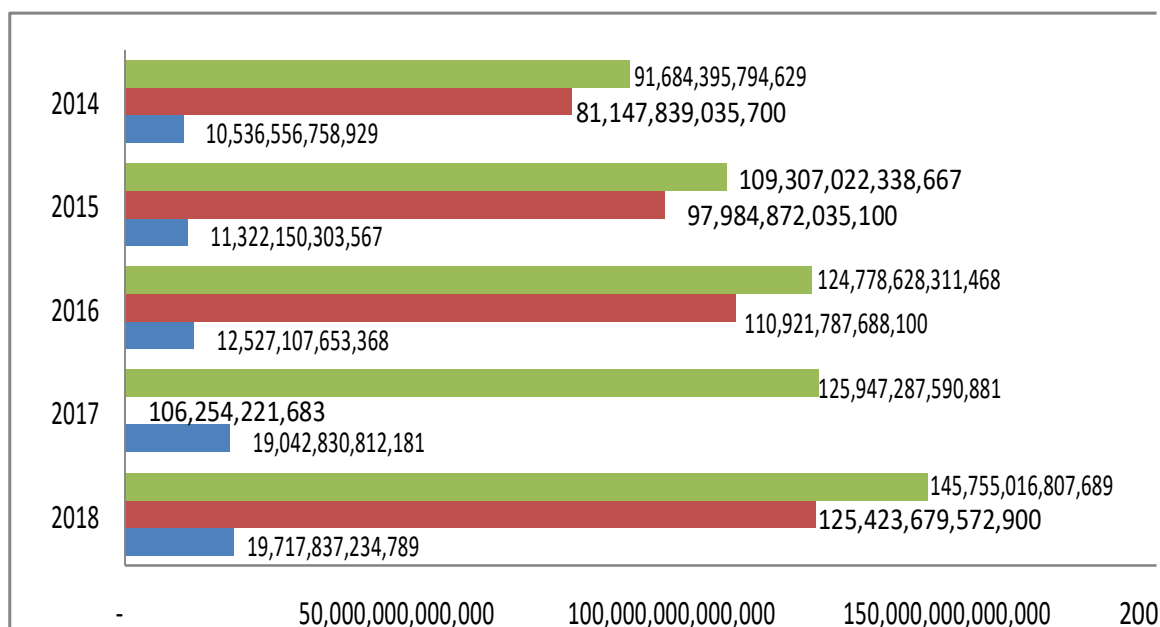
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

2	Rasio Aktifitas (Rasio Belanja Pembangunan Terhadap Total APBD)	Persen	45,48	43,11	94,79	49,52	77,53	156,56
3	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	Persen	22	12,36	56,18	25	23,21	92.88

Sumber : Badan Keuangan, 2018

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2018 sebesar 15,72 turun 2,2 point dibandingkan dengan capaian rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2017 yang mencapai 17,92 persen. Penurunan capaian kinerja angka rasio ini disebabkan oleh besarnya realisasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. realisasi capaian indikator kinerja rasio kemandirian keuangan daerah dilihat pada gambar 3.8, dijelaskan bahwa adanya peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi penerimaan transfer sehingga meningkatnya realisasi pendapatan APD, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Grafik 3.8
Realisasi Penerimaan PAD Terhadap Penerimaan Transfer dan Pinjaman dan Total Pendapatan APBD Tahun 2014 – 2018



Sumber : Badan Keuangan, 2018



Data di atas menunjukkan selain terjadi peningkatan PAD dengan rata – rata kenaikan mencapai < 10 persen, sementara itu juga terjadi peningkatan khususnya penerimaan transfer pemerintah pusat dan provinsi dengan rata – rata kenaikan mencapai >10 persen. Kondisi ini berimplikasi terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah, walaupun seiring dengan meningkatnya kemandirian keuangan daerah memberikan dampak penurunan rasio ketergantungan daerah.

Rasio Ketergantungan daerah yaitu total pendapatan transfer dibagi dengan total pendapatan daerah, sehingga saat ini rasio ketergantungan daerah capaiannya 86,05 persen dan angka rasio ini termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, yang artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi masih sangat besar.

Tabel 3.14
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Secara umum aktifitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi belanja yang muncul dalam anggaran, baik dalam belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan, yang dinyatakan dalam rasio aktifitas. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Jika semakin tinggi rasio belanja rutin maka prosentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil begitupula sebaliknya.



Rasio aktivitas (keserasian) dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) rasio belanja rutin terhadap APBD = total belanja rutin dibagi total APBD, dan (2) rasio belanja pembangunan terhadap APBD = total belanja pembangunan dibagi total APBD

Tabel 3.15
Rasio Aktivitas Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 - 2018

Tahun	Total Realisasi APBD	Total Realisasi Belanja Pembangunan (Belanja Modal + Belanja Barang dan Jasa)	Realisasi (%)
2014	874.979.463.989,74	324.623.098.361,74	37,10
2015	995.870.912.043,45	575.520.002.664,45	57,79
2016	1,050,832,636,187.45	675.144.620.649,45	64,25
2017	1.054.818.794.793,80	771.914.861.648,80	73,18
2018	1.210.790.223.624,70	938.697.601.048,70	77,53

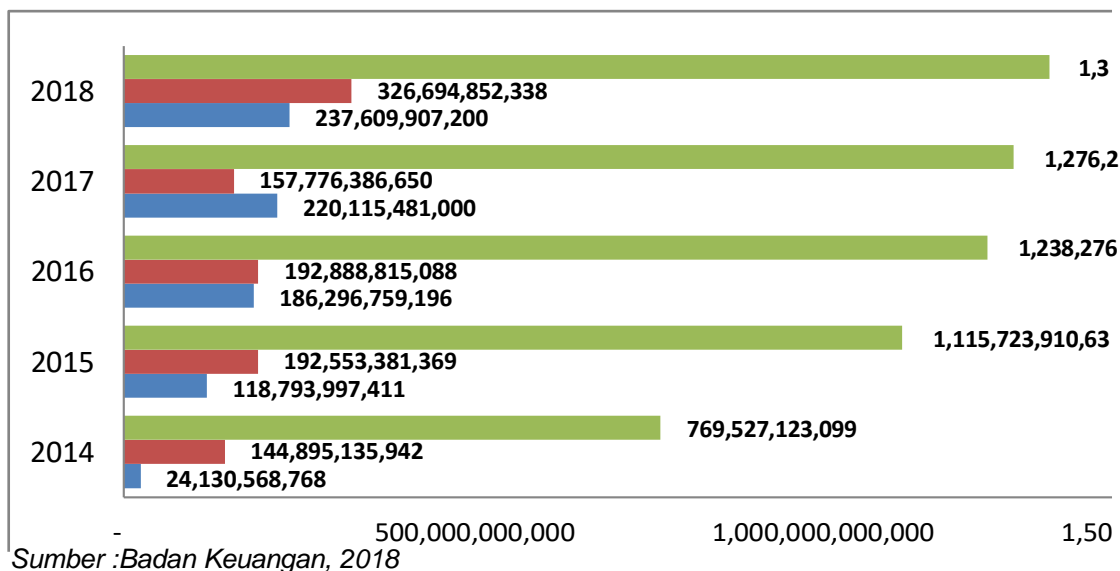
Sumber : LKPD, 2013 -2017 (telah diolah kembali) dan Badan Keuangan 2018

Data pada tabel di atas menunjukkan peningkatan rasio belanja pembangunan, dimana pada tahun 2017 rasio belanja pembangunan 43,11 persen dan pada tahun 2018 naik 49,56 persen atau naik 6,45 point dari capaian realisasi 2017.

Sementara itu, pada indikator rasio belanja modal terhadap APBD terjadi penurunan realisasi capaian, dimana hal ini disebabkan beberapa hal, yakni (1) adanya regulasi baru yang menyebabkan beberapa komponen yang sebelumnya termasuk belanja modal mengalami perubahan menjadi belanja barang dan jasa khususnya pada rekening belanja barang yang diserahkan ke masyarakat; (2) adanya kebijakan pemerintah pusat berupa penundaan Dana Perimbangan dan pemotongan dana DAK, dimana alokasi dana tersebut termasuk dalam belanja modal dan (3) meningkatnya belanja transfer ke desa berupa transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan ke desa, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut :



Gambar 3.9
Perbandingan Belanja Modal dan
Belanja Transfer Ke Desa Terhadap Belanja APBD Tahun 2014 – 2018



Sementara itu, realisasi akumulasi pencapaian sasaran strategis terselenggaranya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021, yakni sebagaimana berikut :

Tabel 3.16
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas
Berdasarkan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Realisasi s/d 2018	Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	15,75	31	50,80
2	Rasio Aktifitas (Rasio Belanja Pembangunan Terhadap Total APBD)	Persen	77,53	61,63	125,79
3	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	Persen	23,22	36	64,5
Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis					80,36

Sumber : Badan Keuangan 2018



Tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis terselenggaranya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, sampai dengan tahun 2018 atau tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gorontalo telah mencapai kinerja > 50 persen, dimana dari 3 (tiga) capaian indikator sasaran strategis dan 1 (satu) indikator yakni rasio aktiitas yang capaian realisasinya melebihi target akhir RPJMD yaitu 61,63 dan realisasi s/d tahun 2018 mencapai 77,53.

Beberapa kendala yang dihadapi untuk mendorong terselenggaranya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, khususnya pencapaian indikator rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, adalah (1) keterlambatan Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) menyebabkan keterlambatan proses pengadaan Barang dan Jasa sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyerapan dana; (2) pemotongan DAK pada tahun 2018 berpengaruh pada pembangunan daerah dan penundaan dana perimbangan mengakibatkan sebagian program kegiatan yang termasuk dalam belanja modal tidak dapat di realisasikan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah dengan melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun untuk menghindari adanya kebijakan rasionalisasi anggaran di tingkat kementerian yang biasanya terjadi pada Triwulan III dan IV.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi adalah (1) kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, (2) masih lemahnya sistem perlindungan pendukung pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, (3) belum tersedianya SDM penilai dan pemeriksa pajak dan retribusi daerah, (4) belum efektifnya pengenaan sanksi untuk pelanggaran perpajakan. Dalam rangka rangka optimalisasi perolehan PAD, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan upaya – upaya, yakni (1) Pendataan/pemungutan data objek/subjek pajak; (2) pemutakhiran data piutang PBB-P2 hasil pelimpahan KPP Pratama; (3) penyesuaian NJOP dengan kondisi saat ini; (4) memberikan reward dan pubishment kepada wajib pajak, (5) melaksanakan kerjasama dengan pihak



kejaksaan dan kepolisian; (6) melaksanakan sensus pajak; dan (7) digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;

Dalam hal arah kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menetapkan kebijakan belanja daerah dengan menekankan beberapa hal berikut ini, yaitu : (1) penerapan anggaran berbasis kinerja, dengan meninggalkan metode penganggaran yang selama ini dianut yakni metode perhitungan *incremental budgeting*; (2) pengalokasian belanja diutamakan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah setelah sebelumnya memenuhi pengalokasian pada belanja wajib dan mengikat; (3) belanja tidak langsung untuk membiayai subsidi, hibah, bansos dialokasikan sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah setelah terlebih dahulu telah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat serta alokasi pada prioritas pembangunan daerah; (4) belanja langsung dialokasikan berdasarkan prinsip "*money follow priority program*" yakni dengan mendahulukan program prioritas pembangunan daerah; (5) belanja barang dialokasikan seefisien mungkin dan lebih diutamakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ; dan (6) alokasi belanja modal berangsur-angsur lebih ditingkatkan terutama yang terkait langsung dengan pemenuhan sarana prasarana publik, memiliki daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi dan fiskal daerah maupun dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan perekonomian masyarakat.

Sasaran Ke – 2 : Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berintegritas

Ketercapaian sasaran strategis terbentuknya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berintegritas didukung melalui pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, yakni : (1) nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Gorontalo; dan (2) nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gorontalo. Berikut ini, capaian indikator kinerja yang digunakan mengukur pencapaian sasaran strategis terbentuknya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berintegritas, sebagaimana berikut :



Tabel 3.17
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah Berintegritas Tahun 2016 - 2017

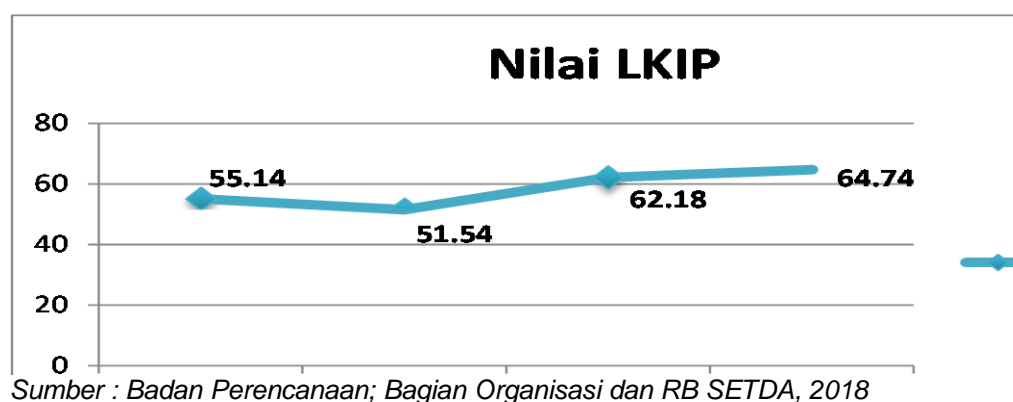
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai LKIP Kabupaten Gorontalo	Angka	60,50	62,18	102,78	62,50	64,74	103,58
2	Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi (3,1490)	100,00	Sangat tinggi (3,15)	Sangat Tinggi (3,25)	103,17

Sumber: Bagian Organisasi dan RB, Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2018

Indikator kinerja sasaran “**Nilai LKIP Kabupaten Gorontalo**”, realisasi kinerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2018, pencapaian indikator ini sebesar 64,74 point (kategori B) dari target yang ditetapkan sebesar 62,50 point (kategori B), dengan demikian capaian kinerja indikator tersebut mencapai 103,58 persen. Capaian kinerja indikator ini meningkat dari capaian pada tahun 2017 mencapai 102,78 persen, serta terjadi peningkatan 2,56 point dari 62,18 point pada tahun 2017 menjadi 64,74 point pada tahun 2018. Peningkatan capaian nilai LKIP Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2018 meningkat 2,56 point dari capaian tahun 2017 dan tetap bertahan pada kategori B dengan interpretasi Baik, hal ini berarti akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah baik.



Grafik 3.10
Capaian Nilai LKIP Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 – 2018



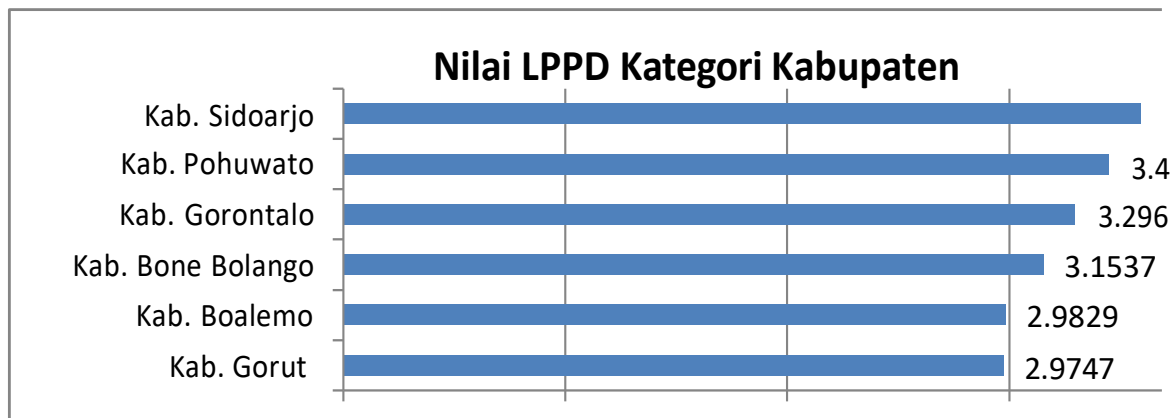
Sementara itu untuk indikator kinerja sasaran “**Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo**”, realisasi kinerjanya telah mencapai target yang ditetapkan yakni kategori Sangat Tinggi dengan nilai 3,2963. Capaian nilai LPPD Kabupaten Gorontalo meningkat 0,0445 point jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya yang hanya sebesar 3,2518.



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2018, nilai LPPD Kabupaten Gorontalo tahun 2018 berada pada peringkat ke 50 (kategori kabupaten) dengan perolehan nilai 3,2963 dengan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kategori Sangat Tinggi. Nilai LPPD tertinggi di Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Pohuwato dengan nilai 3,4770 merupakan peringkat 12 dengan selisih 0,1807 dan memiliki selisih 0,3 dengan dengan peringkat ke - 1 nasional yakni Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan nilai LPPD 3.5926.



Grafik 3.11
Capaian Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo Terhadap Kabupaten
Lainnya Tahun 2017



Sumber : SK Mendagri Nomor 100-53 Tahun 2018

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berintegritas, sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021, yakni sebagaimana berikut :

Tabel 3.18
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah Berintegritas Berdasarkan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Realisasi s/d Tahun 2018	Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai LKIP Kabupaten Gorontalo	Angka	64,74	66,70	97,06
2	Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis					98,53

Tabel di atas menunjukkan capaian indikator kinerja nilai LPPD Kabupaten Gorontalo sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai 100 persen, sementara itu untuk indikator kinerja nilai LKIP Kabupaten Gorontalo capaian kinerja telah mencapai 103,02 persen dan diharapkan target akhir RPJMD bisa tercapai target RPJMD.



Terkait dengan peningkatan capaian indikator nilai LKIP, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah (1) tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil; (2) indikator kinerja belum memenuhi kriteria; (3)

mekanisme cascade kinerja tidak berpedoman pada proses bisnis organisasi; (4) perencanaan kinerja dan proses bisnis organisasi tidak sepenuhnya dijabarkan pada dokumen penganggaran; (5) ketidaksesuaiannya antara indikator kinerja individu; (6) belum efektifnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal; (7) lebih memanfaatkan aplikasi monitoring kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi SAKIP guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan upaya – upaya, yakni : (1) memperkuat komitmen pimpinan OPD dengan menjadikan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai alat ukur kinerja pimpinan OPD didepan Bupati Gorontalo; (2) penguatan tim POKJA SAKIP; (3) pendampingan dari Tim Kemen PAN- RB dan Tim BPKP melalui kegiatan coaching clinic kepada para Wali Data OPD dan Tim Pokja SAKIP; (4) penerapan cascading hingga dengan pejabat eselon IV pada 100 persen entitas SAKIP; dan (5) mengembangkan proses pengukuran akuntabilitas kinerja melalui aplikasi E-Sakip Gemilang yang telah diluncurkan di Bandung pada Februari 2019, (6) menerapkan SAKIP secara elektronik (e-Planning, e-monev, e-Pokir dan e-musrenbang);

Sasaran Ke – 3 : Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Ketercapaian sasaran strategis terlaksananya reformasi birokrasi didukung melalui pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, yakni indeks



reformasi birokrasi. Indikator ini ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) merupakan indikator nasional yang merupakan salah satu target RPJMN Tahun 2014 – 2019 dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 yang menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 pada kategori B; (2) sangat relevan dengan pencapaian misi ke 2 (dua) RPJMD yakni **Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih Dan Dinamis**, yang mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga, serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

Sebagai wujud komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, maka telah disusun dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo 2013 - 2018.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terhadap evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo oleh tim asesor internal Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini tim dari Inspektorat, diperoleh hasil nilai evaluasi reformasi birokrasi yakni 50.64 (50.64%) dengan predikat penilaian CC. Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo oleh Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo , hasil dari aspek penilaian Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.19
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Gorontalo

No	Komponen / Sub Komponen		Bobot	Nilai	%
A	Proses (60)				
	I	Manajemen perubahan (5)	5,00	4,06	81,26 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

	II	Penataan peraturan perundang- undangan (5)	5,00	3,75	75%
	III	Penataan dan penguatan organisasi (6)	6,00	2,67	44,44 %
	IV	Penataan tatalaksana (5)	5,00	3,51	70,18 %
	V	Penataan sistem manajemen sdm (15)	15,00	8,03	53,51 %
	VI	Penguatan akuntabilitas (6)	6,00	3,55	59,22%
	VII	Penguatan pengawasan (12)	12,00	6,76	56,36 %
	VII I	Peningkatan kualitas pelayanan publik (6)	6,00	2,69	44,84 %
Total Pengungkit (Proses)			60,00	35,02	58,37

No	Komponen / Sub Komponen		Bobot	Nilai	%
B.	Hasil (40)				
	I	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (20)	20,00	7,42	37,08 %
	II	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10)	10,00	3,00	30,00 %
	III	Kualitas pelayanan publik (10)	10,00	5,200	52 %
Total Hasil			40,00	15,62	39,04 %
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi			100,00	50,64	50,64 %

Sumber : Inspektorat, 2018

Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi terdapat beberapa indikator penilaian yang belum dan tidak efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada 2017 sehingga memberikan nilai capaian menurun sebagaimana dijabarkan pada table dibawah ini :

Tabel 3.20
Indikator yang Menyebabkan Turunnya Nilai Reformasi Birokrasi
Kabupaten Gorontalo Tahun 2017

No	Komponen / Sub Komponen	Rekomendasi
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Quick win yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi - Perlu ada pelatihan untuk semua tim Asesor PMPRB - Belum adanya rencana aksi lanjutan terhadap penilaian PMPRB - Belum efektif penggunaan media



		komunikasi dalam mensosialisasikan reformasi birokrasi
2.	Penataan Peraturan Peundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron -
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi dalam penataan organisasi belum diimplementasikan dalam perubahan organisasi
4.	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap OPD belum memiliki Peta Proses Bisnis - E-Government yang ada pada setiap instansi belum terintegrasi.
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki dokumen redistribusi pegawai - Penerimaan pegawai belum disebarluaskan secara online - Belum ditetapkannya promosi terbuka - Promosi jabatan belum diumumkan secara terbuka - Belum terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi - Belum ada kinerja individu - Belum adanya informasi factor jabatan dan kelas jabatan
6.	Penguatan Akuntabilitas	Belum adanya system pengukuran kinerja secara elektronik
7.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terdapat Tim Penanganan Gratifikasi tetapi penanganannya belum efektif dilakukan - Implementasi whistle blowing system belum efektif. - Belum ada tindak lanjut atas pembangunan Zona Integritas - Belum ada penetapan OPD untuk WBK/WBBM
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya review terhadap Standar Pelayanan - Belum adanya Reward/Punishment terhadap OPD yang memberikan layanan tidak sesuai. - Belum adanya inovasi pelayanan - Belum memiliki SOP pengaduan pelayanan publik - Tindak lanjut pengaduan sebagian besar



		belum ditindak lanjuti - Survey kepuasan masyarakat belum bisa diakses secara elektronik
--	--	---

Sumber : PMPRB, 2018

Evaluasi yang dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi tiap K/L dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan penilaian lapangan dan evaluasi ini berbeda dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang juga dilakukan setiap tahun. Survei ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat merasakan perubahan-perubahan serta pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi tersebut.

Dalam meningkatkan capaian nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi rekomendasi perbaikan antara lain : (1). Telah melakukan evaluasi organisasi dan perubahan struktur organisasi, (2). Penerimaan pegawai telah dilakukan secara terbuka dan online, (3) promosi jabatan telah dilakukan secara terbuka, (4). Telah memiliki dokumen evaluasi jabatan dan kelas jabatan (4). Telah menindak lanjuti pengaduan terhadap pelayanan publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan evaluasi pelayanan publik telah terlaksananya penilaian pelayanan publik dengan memberikan rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan publik hal – hal sebagai berikut, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.21
Rekomendasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Aspek	Rekomendasi
Kebijakan Pelayanan	1. Standar Pelayanan perlu di perbaharui dengan mengacu pada Permenpanrb no. 15 tahun 2014 2. Proses penyusunan standar pelayanan sebaiknya melibatkan masyarakat agar keabsahan pelayanan dapat menjadi tanggung jawab terhadap pengguna layanan (masyarakat) 3. Memperluas publikasi terkait standar pelayanan dan maklumat pelayanan.



	4. Melaksanakan Survey kepuasan masyarakat dan menindak lanjuti hasil survey kepuasan masyarakat
Profesionalisme SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun, menetapkan dan menerapkan aturan kode etik, yang didalamnya mengatur pemberian penghargaan dan sanksi bagi yang melanggar2. Melaksanakan dan mendokumentasikan setiap pemberian sanksi dan penghargaan kepada pegawai3. Menerapkan budaya pelayanan 5S (Senyum, sapa, salam, sopan dan santun)
Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga kebersihan dari sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan kualitasnya demi kenyamanan pengguna layanan2. Melengkapi fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus3. Melengkapi fasilitas penunjang bagi pengguna layanan
Sistem Informasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas SIPP yang tersedia baik elektronik maupun non elektronik.2. Mengoptimalkan website dengan melengkapi informasi didalamnya terkait Maklumat Pelayanan, hasil SKM dan fitur layanan konsultasi dan pengaduan.
Konsultasi dan Pengaduan	Meningkatkan pendokumentasian kegiatan konsultasi dan pengaduan.
Inovasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan inovasi yang ada sehingga berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat2. Menggali lebih banyak inovasi dan mereplikasi inovasi di pemda lainnya

MISI 3 : Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian

Kabupaten Gorontalo memiliki kekayaan sumber daya alam dan memiliki potensi yang cukup besar dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan menyediakan berbagai potensi yang sampai saat ini belum tereksplorasi secara optimal.



Ketersediaan lahan yang sangat luas tidak hanya kondusif bagi pertanian, juga sangat support dalam mendukung eksplorasi peternakan

Perikanan baik tangkap maupun budidaya masih memiliki peluang dalam meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Sumber daya perairan yang tersedia bukan hanya laut, tetapi juga potensi Danau Limboto. Tidak hanya potensi aspek perikanan yang dapat dikembangkan tetapi dari aspek wisata agronya dapat disulap untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ini berarti akan terdapat pula sumber PAD baru yang akan mendongkrak kemandirian.

Kabupaten Gorontalo juga memiliki kekayaan mineral yang tersebar pada beberapa kecamatan. Emas tersebar di Kecamatan Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula, Asparaga dan Pulubala dengan potensi 528.290 ton. Kecamatan Boliyohuto, Pulubala dan Telaga memiliki potensi Tembaga sebanyak 3.978.390 kubik.

Selain itu terdapat potensi hydrothermal dan mikrohydro yang dapat ditingkatkan pemanfaatannya. Potensi Hydrothermal berada di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango yang dikembangkan dalam paket wisata pemandian air panas. Potensi Mikrohydro yang berada di wilayah Kecamatan Telaga telah dimanfaatkan untuk penyediaan sumber daya listrik yang ramah lingkungan dengan debit air 23,5 liter/detik (hulu sungai Dulamayo). Potensi mikrohydro berupa air terjun Mohiyolo Kecamatan Asparaga memiliki potensi debit air 2.000 liter /detik.

Merujuk atas potensi di atas, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menganggap perlu untuk memberikan perhatian khusus terhadap sumber daya alamnya. Hal ini dimanifestasikan dalam Misi ke-3 Pemerintah Daerah yakni “Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian”. Misi ini dijabarkan dalam 11 sasaran strategis dan dievaluasi melalui 30 indikator kinerja, sebagai berikut:



Sasaran Ke – 1 : Peningkatan Ekonomi Wilayah yang Berkualitas

Tabel. 3.22
Capaian dan Evaluasi Indikator Peningkatan Ekonomi
Wilayah yang Berkualitas

Tahun 2018					
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	%
1	Pertumbuhan ekonomi	%	7,82	6,93	88,61
2	PDRB Perkapita ADHK	Rp.	18.912,210	19.852.446.29 *	104,97
3	Pendapatan Perkapita ADHK	Rp.	18.912,210	19.852.446.29 *	104,97
4	Incremental Capital Output Ratio	%	0,15	5,527	351
5	Inflasi (Y on Y)	%	3,8	4.03	106,05
6	Indeks Gini Ratio	Indeks	0,4100	0,4163	101
Rerata Capaian Kinerja Sasaran					

Sumber : BPS Gorontalo dan Badan Perencanaan Kab.Gorontalo, 2019

Catatan: *) Data Sementara

Pencapaian 6 indikator ekonomi wilayah di atas menunjukkan hasil yang baik kecuali untuk indikator ICOR.

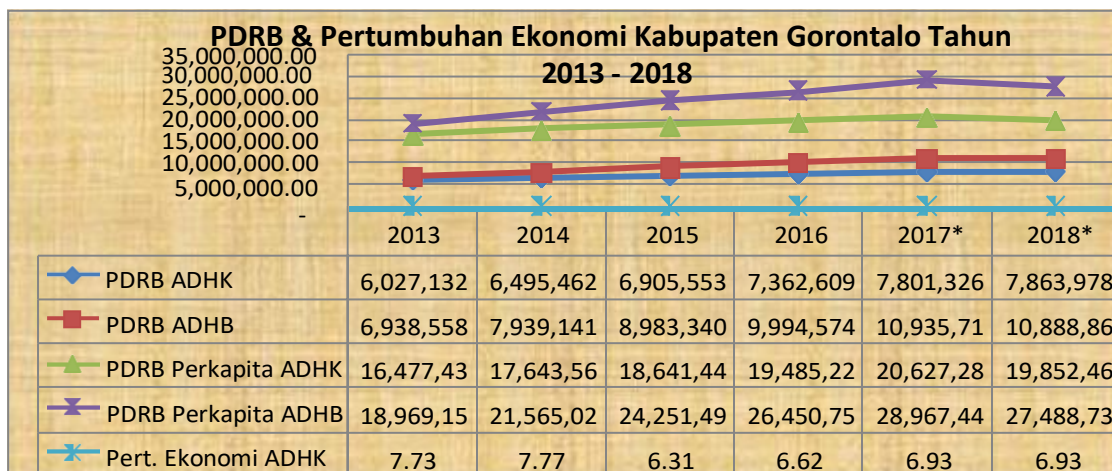
Pertumbuhan Ekonomi

Selang tahun 2013–2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo fluktuatif. Pada tahun 2015 sempat anjlok akibat kondisi puso dan setelah itu terus meningkat hingga tahun 2018. Secara absolut, PDRB dan PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) semuanya menunjukkan peningkatan selama 6 tahun terakhir. Progress pertumbuhan pasca anjlok di tahun 2015 mengalami peningkatan 0,62 point di tahun 2018. Hasil ini lebih baik dibandingkan capaian dari tahun 2012 ke 2014 yang hanya tumbuh 0,03 point.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

Grafik 3.12

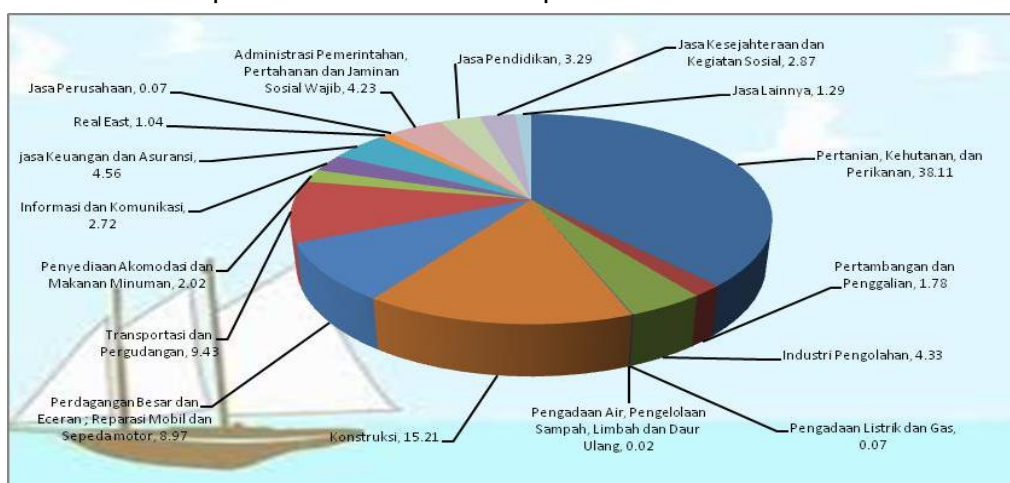


Sumber: BPS Gorontalo dan Badan Perencanaan Kab.Gorontalo, 2019

Catatan: *) Data Sementara PDRB dalam jutaan rupiah, PDRB perkapita dalam rupiah
Pertumbuhan Ekonomi dalam persen

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 tidak terlepas dari 38,19% kontribusi sektor pertanian dan 15,66% kontribusi sektor konstruksi sebagai 2 sektor yang memiliki share terbesar dalam PDRB. Hal ini disebabkan gencarnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian dan fasilitas publik serta peningkatan pembangunan perumahan di Kabupaten Gorontalo.

Grafik 3.13
Komposisi PDRB ADHK Kabupaten Gorontalo Tahun 2018



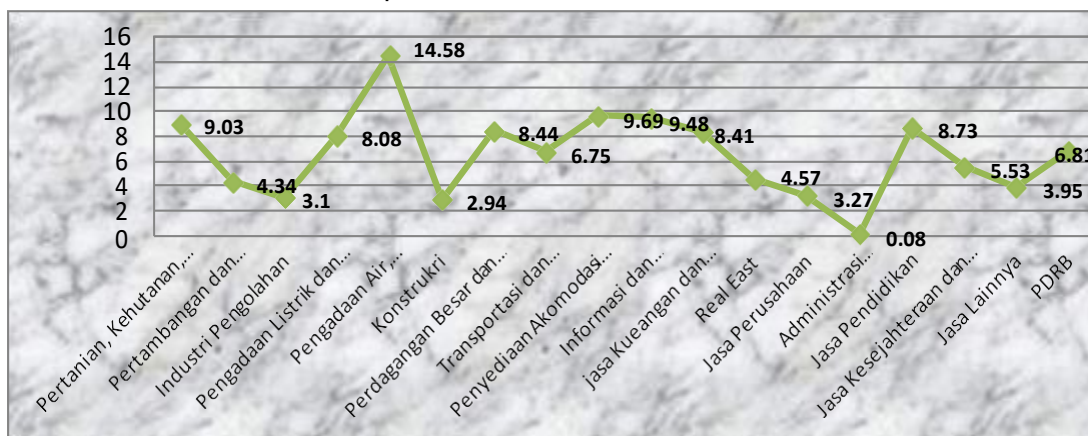
Sumber : BPS Gorontalo dan Badan Perencanaan Kab.Gorontalo, 2019

Catatan : Data Sementara



Berdasarkan pertumbuhan sektoral, Jasa Pendidikan memiliki prospek yang sangat baik dengan capaian pertumbuhan 3,29%. Keberadaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu kontributornya. Laju pertumbuhannya melampaui pertumbuhan agregat ekonomi dan sektor lainnya. Sektor jasa perusahaan merupakan sektor dengan pertumbuhan yang sangat lambat.

Grafik 3.14
Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018



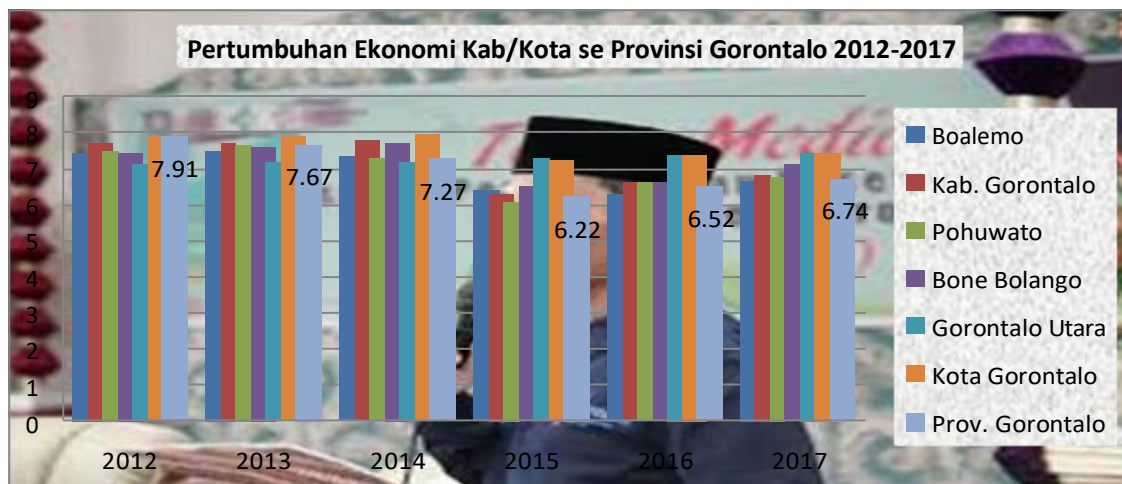
Sumber : BPS Gorontalo dan Badan Perencanaan Kab.Gorontalo, 2019

Catatan : Data Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo dalam lingkup Provinsi Gorontalo cukup kompetitif. Hasil ditunjukkan dengan laju pertumbuhan yang berada di atas pertumbuhan provinsi selang tahun 2015 – 2018 seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut :



Grafik 3.15
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo
Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Gorontalo dan Badan Perencanaan Kab.Gorontalo, 2019

Catatan: *) Data Sementara

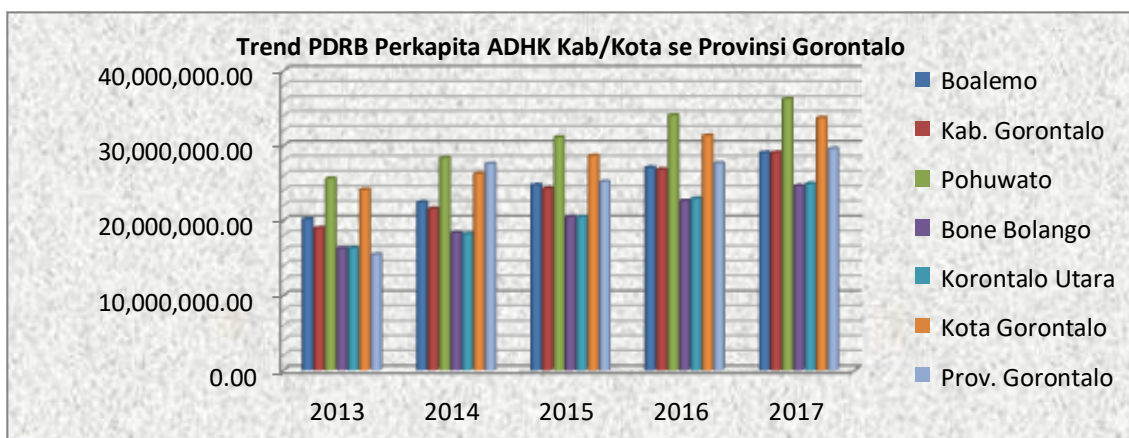
PDRB Perkapita dan atau Pendapatan Perkapita.

PDRB perkapita / pendapatan perkapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita sebenarnya berbeda dengan pendapatan perkapita. Pengertian pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi, angka ini seringkali sulit diperoleh sehingga diganti dengan total PDRB atas dasar harga pasar/konstan dibagi dengan jumlah penduduk. Demikian halnya yang berlaku di Kabupaten Gorontalo.

Kinerja PDRB perkapita Kabupaten Gorontalo tahun 2018 baik ADHK maupun ADHB memiliki kinerja yang sangat baik. Target RPJMD sebesar **Rp.18.912.21**, realisasi kinerja sebesar Rp.19.852.466.29 atau persentase capaian 104.97%. Selang tahun 2013 – 2018 capaiannya menunjukkan peningkatan yang signifikan.



Grafik 3.16



Sumber : BPS Gorontalo dan Badan Perencanaan Kab.Gorontalo, 2019

Catatan: *)Data sementara

Dalam skala provinsi, capaian PDRB perkapita Kabupaten Gorontalo masih dibawah capaian Provinsi, Pohuwato dan Kota Gorontalo. Hal ini disebabkan kantong penduduk terbesar adalah di Kabupaten Gorontalo. Jadi meskipun share PDRB terhadap Provinsi adalah yang terbesar, tetapi penduduk sebagai faktor pembagi juga terbesar.

Indikator Incremental Capital Output Ratio

Realisasi capaian ICOR time lag 0 sebesar 5,959 pada tahun 2017 masih jauh dari 3,1 yang ditargetkan atau hanya mencapai 53,91%. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang berat sebesar 46,09% untuk menutupi celah target dan realisasi RPJMD. Investasi yang dilaksanakan pemerintah baru akan mendekati target yang ditetapkan setelah tahun ke-4 pelaksanaan investasi.



Tabel 3.23
Gambaran ICOR Kabupaten Gorontalo

Tahun	Incremental Capital Output Ratio						
	Lag 0	Lag 1	Lag 2	Lag 3	Lag 4	lag 5	lag 6
2010	5,404	4,994	4,629	4,301	3,970	4,534	4,068
2011	5,421	5,025	4,669	4,310	4,922	4,416	
2012	5,408	5,024	4,638	5,297	4,753		
2013	5,415	4,999	5,709	5,123			
2014	5,401	6,168	5,534				
2015	6,682	5,996					
2016	6,321						
2017*	5,959						
2018	5.527						
Average	5,726	5,368	5,036	4,758	4,548	4,475	4,068

Sumber : BPS Gorontalo dan Bappeda Kabupaten Gorontalo, 2018

Catatan: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018, untuk setiap 1 unit output yang dihasilkan maka harus membutuhkan support input sebesar 5,527 unit. Hal ini memberikan *warning* keras bagi pemerintah untuk lebih disiplin mengefisienkan dan mengefektifkan investasi termasuk pengeluaran pemerintah. Reformasi birokrasi yang sudah dijalankan harus terus konsisten dalam menetapkan prioritas pembangunan.

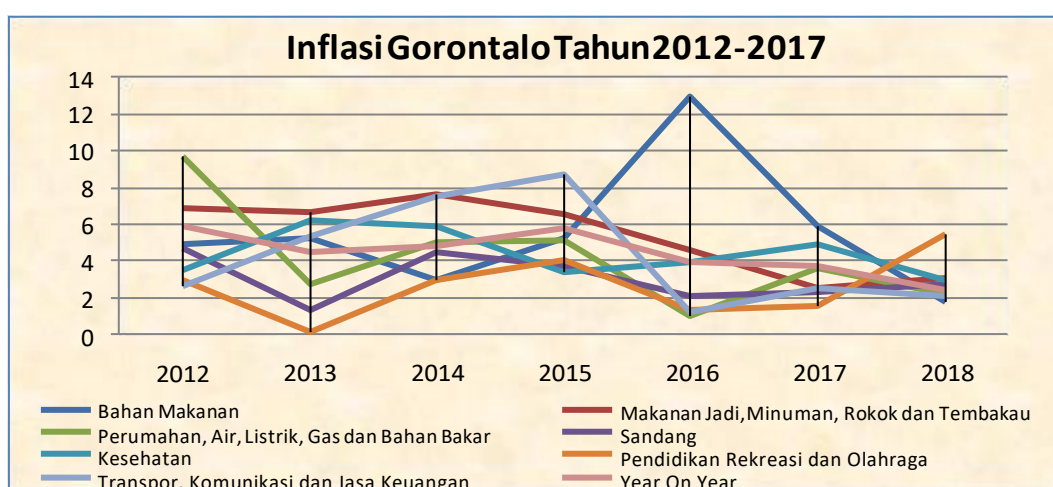
Skala prioritas harus mengedepankan *urgensi*, manfaat ekonomi dan *multiplier effect*, bukan mengikuti egoisme OPD yang sekedar mendapat alokasi anggaran yang besar. Optimalisasi anggaran pemerintah harus dimulai dari proses perencanaan yang tepat sehingga benar – benar dilakukan pemilahan program, prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Untuk selanjutnya dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi acuan tunggal pelaksanaan pembangunan sehingga arah pembangunan dapat lebih terarah dan terukur.



Inflasi.

Inflasi *year on year* tahun 2018 mencapai 4,03 %, lebih tinggi dibandingkan target RPJMD sebesar 3,08% pertahun. Dengan capaian realisasi tingkat inflasi sebesar 106,05% menunjukkan bahwa inflasi di Gorontalo masih relatif tinggi. Demikian halnya jika disandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang hanya 3,61% di tahun yang sama.

Grafik 3.17
Inflasi Gorontalo Tahun 2012-2017



Sumber : BPS Gorontalo, Tahun 2019

Dari grafik di atas nampak bahwa secara agregat, fluktuasi harga yang terjadi sepanjang tahun 2012–2018 relatif terkontrol dengan capaian tertinggi terjadi di tahun 2016. Kelompok pengeluaran Bahan Makanan dan Transportasi memiliki laju inflasi yang sangat fluktuatif.

Kelompok Bahan Makanan mengalami inflasi yang tertinggi di tahun 2015 terkait puso yang dialami petani akibat musim kemarau. Pada tahun 2016 inflasinya kembali dapat dikendalikan dengan berbagai kebijakan dan bantuan bagi petani sehingga ketersediaan bahan makanan terjamin. Namun di tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di titik 4,03% bahkan lebih tinggi dari inflasi *year on year* yang hanya 3,8%. Pemerintah telah menjaga ketersediaan dan stok pangan tetapi harga pasar masih melambung sementara harga ambilan pada petani relatif rendah. Produksi

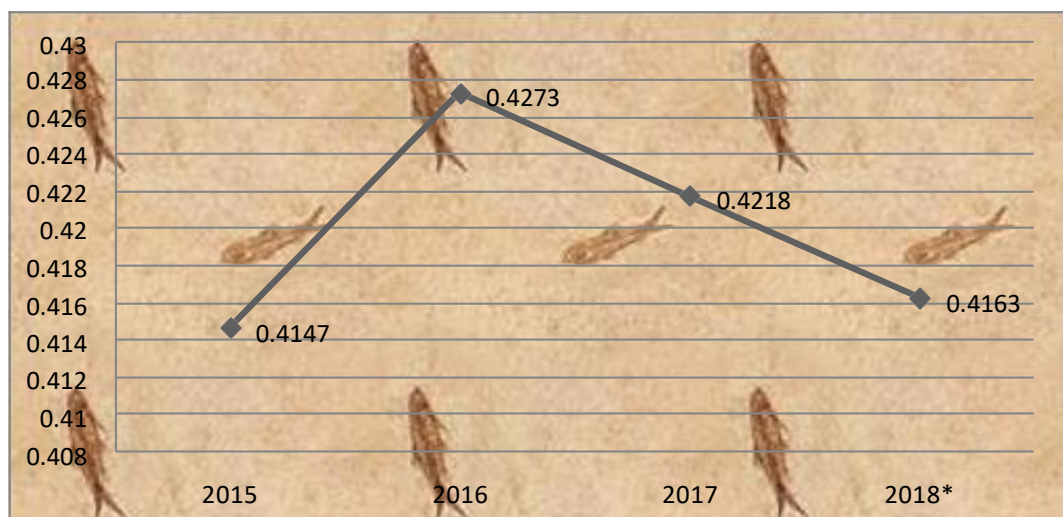


perikanan mengalami peningkatan tetapi kenyataannya ikan masih menjadi contributor utama inflasi. Hal ini membutuhkan kebijakan afirmatif untuk membersihkan sumbatan distribusi guna memperbaiki tata niaga yang sudah ada.

Indeks Gini Ratio

Tahun 2018 capaian atas indeks Gini Ratio adalah 0,4163 atau sebesar 101,53 % dari target RPJMD 0,4100. Dibandingkan tahun 2017, persentase capaian ini relatif turun, tetapi secara absolut, nilai Gini Ratio di tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan gap antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Perkembangan indeks Gini Ratio di Kabupaten Gorontalo selang tahun 2015 – 2018 disajikan dalam garfik berikut :

Grafik 3.18
Indeks Gini Ratio Kab.Gorontalo Tahun 2015 – 2018



Sumber : BPS Gorontalo dan Badan Perencanaan Kab.Gorontalo, 2019

Catatan: *)Data sementara

Penurunan grafik di atas menunjukkan adanya perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan berbagai intervensi bantuan pemerintah. Bantuan ini berupa sarana produksi seperti pemberian bantuan bagi petani, nelayan dan peternak, termasuk santunan bagi lansia.



1. Penyerahan Bantuan ASLUT bagi para Lansia
2. Penyerahan Bantuan sosial berupa UEP bagi Fakir Miskin
3. Penyerahan Bantuan Sosial Bagi PRSE
4. Penyerahan bantuan ternak

Sasaran Ke – 2 : Peningkatan Kemajuan dan Perkembangan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan basis data dalam kerangka kemajuan dan perkembangan desa yang mencakup 3 dimensi yaitu sosial, ketahanan ekonomi dan ekologi. Dimensi sosial memiliki cakupan pada aspek kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ketahanan ekonomi meliputi produksi masyarakat, perdagangan, logistik, lembaga keuangan/perkreditan dan keterbukaan wilayah serta dimensi ekologi berhubungan dengan kualitas lingkungan dan bencana alam.



Tabel 3.24

Pencapaian Indikator Peningkatan Kemajuan dan Perkembangan Desa

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Persentasi
			Target RPJMD	Realisasi	
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6200	0,587	94,67
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	25	87	348,00
Capaian Kinerja Sasaran					221,33

Sumber : BPM Pemdes, Kemendes 2019

Kementerian Desa melakukan publish hasil perhitungan IDM, sehingga dimensi ketahanan lingkungan, ekonomi dan sosial pun dapat ditampilkan. Pada tahun 2017, realisasi IDM adalah 0,596 atau 97,70% dari target RPJMD. Jumlah desa tertinggal saat itu adalah 21 desa, 5 desa kategori sangat tertinggal, Dengan dasar target RPJMD sebanyak 28 desa tertinggal, maka tingkat capaian di tahun 2017 adalah 97,70 %. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan dalam jumlah desa tertinggal. Dari target 25 desa, menjadi 87 desa yang terdiri dari 76 desa tertinggal dan 11 desa sangat tertinggal. Dengan realisasi capaian 348,00%. Hal ini di sebabkan kurangnya koordinasi antara pendamping desa dengan Pemerintah sehingga database desa tertinggal tidak update.

Sasaran Ke – 3 : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu

Pertanian merupakan salah satu ekonomi basis Kabupaten Gorontalo. Sebagai daerah yang mengusung tema sentral pertanian, pemerintah daerah mengambil kebijakan pendekatan Pertanian Terpadu. Pengukuran keberhasilan sasaran ini menggunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sebagaimana dalam tabel berikut :



Tabel 3.25
Pencapaian Indikator Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Pertanian Terpadu

No.	Indikator	Satuan	TAHUN 2018		Persentase
			Target RPJMD	Realisasi	
1	Nilai Tukar Petani	Indeks	104	104	100
Capaian Kinerja Sasaran					100

Sumber : BPS Gorontalo, 2018

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Indikator ini merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

Grafik 3.19



Sumber : BPS dan Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Tahun 2019

Nilai NTP Gorontalo tahun 2018 berada pada posisi 104. Bagi Kabupaten Gorontalo, hasil ini sudah cukup baik capaiannya sudah mencapai 100% dari target RPJMD. Dalam posisi ini, secara umum petani dalam kondisi surplus karena kenaikan harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Pada tahun ini, petani subsektor hortikultura memiliki surplus yang lebih tertinggi disusul oleh tanaman pangan, perikanan tangkap dan peternakan. Untuk subsektor



perikanan budidaya dan tanaman perkebunan rakyat, petaninya relatif berada pada posisi efektif.

Tabel 3.26
Perkembangan NTP Gorontalo menurut Sub Sektor Tahun 2018

Tahun	Hortikultura	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Tanaman Pangan	Gabungan
2014	113.92	97.71	102.47	100.11	102.84	92.08	96.43	101.33
2015	123.60	94.1	101.09	99.64	102.19	92.05	98.3	102.28
2016	116.76	97.05	102.62	101.37	105.55	89.23	108.38	105.32
2017	115.57	98.48	101.89	102.21	106.24	88.27	107.42	105.478
2018	146.36	133.81	122.87	131.54	141.49	105.93	145.43	133.81

Sumber: BPS Gorontalo, 2018

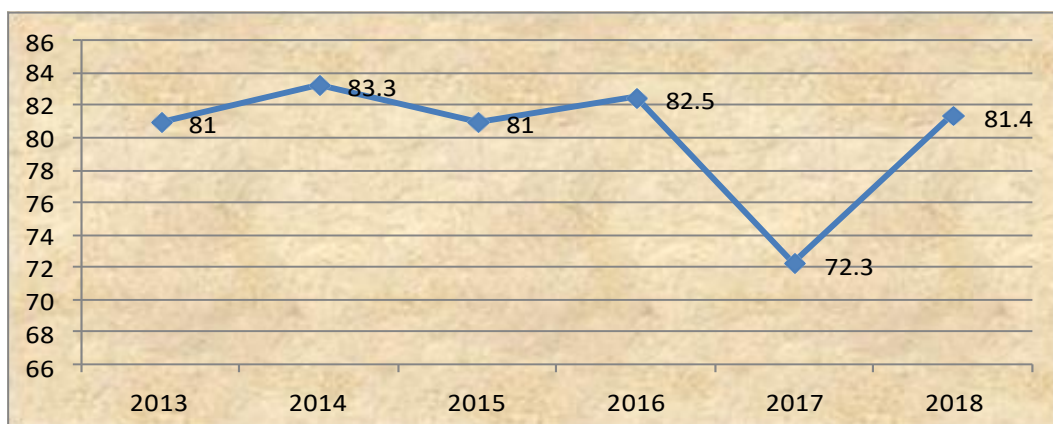
Berdasarkan tabel di atas, selama 4 tahun terakhir secara general petani Gorontalo berada pada posisi surplus karena NTP di atas 100. Subsektor yang konsisten surplus selang tahun 2014 – 2018 adalah hortikultura, peternakan dan perikanan tangkap. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam mengintervensi pembangunan pertanian.

Sasaran Ke – 4 : *Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kelembagaan Pangan*

Malnutrisi dan penyakit yang menyertainya merupakan ancaman jika kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat tidak terkontrol. Untuk itu dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan kelembagaan pangan guna tercapainya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan penduduk. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Trend skor PPH selama 6 tahun terakhir sebagaimana gambar berikut:



Grafik 3.20
Trend Skor PPH Kabupaten Gorontalo



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2019

Tingkat realisasi skor PPH tahun 2017 sebesar 72.3 dengan tingkat capaian 87.10% dari target RPJMD. Pada tahun 2018, kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 9.80% ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu:

- Kemampuan daya beli masyarakat yang cenderung mengalami perbaikan/meningkat.
- Pola konsumsi dan kesadaran masyarakat yang sudah mengalami perubahan menuju kearah yang lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- Musim yang sudah mendukung untuk kegiatan pertanian sehingga harga bahan pokok di pasaran selain mudah didapat dan harganya cukup terjangkau oleh masyarakat
- Sasaran Sampel pada saat wawancara lebih terbuka dan kooperatif dalam menjelaskan konsumsi Rumah Tangga setiap harinya.
- Kesadaran dan kemauan untuk memanfaatkan pekarangannya lebih terbuka terutama dengan banyaknya bantuan dan program yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, contohnya dana stimulant kelompok KRPL, pemberian bibit sayuran, buah dan pupuk.

Pemerintah daerah harus dapat menggenjot lagi pencapaian pada tahun mendatang. Tidak hanya mencapai target RPJMD tetapi jika



dimungkinkan dapat melebihi target dan mampu bersaing dengan daerah lain. Tabel dan gambar berikut menunjukkan capaian skor PPH tahun 2018.

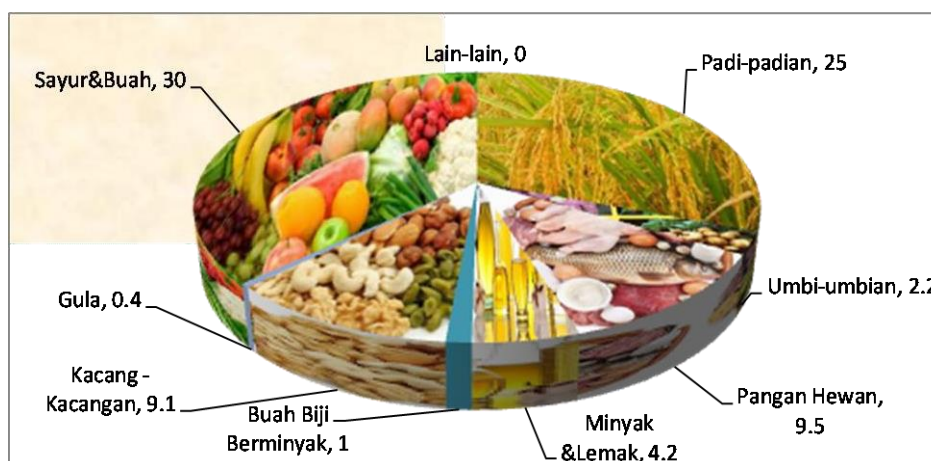
Tabel 3.27
Capaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2018		Persentasi
			Target RPJMD	Realisasi	
1.	Skor Pola Pangan Harapan	%	84	81,4	96,90
Capaian Kinerja Sasaran					96,90

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2019

Nilai skor PPH diperoleh dari survey yang dilaksanakan pada 7 Kecamatan yaitu Talaga Jaya, Bongomeme, Telaga Biru, Tabongo, Biluhu, Tilango dan Batudaa Pantai. Setiap Kecamatan dipilih 3 desa yang selanjutnya masing-masing Desa dipilih secara acak 10 rumah yang akan dijadikan sampel. Hasil Pembobotan diklasifikasikan dam 9 Kelompok pangan sebagaimana ilustrasi dalam pie chart berikut :

Grafik 3.21
Komposisi Skor PPH (gram/kapita/hari) Tahun 2018



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019



Sasaran Ke – 5 : Revitalisasi jalan, jembatan dan sungai

Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, jalan kondisi sedang, jalan kondisi rusak ringan, dan jalan kondisi rusak berat. Dalam rentang waktu 2016 – 2018 kondisi prasarana perhubungan berupa jalan di Kabupaten Gorontalo sudah baik dimana Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 523,81 Km dari total panjang jalan kabupaten 1578,91 Km atau 33 % namun masih terdapat jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 173,19 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 750,13 Km. Berikut adalah gambaran kinerja mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Gorontalo berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2017-2018.

Tabel 3.28
Evaluasi Pencapaian Sasaran Revitalisasi jalan

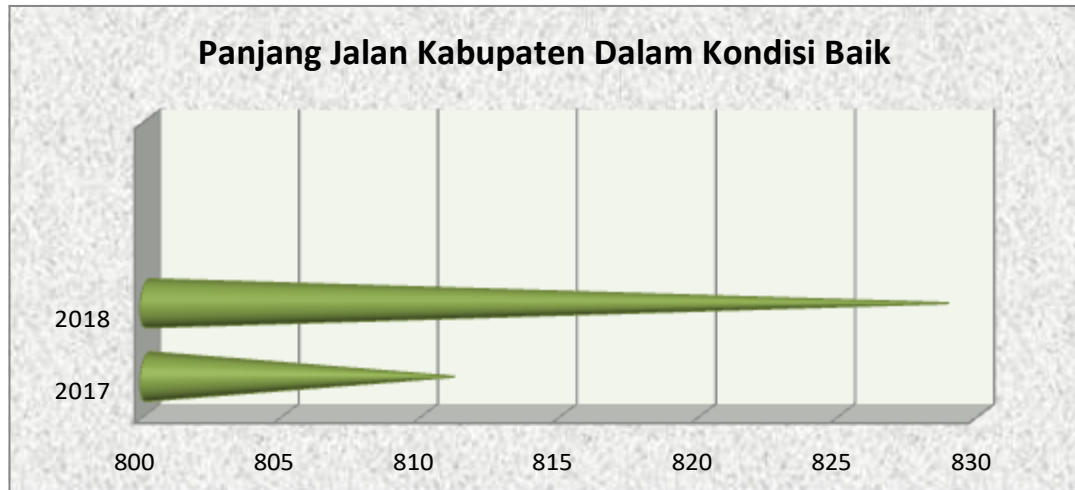
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
		Target RPJMD	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Panjang jalan kabupaten kondisi layak	725,64	811,02	112	759,21	828,78	109
Capaian Kinerja Sasaran				112			109

Sumber Data : Dinas PU, 2019

Berdasarkan tabel di atas indikator kinerjanya terlaksana dengan baik dan sangat signifikan karena gap target dan realisasi berada pada angka positif, capaian kinerja sebesar 109%. Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Organisasi Perangkat Daerah Dinas PU dan Tata Ruang berhasil menyelesaikan pemeliharaan jalan hingga melebihi target yang terencanakan.



GGrafik 3.22
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik



Sumber : Dinas PU, 2019

Infrastruktur yang terkait seperti jembatan, juga menjadi bagian dari kinerja sasaran revitalisasi jalan. Selama ini jembatan merupakan salah satu akses vital bagi masyarakat, Pada tahun 2018 telah dibangun jembatan 1 (Satu) buah di Kecamatan Batudaa Desa Dunggala. Dengan dibangunnya jembatan-jembatan, diharapkan dapat mempermudah akses transportasi masyarakat dari desa menuju kota. Jembatan yang sudah terbangun di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Jumlah Jembatan yang Terbangun Tahun 2013 – 2018

Indikator	Kondisi Awal (2010)	Realisasi					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah jembatan yang terbangun	23 Buah	6	21	7	3	3	1

Sumber : Dinas PU, 2019

Kondisi jembatan-jembatan yang dibangun selama ini masih dalam kondisi baik bila dipersentasekan ada sebesar 95,56% di tahun 2016 yang masih baik. Sampai dengan tahun 2018 capaian kinerja pemeliharaan jembatan sebesar 96.00%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tidak



melebihi Target RPJMD yang telah dipatok pada 97,27% jembatan dalam kewenangan pemerintah kabupaten Gorontalo harus dalam kondisi layak, sedangkan realisasinya hanya sebesar 98%. Hal ini disebabkan terlalu tinggi target yang ditetapkan.

Tabel 3.30
Kondisi Jembatan Tahun 2017 - 2018

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018		Persentase
		Target RPJMD	Realisasi	Target	Realisasi	
1	% jembatan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	94,22	95,56	97,27	96,00	98
Capaian Kinerja Sasaran						101,4

Sumber : Dinas PU, 2019

Infrastruktur yang terkait dengan sasaran ini adalah Irigasi. Irigasi menjadi infrastruktur utama dalam peningkatan pembangunan pertanian. Pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang ketahanan pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku, jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Sebagai daerah yang memiliki basis ekonomi pada pertanian, Kabupaten Gorontalo membutuhkan irigasi untuk pengairan.

Di tahun 2018 irigasi yang terbangun dan terpelihara adalah 9366 Hektar. Luas Irigasi yang dalam kewenangan pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dipelihara jika dipersentasekan hanya 42,3% yang bisa dimanfaatkan pada tahun 2017. Target RPJMD sebanyak 63,78%, terdapat gap yang cukup besar antara target dan realisasi. Kondisi ini kembali terulang di tahun 2018 dimana realisasinya hanya 46,42% dari target sebesar 72,09% sehingga kinerja yang dicapai hanya 64% ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas PU & Penataan Ruang serta Dinas Pertanian untuk berupaya lebih keras lagi untuk memastikan ketersediaan air bagi petani.



Tabel 3.31
Irigasi Yang dipelihara Tahun 2017 – 2018

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018		%
		Target RPJMD	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	% Irigasi kewenangan kabupaten yang terbangun dan dipelihara	63,78	47,3	72,09	46,42	64
Capaian Kinerja Sasaran						64

Sumber : Dinas PU, 2019

Sasaran Ke – 6 : Ketersediaan sarana air bersih dan minum

Dalam Pemenuhan Kebutuhan bagi Masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun iklim investasi yang baik maka Pemerintah menempatkan strategi Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan infrastruktur sebagai salah satu prioritas Utama dalam rencana Pembangunan jangka menengah yang diintegrasikan dengan kebijakan penyediaan dan pembangunan berbagai infrastruktur termasuk perumahan dan permukiman, Salah satu indikator dalam SPM bidang perumahan adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai, dimana PSU mensyaratkan ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan seperti Penyediaan sarana air bersih dan air minum yang layak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, mata air, air sumur dangkal dan air sumur dalam. Cakupan penduduk yang menggunakan air bersih sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 6,710%, sempat terjadi penurunan di tahun 2017, dengan cakupan 5,239% pencapaian tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 20,475%.

Pencapaian indikator kinerja perumahan dengan indikator Cakupan penduduk dengan akses air bersih sebagai berikut :



Grafik 3.23



Sumber : Dinas PU, 2019

Indikator utama yang terkait dengan kesetersediaan air bersih dan minum di satu wilayah adalah jumlah kepala keluarga yang terlayani oleh jaringan air bersih. Ukurannya adalah seberapa banyak KK yang terlayani oleh jaringan air bersih dibandingkan dengan jumlah total kepala keluarga di Kabupaten dan kemudian dihitung prosentasenya. Berdasarkan evaluasi atas capaian hasil sasaran ini, diperoleh informasi sebagaimana divisualisasikan pada tabel berikut :

Tabel 3.32
Evaluasi Pencapaian Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target RPJMD	Realisasi		Target RPJMD	Realisasi	
1.	Σ KK yang terakup oleh jaringan air bersih	KK	4.600	241	5.239	5.290	355	6.710
Capaian Kinerja Sasaran					5,239			6.710

Sumber Data : Dinas PU, 2019

Tabel di atas memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik dalam 2 tahun terakhir, realisasi di 2017 sebesar 241 KK naik menjadi sebesar 355 KK dengan capaian kinerjanya mencapai 6.710%. Kondisi



kinerja ini masih tergolong rendah penyebabnya adalah karena kondisi Faktor Ekonomi masyarakat yang masih rendah dan kultur masyarakat yang masih menggunakan Sumur Galian dan air sungai sebagai sumber air bersih. Rendahnya cakupan pelayanan air minum ini merupakan masalah mendesak yang harus segera diatasi. Secara operasional, ini merupakan refleksi dari pengelolaan yang kurang efisien, selain kurangnya pendanaan untuk pengembangan sistem yang ada. Perlu ada terobosan yang harus dilakukan terutama dalam rangka peningkatan kualitas dan cakupan layanan. Dalam rangka mengatasi persoalan pendanaan perlu dilakukan kemitraan antara pemerintah daerah dan stakeholder. Pemerintah daerah juga akan mendorong alternatif sumber pendanaan yang bisa berasal dari pemerintah melalui APBN, dan DAK, donor, serta pihak swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai stakeholder, diharapkan secara mandiri meningkatkan kualitas, dan cakupan pelayanan air minum berkesinambungan. Sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Air bersih di kemudian hari.

Sasaran Ke – 7 : *Ketercapaian perumahan dan sanitasi yang baik*

Sejak tahun anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah berkomitmen untuk lebih memperhatikan program pembangunan perumahan dan sanitasi ini sebagai upaya mempercepat pencapaian SPM Bidang Perumahan serta mengurangi target backlog rumah yang masih cukup besar. Dalam rangka pemenuhan urusan di bidang perumahan dan permukiman dan sanitasi dilakukan melalui program dan kegiatan yang didanai oleh DAU dan juga memanfaatkan alokasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sasaran ini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan yang harus diwujudkan, mengingat point ini merupakan salah satu agenda *Sustainability Development Goals*. Ukuran keberhasilan atas sasaran ini adalah menurunnya luasan kawasan kumuh. Kekumuhan wilayah ditimbulkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, sebagai akibat keterbatasan sarana



maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan, Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Dengan menyempitnya kawasan kumuh maka rumah berikut sanitasi di kawasan permukiman akan baik kondisinya. Gap kinerja pada indikator tersebut, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.33
Evaluasi Ketercapaian Perumahan dan Sanitasi Yang Baik

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Persentase	Tahun 2018		
			Target RPJMD	Realisasi		Target	Realisasi	Persentase
1	Penurunan luasan kawasan kumuh	Ha	120	116,34	103,1	117	118,4	101%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					103,1			101

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman, 2019

Tabel di atas menjelaskan bahwa luasan kawasan kumuh di Kabupaten Gorontalo berkurang, dari semula seluas 116,34 hektar di tahun 2018 menjadi seluas 118,4 hektar di tahun 2017. Ini seiring gencarnya aksi penuntasan kawasan kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kinerja Capaian penanganan kawasan kumuh yang telah kita laksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, adalah sebesar 101 persen. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan cara kolaborasi program kegiatan, baik secara reguler dari dana APBD pada Dinas Perumahan dan Permukiman, maupun dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), dimana untuk penanganan kawasan kumuh melalui program KOTAKU dilakukan melalui skala lingkungan dan skala kawasan. Untuk penanganan skala lingkungan dilaksanakan oleh Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM). Sedangkan penanganan kawasan kumuh untuk skala kawasan dilaksanakan dengan kontraktual. Adapun program KOTAKU tahun 2018 di Kecamatan Telaga dan Limboto.



Bupati Gorontalo meresmikan Perumahan Swadaya oleh Dinas Perumahan dan Permukiman

Sasaran Ke – 8 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas Rencana Tata Ruang

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kuantitas dan kualitas rencana tata ruang menjadi sasaran pembangunan kabupaten Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menetapkan sebagai sasaran pembangunan dengan ukuran kinerja yang jelas, agar proses pengendalian dan pengukurannya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Ada dua parameter yang dijadikan ukuran keberhasilan dalam menata ruang, yakni Rasio ruang terbuka hijau dan Jumlah dokumen RDTR yang berhasil disusun dan ditegakkan.

Indikator Rasio ruang terbuka hijau ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah tersebut.



Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk. Undang- Undang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang terbuka hijau (RTH), 20% RTH public dan 10% RTH privat. Keberadaan RTH menjadi sangat penting dalam perencanaan wilayah. Tanpa RTH, sebuah kawasan akan mengalami banyak kerugian. Pentingnya ruang terbuka hijau, dapat kita lihat dari fungsi dan manfaat yang dapat diambil darinya. Secara umum Ruang Terbuka Hijau mempunyai atau memiliki fungsi utama (intrinsik) yakni fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Dokumen RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu, alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat. Performance gap kedua indikator tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.34
Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatkan kuantitas dan
Kualitas Rencana Tata Ruang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2017		Persentase	TAHUN 2018		Persentase
			Target RPJMD	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rasio ruang terbuka hijau	Ha	38,41	29,37	76,46%	39,41	32,37	82%
2	Jumlah dokumen RDTR	Bh	1	1	100%	1	0	0%

Sumber : Dinas PU, 2019 dan DLH, 2019

Berdasarkan tabel diatas pada bahwa dari 2 indikator kinerja hanya satu indikator saja yang terlaksana :

Rasio ruang terbuka hijau; Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2016 telah mengupayakan ketersediaan RTH mencapai 100% atau sekitar 37,31 Ha, namun pada tahun 2017 ketersediaan RTH mencapai



76,46% atau sekitar 29,37 Ha sehingga menurun dan belum mencapai target. Namun pada tahun 2018 ketersediaan RTH mencapai 82% atau sekitar 32,37 Ha, walaupun belum mencapai target 100% namun Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lahan dengan cara menambah kualitas Ruang Terbuka Hijau, tujuannya agar Ruang Terbuka Hijau dapat memberikan dampak kesehatan bagi warga. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gorontalo berhasil membangun 1 (satu) Ruang Terbuka Hijau dengan dana APBD dan di tahun yang sama juga berhasil diselesaikan 1 (satu) Ruang Terbuka Hijau dengan memanfaatkan anggaran APBD Provinsi Gorontalo, dan pada tahun 2018 pemerintah kembali membangun RTH di beberapa tempat, seperti di Taman Rumah Adat Banthayo Poboide, Taman Kantor Bupati Gorontalo, Taman Menara Keagungan Limboto.



Taman Budaya Limboto

Jumlah dokumen RDTR; Pada tahun 2017 telah dilaksanakan perencanaan tata ruang atau RDTR yaitu 1 (satu) kecamatan yakni Kecamatan Limboto, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan capaian 100%. Namun capaian kinerja dengan indikator jumlah dokumen RDTR di tahun 2018 dengan target 1 dokumen dan realisasi 0



dokumen dengan capaian 0%. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 tidak di anggarkan perencanaan tata ruang atau RDTR sehingga kecamatan yang memiliki dokumen RDTR sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Olehnya jumlah kecamatan yang memiliki dokumen RDTR sampai dengan Tahun 2018 masih tetap sebanyak 4 (empat) kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Dengan pencapaian Indikator ini diharapkan memberikan arah dalam pemanfaatan ruang, juga merupakan arahan dalam investasi, dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, sehingga diharapkan dengan tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang ini bisa lebih mengarahkan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan daya tampung dan daya dukung dari kawasan.

MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Sasaran Ke – 1 : Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang seolah tidak pernah hilang dan senantiasa menjadi perhatian pemerintah di wilayah manapun di negeri ini. Selama kurun waktu 2010-2015 beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menanggulangi persoalan kemiskinan antara lain dengan mengoptimalkan peran Lurah dan Kepala Desa sebagai bagian dari Kontrak Kinerjanya, disamping adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pembina Desa yang menjadi mitra pemerintah desa dalam menyampaikan setiap perkembangan upaya penanggulangan kemiskinan. Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah menjadikan penanganan kemiskinan sebagai pekerjaan bersama yang tidak semata diserahkan tanggung jawab dan perhatiannya kepada instansi terkait. Upaya lain yang dilakukan adalah memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Sosial, Pembangunan Rumah Layak Huni, Bantuan Modal Usaha KUBE, melalui Program Nasional



Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPM-GSC), PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), dan PNPM Integrasi yang berakhir pada tahun 2014 lalu. Program PNPM telah menyelesaikan pembangunan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana di pedesaan dan telah menyalurkan banyak bantuan bagi masyarakat miskin. Pembangunan fisik seperti mahyani, MCK, jalan desa, pembangunan gedung TK, gedung TPA, gedung polindes/posyandu, pembangunan jembatan gantung, dan sarana air bersih, juga bantuan beasiswa, pemberian baju seragam sekolah, pemberian makanan tambahan bagi bayi dan balita, pemberian susu bagi bayi, balita dan ibu hamil, dan bantuan simpan pinjam kelompok perempuan. Selain itu pula pemberdayaan Usaha Kecil Menengah atau UMK melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan permodalan lainnya juga menjadi salah satu langkah yang dilakukan. Upaya lainnya adalah dengan mendorong tumbuhnya aktifitas industri dengan menolkan beberapa target pajak dan retribusi daerah, sampai dengan akhir tahun 2014 sektor industri mampu menyerap tenaga kerja +8.875 orang dengan nilai investasi sebesar Rp. 47.047.871.000. Tenaga kerja ini menempati 2960 unit usaha dengan berbagai jenis aktifitas industri seperti pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam, elektronika dan kerajinan.

Tabel 3.35
Evaluasi Pencapaian Sasaran Penurunan Angka Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Persentasi
			Target RPJMD	Realisasi	
1	Persentasi Penduduk miskin	%	18,76	19,84	94,56
2	Persentasi APBD untuk penanggulangan kemiskinan	%	11,50	84,4	73,39
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,73	3,27	87,67
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					85,21

Sumber : Dinas Sosial Kab. Gorontalo, BPS 2018

Bahwa untuk pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah memerlukan biaya yang besar.



Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Realisasi yang tercapai pada tahun 2018 mencapai 3,27% masih di atas target yang ditetapkan RPJMD 3,73% sehingga menjadi salah satu kontributor kemiskinan. Hal ini terjadi karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dan masih rendahnya kualitas pencari kerja sehingga kurang competitive dalam bursa pekerjaan.

Hal ini menggambarkan upaya Pemerintah Daerah dalam pengurangan pengangguran berjalan dengan baik dengan cara meningkatkan atau memperluas kesempatan kerja maupun menurunkan jumlah angkatan kerja. Kinerja indikator pendukung pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.36
Capaian Indikator Capaian Kemiskinan Lainnya

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase penduduk miskin	21,57%	21,05%	21,03%	20,55%	19.84
2.	Garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	323.578	343.373	368.863	382.722	409.179
3.	Tingkat pengangguran terbuka	3.89	3.62	3,62	3,85	3,73

Sumber :BPS Gorontalo 2018

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo relatif menurun dari tahun 2014 sebesar 21,57 % menjadi 19,84% pada tahun 2018. Tetapi capaian ini masih di atas dari target RPJMD. Beberapa faktor telah menjadi pendorong besarnya angka kemiskinan, antara lain naiknya harga bahan bakar minyak yang diikuti naiknya beberapa harga komoditas utama yang dikonsumsi warga masyarakat menjadi lebih tinggi. Kenaikan harga komoditas ini ikut memicu naiknya inflasi yang sudah tentu semakin melemahkan daya beli masyarakat dan bagi masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan (hampir miskin dan rentan miskin) akan mudah tertarik ke bawah garis kemiskinan.



Upaya pemerintah yang dilakukan untuk mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat antara lain melalui program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, pemberian stimulan, pendampingan usaha, pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan serta pelayanan dasar, memberikan sistem proteksi kepada warga miskin dan perlindungan sosial sudah banyak dilakukan namun tentu bukan tanpa kendala, program lintas sektoral dari pemerintah yang belum terintegrasi pelayanannya dan cenderung bersifat parsial masih menjadi persoalan, disamping itu program-program pemberdayaan yang dilaksanakan masih lemah dalam hal pendampingan dan keberlanjutannya.

Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Meningkatnya tingkat pendapatan rata-rata tidak dapat memberikan dampak yang lebih besar jika pendapatan tersebut tidak dapat terdistribusi lebih merata. Pembangunan di Kabupaten Gorontalo hendaknya diarahkan pada upaya di mana program dan kegiatan pemerintah harus ditujukan untuk mensasar pertumbuhan ekonomi dan juga sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

Tingginya angka pengangguran telah menciptakan angka kemiskinan, karena itu perlu upaya yang serius dari semua pihak untuk mendorong penciptaan peluang-peluang kerja.

Sasaran Ke – 2 : *Pengendalian Penduduk*

Tabel 3.37
Evaluasi Pencapaian Sasaran Pengendalian Penduduk

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Persentasi
			Target RPJMD	Realisasi	
1	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	65.25	80,33	123,11
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.31	3,359	145.41
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					134.26

Sumber Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB, 2018



Berdasarkan tabel di atas pada Misi 4 dengan tujuan Integrasi Kependudukan dengan Kebijakan Pembangunan dalam rangka pengendalian penduduk dapat dilihat bahwa dari 2 indikator kinerja keduanya terlaksana dengan sangat baik :

Indikator Kinerja Contraceptive Prevalence Rate (CPR); Realisasi yang tercapai pada tahun 2018 mencapai 80,33% melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD 65.25 % terjadi peningkatan, jika dibandingkan realisasi tahun 2017 yaitu 80.84 %, maka terjadi penurunan sebesar 0,51%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak dibarengi dengan kepesertaan jumlah PUS yang ber KB. Meskipun telah ditempuh hal-hal yang dilakukan untuk peningkatan kepesertaan ber-KB yaitu telah dilaksanakan advokasi dan KIE secara keseluruhan kepada PUS pada tingkat lini lapangan dan telah menyediakan sarana prasarana yang memadai berupa alat peraga advokasi dan KIE, namun yang menjadi hambatan pada saat melakukan pelayanan yaitu keterbatasan ketersediaan obat kontrasepsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan obat kontrasepsi adalah menjadi kewenangan pusat, dimana bahwa perhitungan untuk ketersediaan obat kontrasepsi ke Kabupaten/Kota hanya berdasarkan target Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) pada kepesertaan KB Baru, sehingga target peserta KB Aktif hampir tidak akan terlayani dengan obat kontrasepsi. Akan tetapi yang sangat memberikan kontribusi terhadap pengendalian jumlah penduduk adalah besarnya minat Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap pemakaian obat kontrasepsi.

Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR); Realisasi yang tercapai pada tahun 2018 mencapai 3,359 tidak mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 2,31. Angka TFR di Kabupaten Gorontalo 3,359 artinya bahwa setiap wanita yang berusia 15-49 tahun di Kabupaten Gorontalo rata- rata memiliki tiga orang anak, bahkan ada yang memiliki lebih dari tiga anak.



Hal ini dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran pada perempuan usia 15 – 19 tahun, dimana bahwa tingginya angka kelahiran dimaksud disebabkan oleh karena belum terdapatnya kelompok PIK-KRR yang secara maksimal melakukan konseling kepada teman sebayanya arti program GENRE (Generasi Berencana) yang dimulai dari perencanaan pendidikan, karir dan pernikahan. Begitu juga dengan Kelompok BKR, masih belum maksimal memainkan peran dalam pencegahan pernikahan dini, walaupun advokasi dan KIE tentang pendewasaan usia pernikahan telah dilakukan oleh para PLKB yang berada di tingkat lini lapangan. Berikut ini dapat disajikan kinerja sasaran 2 dari tahun 2012-2016. Kinerja Indikator pendukung sepanjang tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.38
Capaian Indikator Sasaran Pengendalian Penduduk Lainnya

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Peserta Akseptor KB	77.465	63.771	60.100	58.508	60.053
Jumlah pasangan usia subur	65.837	75.482	76.436	72.348	74.756

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari tabel di atas bahwa peserta akseptor KB dan pasangan usia subur setiap tahun mengalami penurunan dari Tahun 2014 – 2017. Dari tahun 2014 jumlah peserta Akseptor KB sejumlah 77.465 namun tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 58.508 atau menurun 18.957 (32.40 %) dan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 60.053 atau naik sebesar 1.545 (2.57 %) dibandingkan tahun 2017. Kenaikan dan penurunan tersebut secara langsung mempengaruhi persentase Peserta KB Aktif (CPR) pada tabel tersebut di atas.

Hal ini karena adanya dukungan masyarakat untuk menjadi peserta akseptor KB yang rata-rata berasal dari pasangan usia subur. Dalam kurun waktu itu telah dilaksanakan program-program pelayanan kontrasepsi yang bertujuan pemberian dukungan dan pemantapan penerimaan gagasan KB sehingga diharapkan adanya penurunan angka kelahiran bermakna.



beberapa kegiatan yang telah direalisasikan, adalah Peningkatan akses dan kualitas informasi serta Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dengan multi basis kampus, sekolah, pramuka dan mesjid. Sampai dengan tahun 2014 sebanyak 40 kelompok, telah terbentuk 27 Kelompok Pelajar/Siswa, 2 Kelompok mahasiswa, 11 kelompok dari organisasi kepemudaan yang melaksanakan pembinaan melalui kegiatan OSIS. Peningkatan kualitas terhadap kelompok PIK-KRR melalui Lomba PIK-KRR. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja telah dilaksanakan di 19 Kecamatan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan PIK Remaja kerjasama dengan Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan yang berada di sekolah-sekolah guna mensosialisasikan GenRe (generasi berencana) dengan tujuan untuk meminimalisir HIV AIDS, sex bebas dan narkoba serta kekerasan terhadap anak.

Sasaran Ke – 3 : Pengarustamaan Gender dan Perlindungan anak



Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo pada akhir tahun 2017 berjumlah 375.299 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 49,59% penduduk laki-laki dan 50,41% penduduk perempuan.

Pemberdayaan Perempuan dalam upaya peningkatan peran perempuan untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses, kontrol, manfaat, terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur dan meningkatkan kualitas diri.

Tujuan dari pemberdayaan perempuan antara lain: mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sedangkan perlindungan anak



adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya (UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.

Tabel 3.39
Evaluasi Pencapaian Sasaran Pengarusutamaan Gender
dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Persentase
			Target RPJMD	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Gender	%	85	52,73	62,03
2	Rasio KDRT terhadap Jumlah RT	Rasio	0,61	0,034	0,055
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					62,085

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA, BPS 2016

Berdasarkan table diatas pada Misi 4 dengan tujuan integrasi Kependudukan dengan Kebijakan Pembangunan dalam rangka Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan anak dapat dilihat bahwa dari 2 indikator kinerja keduanya terlaksana dengan baik.

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender; Realisasi yang tercapai pada tahun 2017 hanya mencapai 79,41% dibawah dari target yang ditetapkan RPJMD 83%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu 79,23%, maka terjadi peningkatan yakni sebesar 0,18 poin. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender sudah baik, namun belum sesuai harapan.



Indikator Kinerja Rasio KDRT terhadap Jumlah Rumah Tangga;

Realisasi yang tercapai pada tahun 2017 mencapai 0,26 % dibawah target yang ditetapkan RPJMD 0,63. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, yaitu 0,45%, maka terjadi penurunan sebesar 0,19 poin. Penurunan yang sangat fantastis ini antara lain disebabkan oleh :

1. Kabupaten Gorontalo telah dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga Gemilang) pada Tahun 2017. Puspaga tersebut adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik untuk anak, termasuk perlindungan dan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Puspaga ini fokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan konseling oleh tenaga Psikolog.
2. Adanya kegiatan sosialisasi serta penyuluhan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan TP. PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan
3. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku baik dalam Rumah Tangga.
4. 19 Kecamatan di Kabupaten Gorontalo telah di bentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Satgas). Tim Satgas ini bertugas untuk mencegah dan memediasi kasus-kasus KDRT, oleh sebab itu hal yang sangat mendasar penyebab penurunan kasus KDRT, dan beberapa kasus KDRT tidak semua dilaporkan. Penyebab ditutupinya kasus ini oleh korban lebih pada masalah nilai – nilai sosial. Sebagian masyarakat masih menganggap tabu mengangkat masalah Rumah Tangga ke pihak berwajib sehingga



memutuskan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, atau berakhir pada perceraian.

Sasaran Ke – 4 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan

Dalam proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan, penduduk tidak dapat hanya dilihat sebagai obyek, tetapi juga diperlakukan sebagai subyek yang harus dibina dan dikerahkan secara efektif, sehingga benar-benar menjadi modal yang besar dan menguntungkan bagi proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka pembinaan dan pengarahan penduduk secara efektif, maka diperlukan data penduduk yang valid dan lengkap cakupannya. Data penduduk yang valid adalah data penduduk yang secara riil menggambarkan salah satunya dalam bentuk kepemilikan dokumen kependudukan.

Tabel 3.40

Evaluasi Pencapaian Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan untuk Memenuhi Kepentingan Publik dan Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Persentase
			Target RPJMD	Realisasi	
1	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	80	30	37,5
2	Cakupan KTP-el yang diterbitkan	%	88,55	96	108.41
3	Cakupan Akta Kelahiran yang diterbitkan	%	83	88	106,02
4	Cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	%	82	91.1	111,22
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					90,79

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : **Indikator Kinerja Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak** ; Realisasi yang tercapai pada tahun 2018 hanya 30 % terjadi penurunan sebesar 62,50% dari target RPJMD 80%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu 15,77%

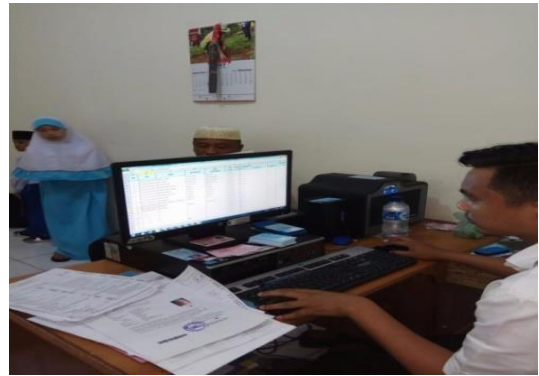


dengan target RPJMD 55%, maka terjadi peningkatan sebesar 8,83%. Hal ini mengindikasikan bahwa pendataan serta pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga belum optimal dan program ini baru dimulai akhir tahun 2018. Indikator ini ditargetkan 36 kali setahun atau 2 kali untuk setiap kecamatan yakni sekali pada setiap semester dan untuk semester 1 pelayanan keliling ini baru terlaksana 12 kali sehingga persentase capaian mencapai 31,58% namun pada semester 2 mencapai 28 kali sehingga total 40 kali atau mencapai 111,11%.

Indikator Kinerja Jumlah KTP-el Yang diterbitkan; Realisasi yang tercapai pada tahun 2018 mencapai 96% lebih dari target yang ditetapkan RPJMD 88,55% terjadi peningkatan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu 90,17%, maka terjadi peningkatan sebesar 5,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mendapatkan KTP semakin baik.

Indikator Kinerja Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan; Realisasi yang tercapai pada tahun 2018 mencapai 88 % diatas dari target yang ditetapkan RPJMD 83%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu 84,03%, maka terjadi peningkatan sebesar 1,03%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran semakin baik.

Indikator Kinerja Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan; Realisasi yang tercapai pada tahun 2018 mencapai 91.1% diatas dari target yang ditetapkan RPJMD 82%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu 76%, maka terjadi peningkatan sebesar 15%. Hal ini disebabkan karena penduduk sudah memiliki Kartu Keluarga.



Sasaran Ke – 5 : *Peningkatan Kualitas Baku Lingkungan Hidup*

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hanya akan berhasil baik jika bertumpu pada pengembangan sains dan teknologi, sehingga penerapan teknologi pada masyarakat tidak semata-mata teknologi eksploitasi, melainkan juga teknologi yang mampu mengarahkan perencanaan dan pengelolaan lingkungan dan sekaligus memberikan koreksi terhadap ketimpangan daur ekosistem yang selama ini terjadi.

Pengelolaan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan mutu kehidupan manusia tanpa merusak lingkungan pada masa sekarang dan masa yang akan datang sangat diperlukan. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam harus bijaksana dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat sepanjang masa. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dalam mengolah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya alam.
- (2) Lokasi sumber daya alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
- (3) Penggunaan hasil sumber daya alam agar tidak boros.
- (4) Dampak negatif pengolahan yang berupa limbah dipecahkan secara bijaksana, termasuk pembuangannya. Apakah ke dalam tanah, ke dalam sungai, ke udara, limbah buangan harus sudah dinetralisir sehingga tidak mencemari lingkungan hidup.



Untuk menjaga kualitas lingkungan digunakan indikator Persentase Penanganan sampah dan Tingkat Kualitas Air sungai.

Tabel 3.41
Evaluasi Pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Baku Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Persentas
			Target RPJMD	Realisasi	
1	Persentasi penanganan Sampah	%	100	60.48	60.48
2	Tingkat Kualitas Air Sungai	BOD;	BOD ≤ 3 mg/liter	BOD ≤ 3 mg/liter	100
		COD	COD ≤ 25 mg/liter	COD ≤ 25 mg/liter	100
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				100

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel diatas pada Misi 4 dengan tujuan Penciptaan Lingkungan yang Lestari dalam rangka Peningkatan Kualitas Baku Lingkungan Hidup dapat dilihat bahwa dari 2 indikator kinerja keduanya terlaksana dengan baik:

Indikator Kinerja Persentasi Penanganan Sampah ; Realisasi yang tercapai pada tahun 2018 hanya mencapai 60.48 % tidak mencapai target yang ditetapkan RPJMD 100% dan realisasinya meningkat dari tahun 2017 yaitu 17,49%. Kenaikan tingkat capaian penanganan sampah ini ditunjang oleh penambahan ritasi pengangkutan sampah oleh armada angkutan sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo serta bertambahnya jumlah Bank Sampah baik di sekolah maupun desa sebagai sarana pengelolaan sampah. Pada tahun 2017, ritasi pengangkutan sampah hanya 1 x sehari, sedangkan pada tahun 2018, ritasi dinaikkan menjadi 2 x sehari. Sedangkan untuk Bank Sampah, dari 8 Bank Sampah menjadi 52 Bank Sampah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah semakin baik dengan pola penanganan yang mengacu pada *Master Plan Persampahan* yang sudah ada.

Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Air Sungai; Realisasi yang tercapai pada tahun 2018 mencapai 100% untuk BOD dan COD masih sama



dengan target yang ditetapkan RPJMD yaitu BOD mencapai 3 mg/liter dan COD mencapai 25 mg/liter. Dan realisasinya sama dengan tahun 2017 dimana $BOD \leq 3$ mg/liter dan $COD \leq 25$ mg/liter. Dengan kata lain bahwa tidak terjadi kasus pencemaran air oleh usaha dan/atau kegiatan berdampak lingkungan sehingga kualitas air sungai di Kabupaten Gorontalo masih memenuhi persyaratan sesuai Nilai Baku Mutu kelas II berdasarkan Kriteria Mutu Air menurut Peraturan Menteri LH Nomor 82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Sasaran 6 : Meningkatnya Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari pola responsif tanggap darurat menjadi upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Melihat wilayah Kabupaten Gorontalo sebagai wilayah rawan bencana maka salah satu upaya yang harus dikedepankan adalah meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Tabel 3.42

Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penanggulangan
Bencana Pada Tahap Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Persentasi
			Target RPJMD	Realisasi	
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	16,44	10,53	64.05
2	Indeks resiko bencana	indeks	130	146.4	112.61
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					90,85

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kab. Gorontalo, 2018



Berdasarkan tabel diatas pada Misi 4 dengan tujuan Penciptaan Lingkungan yang Lestari dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dapat dijelaskan dari 2 indikator kinerja sebagai berikut :

Realisasi kinerja indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2018 adalah sebesar 64,05% atau dari target 25 % terealisasi 10,53% yakni terbentuknya 2 (dua) WMK yakni WMK Limboto Cs dan WMK Boliyohuto Cs dari target 4 WMK yang harus terbentuk tahun 2018. Dengan demikian capaian kinerjanya tidak sesuai target. Hal ini disebabkan oleh Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km² atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km² atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km² atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK. Target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 adalah sebesar 80% (delapan puluh persen). Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah potensi kebakaran sekitar 2.151 Km² atau 215.100 Ha, idealnya memiliki 19 WMK diberbagai jenis tipologi kebakaran. Tahun 2018 Kabupaten Gorontalo baru terbentuk 2 (dua) WMK, maka cakupan penanggulangan bencana kebakaran yang dicapai yakni : $\frac{2}{19} \text{ WMK} \times 100\% = 10,5\%$ masih ada kesenjangan sebesar 69,5 %.

Merujuk pada tabel di atas, untuk Indikator Kinerja Indeks Resiko Bencana Kabupaten Gorontalo tahun 2018 ditargetkan dari 130 naik menjadi 146,4 atau sebesar 112, 61% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pada hakikatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat dan daerah, jika berpedoman pada dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019 adalah menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen



dalam penurunan indeks risiko bencana, maka target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah komponen *coping capacities* dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun (2015-2019). Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2018 yakni 146,4 dalam kategori tinggi. Ini termasuk dalam 136 kabupaten/kota yang menjadi prioritas nasional dalam penurunan indeks risiko bencana.

Merujuk pada tabel diatas, pada hakikatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat dan daerah, jika berpedoman pada dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019 adalah menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah komponen *coping capacities* dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun (2015-2019). Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2018 yakni 146,4 dalam kategori tinggi. Ini termasuk dalam 136 kabupaten/kota yang menjadi prioritas nasional dalam penurunan indeks risiko bencana.

Target indikator indeks risiko bencana kabupaten Gorontalo tahun 2018 yakni dari 146,4 turun menjadi 120, namun realisasi sampai dengan akhir tahun 2018 belum ada rilis resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).





MISI 5 : Melakukan Kerjasama Global Untuk Pembangunan Daerah

Sasaran Ke – 1 : Terlaksananya Kemitraan Antar Daerah, dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen

Kemitraan antar daerah, dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah bersama, pertukaran informasi, mengidentifikasi dan pertukaran teknologi atau sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas daerah, pembuatan strategi atau program bersama dan bahkan pembuatan kebijakan, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Gorontalo.

Dalam mencapai sasaran strategis ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengidentifikasikan 5 (lima) indikator yang didalamnya terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan pada tabel berikut :

Tabel 3.43
Evaluasi Pencapaian Sasaran Kemitraan Antar Daerah,
Dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Σ Lembaga Kementerian dan Non Departemen yang bekerja sama dengan Pemda	19	20	105,26
2.	Σ Kerja sama Kementerian dan Non Departemen yang ditindaklanjuti (IKU)	19	34	178,94
3.	Σ Inisiasi Kerjasama Luar Negeri bernilai manfaat bagi pemerintah daerah (IKU)	5	2	40
4.	Σ Inisiasi Kerjasama Antar Daerah	9	2	22,22
5.	Σ MoU/MoA antar daerah di tindak lanjuti	19	4	21,05

Sumber Data : Bagian Kerjasama Global Setda Kab. Gorontalo, 2018



Pada tahun 2018 Jumlah lembaga Kementerian dan Non Departemen yang bekerja sama dengan pemerintah daerah menargetkan sebanyak 19 lembaga dan terealisasi yakni ada 20 lembaga dengan kinerja sebesar 105,26%. Sedangkan kerjasama kementerian dan non departemen yang ditindaklanjuti (IKU) dengan target 19 lembaga direalisasikan ada 34 lembaga dengan kinerja sebesar 178,94%. Target inisiasi kerja sama luar negeri bernilai manfaat bagi Pemerintah Daerah adalah berjumlah 5 kerjasama dengan realisasi 2 bentuk kerjasama yaitu dengan negara Perancis dan Jepang dengan kinerja sebesar 40 %. Target inisiasi kerjasama antar daerah adalah 9 kerjasama namun yang terealisasi hanya 2 kerjasama. Kerjasama antar daerah yang ditandai dengan penandatanganan MOU/MOA dengan target 19 dan realisasi hanya 4 MOU/MOA dengan kinerja sebesar 21,05%. Melihat pencapaian di tahun 2018 terdapat peningkatan terutama dari sisi implementasi kerjasama Kementerian dan Non Departemen yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dimana kinerjanya melampaui target dengan capaian sebesar 105,26%. Beberapa indikator masih perlu didorong terutama indikator yang belum mencapai target. Sebagai perbandingan realisasi 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.44
Evaluasi Pencapaian Sasaran Kemitraan antar daerah,
dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Σ Lembaga Kementerian dan Non Departemen yang bekerja sama dengan Pemda	18 Lembaga	32	177,77
2.	Σ Kerja sama Kementerian dan Non Departemen yang ditindaklanjuti (IKU)	18 Lembaga	15	83,33
3.	Σ Inisiasi Kerjasama Luar Negeri bernilai manfaat bagi pemerintah daerah (IKU)	4 Kerjasama	4	100
4.	Σ Inisiasi Kerjasama Antar Daerah	7 Kerjasama	5	71,43
5.	Σ MOU/MOA antar daerah di tindak lanjuti	17 Kerjasama	16	94,12

Sumber Data : Bagian Kerjasama Global Setda Kab. Gorontalo Tahun 2018



Sasaran Ke – 2 : Peningkatan Kontribusi Sektor Swasta dan Lembaga Donor Terhadap Pembangunan Daerah

Fokus sasaran ini adalah pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memperbaiki iklim usaha agar lebih kondusif, peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan strategi pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendukung kegiatan ekonomi. Hasil akhirnya diharapkan dapat menjadi pendorong bagi percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pencapaian strategi ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengidentifikasi indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian ditabulasikan pada tabel berikut :

Tabel 3.45

Evaluasi Pencapaian Sasaran Peningkatan Kontribusi Sektor Swasta dan Lembaga Donor Terhadap Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	75%	55%	73%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

Pencapaian Kinerja pada Indikator Pertumbuhan nilai Investasi PMA/PMD sebesar Tahun 2018 yang mencapai 73% sama dengan tahun 2017, dengan capaian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo perlu kerja lebih keras lagi untuk mendorong dan memperbaiki iklim investasi, hal ini disebabkan Pemda harus memastikan bahwa daerah ini menjadi lahan investasi yang memikat. Peluang-peluang investasi di daerah harus dibuka, sehingga meyakinkan investor swasta maupun asing untuk menanamkan investasi di daerah ini.

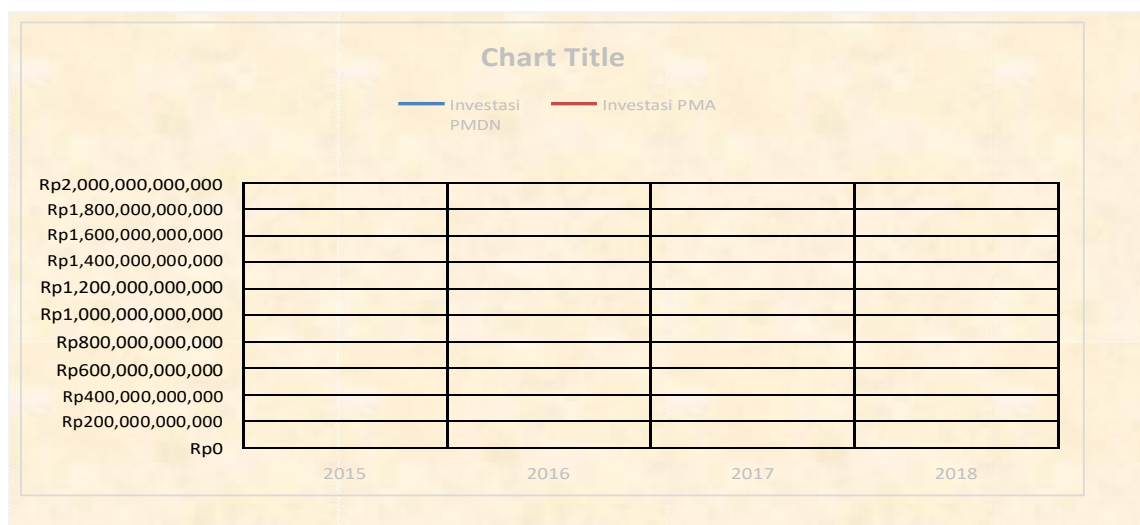


Tabel 3.46
Trend Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN

Investasi	2015	2016	2017	2018
Jumlah Investasi PMDN	379,586,620,713	379,586,620,713	-	1.813.077.639.224
Jumlah Investasi PMA	-	810,255,042,536	1.129.579.752.536	319.324.710.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Grafik 3.24
Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Dapat dijelaskan dari tabel diatas jumlah investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Gorontalo terjadi peningkatan, setelah tidak terdapat nilai realisasi untuk PMDN di Tahun 2017, data yang dihimpun dari BPM-PTSP memperlihatkan bahwa di tahun 2018 terdapat nilai realisasi untuk PMDN 1.813.077.639.224. Selama tahun 2018 telah banyak perusahaan perseorangan maupun Badan Usaha dari berbagai jenis bidang.

Berikut Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang berasal dari beberapa perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Gorontalo selama 4 tahun terakhir.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

Tabel. 3.47
Data Perkembangan Realisasi Investasi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

NO	NAMA PERUSAHAAN	Bidang Usaha	Lokasi	REALISASI INVESTASI			
				2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	PT. Gorontalo Citra Lestari	Hutan Tanaman Industri	Kab. Gorontalo	21.147.010.000	58.884.686.000	91.363.738.525	95.931.925.451
2	PT. Harvest Gorontalo Indonesia (HGI)	Industi Jamu Herbal	Kec. Telaga Biru	7.592.460.563	76.128.890.434	76.128.890.434	79.935.334.955
3	PT. Hasrat Abadi	Show Room Mobil Toyota	Kec. Telaga Biru	14.223.000.000	14.223.000.000	14.223.000.000	14.934.150.000
4	PT. Arba Mitra Abadi	Pengisian gas Elpiji	Kec. Tilango	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	11.125.000.000
5	PT. Reski Laifasto	Distributor Farmasi	Kec. Telaga	2.020.000.000	2.020.000.000	2.020.000.000	2.121.000.000
6	PT. Trijaya Tangguh	Pabrik Tepung Kelapa	Kec. Boliyohuto	18.360.000.000	18.360.000.000	74.413.000.000	78.133.550.000
7	PT. PLN (Persero)	PLT. Biomas	Kec. Pulubala	10.332.384.461	10.332.384.461	10.332.384.461	10.892.001.684
8	PT. Mira Cahaya Gas	Agen Elpiji 3 Kg	Kec. Limboto	1.455.000.000	1.455.000.000	1.455.000.000	1.498.650.000
9	PT. Heksa Jaya Abadi	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Gorontalo	17.475.547.178	40.084.433.018	50.400.745.969	52.920.783.267
10	PT. Agro Palma Katulistiwa	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Gorontalo	3.998.781.926	14.861.045.820	21.614.555.141	22.695.282.898
11	PT. Tri Palma Nusantara	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Gorontalo	3.664.518.355	15.580.657.054	25.135.306.183	26.392.071.492
Jumlah Realisasi Investasi PMDN Non Fasilitas				112.768.702.483	264.430.096.787	379.586.620.713	396.536.749.747

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Untuk jumlah investasi penanaman modal asing (PMA) Tahun 2018 sebesar Rp. 396.536.749.747 meningkat menjadi sebesar Rp. 396.536.749.747 di Tahun 2017 terdapat penurunan 139%, atau sebesar Rp. 379.586.620.713. Berikut Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri yang berasal dari beberapa perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.48
Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) s.d 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	ASAL NEGARA	BIDANG USAHA	INVESTASI				
				RENCANA		REALISASI		
						DOLLAR (\$)		RUPIAH
1	PT. Pabrik Gula Gorontalo	Inggris	Industri Gula	\$	60.000.000	\$	57.615.800,53	Rp 754.766.980.450
		Indonesia						
2	PT. Harim	Korea	Industri	\$	2.060.000	\$	2.898.461,53	Rp 37.969.846.043



	Farmsco Indonesia		Pengeringan Jagung					
3	PT. Harim Farmsco Indonesia	Korea	Peternakan Ayam Petelur	\$	1.076.923	\$	838.461,53	Rp 10.983.846.043
4	PT. INDI INVENT METALS (PT. INDO INVENT)		- Pabrik Tembaga	\$	10.500.000	\$	3.600	RP 47.160.000
			- Gudang Penampungan Material Batuan					
5	PT. Multi Mineral Explorasi					\$	439.845,80	Rp 5.761.980.000
6.	PT. Gunung Mulia Mineral		Pertambangan Biji logam lainnya			\$	5.336.107	Rp 725.230.000
7.	PT. Quantum Solar Gorontalo		Pembangkit Listrik Tenaga Surya					Rp. 319.324.710.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

B. REALISASI ANGGARAN

Bentuk rencana keuangan yang berisikan besaran sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam periode tertentu. Anggaran mencerminkan keputusan-keputusan yang diambil oleh sebuah pemerintahan terkait prioritas pembangunan daerah. Berikut adalah ulasan alokasi belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis daerah :

1. Terpenuhinya Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas

Untuk menunjang pencapaian sasaran terpenuhinya layanan pendidikan dasar berkualitas Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran belanja untuk membiayai 6 program utama sebesar Rp. 18,153,300,725,- dalam bentuk peningkatan kualitas tenaga pendidik, akreditasi sekolah, serta peningkatan kompetensi siswa. Dari anggaran yang ada pada tahun 2018 berhasil direalisasikan sebesar Rp. 15,856,886,471,- atau 83,63 %. Jika dibandingkan kondisi tahun lalu 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai Kondisi ini disebabkan meningkatnya alokasi dana pada beberapa program kegiatan.



Tabel 3.49
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Terpenuhinya Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,961,864,500.	841,434,845.	(1.120.429.655.)	42.89	776,389,445.
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	12,290,140,068.	11,564,355,289.	(725.784.799.)	94.09	6,181,259,022.
3	Program Pendidikan Non Formal	175,112,100.	164,481,900.	(10,630,200.)	93.93	240,180,000.
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	998,715,047.	843,873,100.	(154,841,947.)	84.50	125,143,850.
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	637,636,000.	637,636,000.	-	100	131,857,000.
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2,089,833,010.	1,805,105,337.	(284,727,673.)	86.38	1,202,969,495.
	TOTAL	18,153,300,725.	15,856,886,471.	(2,296,414,274.)	83.63	8,657,798,812.

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Berdasarkan data tersebut di atas nampak bahwa terdapat 1 program yang capaiannya kurang optimal hanya berkisar pada angka 40 - 50% yakni Program Pendidikan Anak Usia Dini. Kondisi ini disebabkan adanya kegiatan sosialisasi dan kerjasama pelayanan pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Secara umum total penyerapan anggaran terkait sasaran ini adalah 83,63%. Dengan mengesampingkan satu program yang pencapaiannya kurang optimal dikarenakan faktor eksternal (kebijakan pemerintah), tingkat penyerapan program lainnya pada pencapaian sasaran ini berkisar pada angka 80% - 99%.

2. Terpenuhinya Layanan Kesehatan Berkualitas

Tabel 3.50
Anggaran dan Realisasi Yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Terpenuhinya Layanan Kesehatan Berkualitas

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3,391,933,390.00	2,100,726,505.00	(1,291,206,885.00)	61.93	3,576,536,380.00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	943,994,955.00	898,091,041.00	(45,903,914.00)	95.14	2,053,319,535.00
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	65,885,000.00	64,255,000.00	(1,630,000.00)	97.53	31,590,000.00
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	456,877,500.00	452,065,256.00	(4,812,244.00)	98.95	503,704,700.00
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	247,617,500.00	210,778,000.00	(36,839,500.00)	85.12	241,652,400.00
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	319,253,500.00	287,202,500.00	(32,051,000.00)	89.96	913,614,360.00
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	311,620,000.00	291,334,001.00	(20,285,999.00)	93.49	240,893,900.00
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,160,000,000.00	1,153,541,959.00	(6,458,041.00)	99.44	821,451,900.00
9	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	7,700,134,017.00	7,564,559,861.00	(135,574,156.00)	98.24	4,332,089,630.00
10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	24,059,748,000.00	10,410,875,874.00	(13,648,872,126.00)	43.27	1,195,220,000.00
11	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	10,541,913,000.00	10,278,786,000.00	(263,127,000)	97.50	7,277,800,000.00
12	Program peningkatan pelayanan anak balita	26,495,000.00	26,123,000.00	(372,000.00)	98.60	-
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	32,405,000.00	30,507,500.00	(1,897,500.00)	94.14	28,890,000.00
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	78,770,000.00	76,382,847.00	(2,387,153)	96.97	22,584,550.00
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2,861,832,000.00	1,874,575,763.00	(987,256,237.00)	65.50	1,082,421,350.00
16	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	61,882,834,144.00	60,586,851,931.00	(1,295,982,213.00)	97.91	22,742,673,039.00
17	UPTD BLUD RSU DR.M.M. Dunda	150,397,163,144.00	137,148,190,997.70	(13.248.972.146,30)	91.19	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

18	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD	88,514,329,000.00	76,561,339,066,70	(11,952,989,933,30)	86.50	52,793,492,314.00
	TOTAL	352,992,785,150.00	310.016,187,102.40	(42,976,681,047.60)	93.82	97,857,934,058.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk mencapai terwujudnya sasaran terpenuhinya layanan kesehatan berkualitas beberapa program telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo beserta jajarannya (21 puskesmas dan RSUD MM Dunda). Pelaksanaan program tersebut diatas adalah berupa peningkatan sarana prasarana, pelayanan kesehatan, pengadaan obat-batan, pengadaan alat kesehatan, promosi dan penyuluhan kesehatan, penanganan ibu hamil, melahirkan dan imunisasi balita serta penanggulangan penyakit menular. Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang sasaran pembangunan daerah dibidang kesehatan adalah sebesar Rp. 352,992,785,150,- terealisasi dengan cukup proporsional mencapai angka 90%-95% dari anggaran yang ada. Dibandingkan dengan tahun 2017 untuk program yang sama terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan adanya alokasi DAK Non Fisik untuk bidang kesehatan yang teralokasi melalui anggaran puskesmas dan Dinas Kesehatan.

3. Terbinanya Tenaga Kerja Produktif

Tabel 3.51
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran
Terbinanya Tenaga Kerja Produktif

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	LEBIH/KURANG	%	REALISASI 2017
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	337.058.580,00	336.032.960,00	(1.025.620,00)	99.70	1,839,761,000.00
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	907.810.000,00	891.394.500,00	(16.415.500,00)	98.19	6,796,233,616.00
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	94.150.000,00	94.062.500,00	(87.500,00)	99,91	613,984,075.00
	TOTAL	1,339,018,580.00	1,321,489,960.00	(17,528,620.00)	99.26	9,249,978,691.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018



Untuk mendukung sasaran Terbinanya Tenaga Kerja Produktif, maka pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.339.018.580,- dengan realisasi mencapai Rp. 1.321.489.960,- atau dengan persentase mencapai 99,26%. Dibanding tahun sebelumnya (2017) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.249.978.691,- dengan persentase mencapai 95,85%.

4. Terbinanya Wirausahawan Mandiri

Tabel 3.52
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terbinanya
Wirausahawan Mandiri

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	754,182,500.00	754,080,000.00	(102,500.00)	99.99	534,344,000.00
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	38,051,500.00	38,051,500.00	-	100.00	38,972,500.00
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	278,912,500.00	276,594,000.00	(2,318,500.00)	99.17	114,120,661.00
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	534,565,100.00	531,385,100.00	(3,180,000.00)	99.41	341,226,058.00
TOTAL		1,605,711,600.00	1,600,110,600.00	(5,601,000.00)	99.64	1,028,663,219.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengalokasikan anggaran untuk wirausahawan mandiri sebesar Rp. 1,605,711,600,- yang dialokasikan pada 4 program dengan realisasi sebesar Rp. 1,600,110,600,- dengan tingkat serapan 99,64%. Di bandingkan dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Sebagaimana terlihat pada tabel di atas.



5. Terbentuknya Pemuda Berprestasi Nasional

Tabel 3.53

Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terbentuknya Pemuda Berprestasi Nasional

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1,779,105,500.00	1,630,505,802.00	(148,599,698.00)	91.65	849,798,500.00
2.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	2,713,875,000.00	2,603,517,825.00	(110,357,175)	95.93	1,019,999,500.00
TOTAL		4,492,980,500.00	4,234,023,627.00	(258,956,873.00)	93.79	1,869,798,000.00

Sumber : Dinas Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata Kab. Gorontalo Tahun 2018

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran pemuda berprestasi nasional pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, terhadap Tahun 2017. Hal ini disebabkan alokasi pada program peningkatan peran serta kepemudaan yang sebelumnya teralokasi sebesar Rp. 1,921,426,550,- pada Tahun 2018 memperoleh alokasi Rp. 4,492,980,500,- Tingkat penyerapan sangat optimal dengan kisaran 91 – 96 persen.

6. Terbinanya Seni Budaya Lokal

Tabel 3.54

Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terbinanya Seni Budaya Lokal

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	222.092.000	221.539.000	(553.000)	99,75	82,350,000.00
TOTAL		222.092.000	221.539.000	(553.000)	99,75	82,350,000.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk mendukung sasaran terbinanya seni budaya lokal, maka pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 222.092.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 221.539.000,- atau dengan persentase mencapai 99.75 % Jika dibandingkan kondisi tahun lalu 2017 terjadi peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut karena terserapnya anggaran pada program kegiatan.



7. Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

Tabel 3.55

Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran terselenggaranya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13.224.490.000.00	12,273,337,698.00	(951,152,302.00)	92.81	10,286,891,343.00
TOTAL		13,224,490,000.00	12,273,337,698.00	(951,152,302.00)	92.81	10,286,891,343.00

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, 2018

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran terselenggaranya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, terhadap Tahun 2017. Hal ini disebabkan alokasi pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya teralokasi sebesar Rp. 10,286,891,343.00,- pada tahun 2018 memperoleh alokasi Rp. 13,224,490,000.00,-. Tingkat penyerapan sangat optimal dengan kisaran 91 – 96 persen dan dengan demikian tingkat efisiensi mencapai 4 – 9 persen.

8. Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berintegritas

Tabel 3.56

Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran
Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berintegritas

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program perencanaan pembangunan daerah	117.836.000,00	113.786.500,00	(4.049.500.00)	96,56	1,220,687,832.00
TOTAL		117.836.000,00	113.786.500,00	(4.049.500.00)	96,56	1,220,687,832.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk mendukung sasaran terbentuknya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berintegritas, maka pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 117.836.000.00,- dengan realisasi mencapai Rp. 113.786.500.00,- atau dengan persentase mencapai 96,56 persen. Jika dibandingkan kondisi tahun lalu 2017



terjadi penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan dengan hasil capaian melampaui sesuai target.

9. Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Tabel 3.57
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran
Terlaksananya Reformasi Birokrasi

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3,026,610,708.00	2,928,271,815.00	(98,338,893.00)	96.75	3,156,057,392.00
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	608,000,000.00	594,000,000.00	(14,000,000.00)	97.72	1,221,684,800.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	117,836,500.00	113,786,500.00	(4,050,000.00)	96.56	618,394,902.00
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	104,882,750.00	101,666,500.00	(3,216,250.00)	96.93	3,156,057,392.00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	474,890,000.00	463,443,090.00	(11,446,910.00)	97.59	201,925,000.00
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	368,026,550.00	367,991,681.00	(34,869.00)	99.99	99,302,000.00
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,613,380,000.00	1,574,027,630.00	(39,352,370.00)	97.56	1,241,825,800.00
8	Program perencanaan pembangunan Daerah	1,918,220,400.00	1,815,052,384.00	(103,168,016.00)	94.62	1,220,687,832.00
TOTAL		8,231,846,908.00	7,958,239,600.00	(273,607,308.00)	97.21	10,915,935,118.00

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk mendukung sasaran terlaksananya reformasi birokrasi, maka pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8,231.846.908,- dengan realisasi mencapai Rp. 7.958.239.600,- atau dengan persentase mencapai 97,21 persen. Jika dibandingkan kondisi tahun lalu 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp. 10.915.935.118,-. Kondisi ini disebabkan menurunnya alokasi dana pada program kegiatan.



10. Peningkatan Ekonomi Wilayah yang Berkualitas

Tabel 3.58

Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Peningkatan Ekonomi Wilayah yang Berkualitas

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	LEBIH/KURANG	%	REALISASI 2017
1	Program pengembangan data/informasi	1,034,750,304.00	1,000,525,743.00	(34,224,561.00)	96.69	1,913,500,681.00
TOTAL		1,034,750,304.00	1,000,525,743.00	(34,224,561.00)	96.69	1,913,500,681.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengalokasikan anggaran untuk peningkatan ekonomi wilayah yang berkualitas sebesar Rp. 1.034.750.304.00,- yang dialokasikan pada 1 program dengan realisasi sebesar Rp. 1.000.525.743.00,- dengan tingkat serapan 96,69%. Di bandingkan dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

11. Peningkatan Kemajuan dan Perkembangan Desa

Tabel 3.59

Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Peningkatan Kemajuan dan Perkembangan Desa

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	87,300,000.00	79,850,000.00	(7,450,000.00)	91.47	2,064,328,835.00
2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	421,018,000.00	413,668,710.00	(8,132,816.00)	98.25	194,367,184.00
TOTAL		508,318,000.00	493,518,710.00	(15,582,816.00)	94.86	173,899,400.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk sasaran peningkatan ekonomi wilayah sebesar Rp. 508,318,000,- yang dialokasikan pada 2 program dengan realisasi sebesar Rp. 493,518,710,- dengan tingkat serapan 94,86%. Di bandingkan dengan tahun 2017 anggaran



untuk sasaran ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

12. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu

Tabel 3.60
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu

No	Program	Anggaran 2017	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	986,614,000.00	972,910,000.00	(13,704,000.00)	98.61	1,263,728,400.00
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	489,500,000.00	473,126,568.00	(16,373,432.00)	96.66	110,000,000.00
3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	468,898,000.00	448,906,000.00	(19,992,000)	95.74	1,122,614,100.00
4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5,431,314,000.00	5,395,436,500.00	(35,877,500.00)	99.34	8,503,360,000.00
5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	122,120,000.00	45,940,000.00	(76,180,000.00)	37.62	277,324,900.00
6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	555,118,000.00	554,644,300.00	(473,700.00)	99.91	672,090,000.00
7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3.290.043.000.00	3.254.422.500.00	(35,620,500.00)	98.92	11,345,909,150.00
8	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	950,074,960.00	781,921,600.00	(168,153,360.00)	82.30	360,636,000.00
9	Program peningkatan produksi peternakan	1,194,107,040.00	1,105,807,100.00	(88,299,940.00)	92.61	632,293,000.00
10	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	15,000,000.00	14,975,000.00	(25,000.00)	99.83	121,571,250.00
11	Program pengembangan budidaya perikanan	2,066,255,500.00	1,992,369,800.00	(73,885,700.00)	96.42	1,704,561,400.00
12	Program pengembangan perikanan tangkap	1,777,495,500.00	1,378,986,000.00	(398,509,500.00)	77.58	1,216,706,464.00
13	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	561,105,000.00	557,592,876.00	(3,512,124.00)	99.37	490,548,850.00
TOTAL		17,797,645,000.00	16,977,308,244.00	(2,849,090,856.00)	90.38	16,988,363,457.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018



Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran peningkatan produksi dan produktivitas pertanian terpadu berkualitas pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, terhadap Tahun 2017. Hal ini disebabkan alokasi pada program Program peningkatan produksi hasil peternakan yang sebelumnya teralokasi sebesar Rp. 16,988,363,457,- pada tahun 2018 memperoleh alokasi Rp. 17,797,645,000,-. Tingkat penyerapan sangat optimal dengan kisaran 90 – 95 persen.

13. Ketersediaan Keterjangkauan dan Kelembagaan Pangan

Tabel 3.61
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Ketersediaan Keterjangkauan dan Kelembagaan Pangan

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	3,245,520,704.00	3,183,742,675.00	(61,778,029.00)	98.10	1,297,610,500.00
TOTAL		3,245,520,704.00	3,183,742,675.00	(61,778,029.00)	98.10	1,297,610,500.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah berupa pengalokasian 1 program pembangunan untuk mendukung tercapainya sasaran ketersediaan pangan daerah. Pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,245,520,704,- dengan tingkat serapan mencapai 98.10% atau sebesar Rp 3,183,742,675. Alokasi anggaran ini meningkat bila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Tahun 2017 yang hanya sebesar Rp. 1,297,610,500,-, Tingkat penyerapan sangat optimal dengan kisaran 90 – 100 persen.

13. Revitalisasi Jalan, Jembatan dan Sungai



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

Tabel 3.62
Anggaran dan Realisasi Yang Mendukung Pencapaian
Revitalisasi Jalan, Jembatan dan Sungai

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program pembangunan jalan dan jembatan	46.469.207.775.00	40.079.026.508.00	(6.390.181.267.00)	86.25	5,532,391,195.00
2	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	53.672.518.701.00	46.554.002.726.00	(7.118.515.975.00)	86.74	35,377,852,300.00
3	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	200.000.000.00	99.165.000.00	(100.835.000.00)	49.58	490,572,500.00
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	28.982.010.995.00	24.344.134.367.00	(4.637.876.628.00)	84.00	9,307,843,506.00
5	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	2.489.476.400.00	1.675.042.350.00	(814.434.050.00)	67.28	544,835,600.00
TOTAL		131.813.213.871.00	122.751.370.951.00	(19.016.842.920.00)	62.31	51.253.495.101.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk mencapai terwujudnya sasaran revitalisasi jalan, jembatan dan sungai beberapa program telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Pelaksanaan program tersebut diatas adalah berupa pembangunan jalan jembatan dan sungai. Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang sasaran pembangunan daerah di bidang kesehatan adalah sebesar Rp. 131.813.213.871,- terealisasi mencapai angka 70%-75% dari anggaran yang ada. Dibandingkan dengan tahun 2017 untuk program yang sama terjadi penurunan yang cukup signifikan disebabkan adanya alokasi DAK Non Fisik.

14. Ketersediaan Sarana Air Bersih dan Minum



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

Tabel 3.63
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Ketersediaan Sarana Air Bersih dan Minum

NO	PROGRAM	NGGARAN 2018	REALISASI 2018	LEBIH/KURANG	%	REALISASI 2017
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	15.438.857.129.00	14.144.721.323.00	(1.294.135.806.00)	91,62	7,739,644,350.00
TOTAL		15.438.857.129.00	14.144.721.323.00	(1.294.135.806.00)	91,62	7,739,644,350.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran ketersediaan sarana air bersih dan minum pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, terhadap Tahun 2017. Hal ini disebabkan alokasi pada program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah yang sebelumnya teralokasi sebesar Rp. 7,739,644,350,- pada tahun 2018 memperoleh alokasi Rp. 15.438.857.129,-. Tingkat penyerapan sangat optimal dengan kisaran 90 – 100 persen.

15. Ketercapaian Perumahan dan Sanitasi Yang Baik

Tabel 3.64
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Ketercapaian Perumahan dan Sanitasi yang Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	LEBIH/KURANG	%	REALISASI 2017
1	Program Penanganan Perumahan dan Permukiman	4.468.136.190.00	4.228.788.500.00	(23.9347.690.00)	95,20	3,837,586,605.00
2	Program Pengembangan Perumahan	4.195.504.000.00	4.125.196.704.00	(70.307.296.00)	98,32	3,503,382,637.00
3	Program Lingkungan Sehat Perumahan	790.390.000.00	754.352.546.00	(36.037.454.00)	95,44	361,473,750.00
TOTAL		8.663.640.190.00	8.853.985.204.00	(209.6540.986.00)	96.33	7,829,597,030.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk sasaran ketercapaian perumahan dan sanitasi yang baik sebesar Rp. 8.663.640.190,- yang dialokasikan pada 3 program dengan realisasi sebesar Rp. 8.853.985.204,- dengan tingkat serapan 96,33 %. Dibandingkan



dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sebagaimana terlihat pada table diatas.

16. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Rencana Tata Ruang

Tabel 3.65

Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Rencana Tata Ruang

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Perencanaan Tata Ruang	479.600.000.00	384.531.200.00	(95.068.800.00)	80.18	1,336,226,597.00
TOTAL		479.600.000.00	384.531.200.00	(95.068.800.00)	80.18	1,336,226,597.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Anggaran untuk penyusunan dokumen penataan ruang pada tahun 2018 sebesar Rp 479.600.000,- dengan realisasi mencapai Rp 384.531.200,- atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 80.18 %. Dibanding dengan tahun sebelumnya (2017) terdapat penurunan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 95.068.800 sebagaimana terlihat dalam tabel diatas.

17. Penurunan Angka Kemiskinan

Tabel 3.66

Anggaran dan Realisasi Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Penurunan Angka Kemiskinan

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.476.380.000.00	1.475.499.000.00	(881.000.00)	99,94	4,009,940,197.00
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.348.405.125.00	2.246.747.630.00	(101.657.495.00)	95,67	2,102,526,188.00
3	Program pembinaan anak terlantar	68.400.000.00	67.675.000.00	(725.000.00)	98,94	20,200,000.00
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	474.700.000.00	454.029.500.00	(20.670.500.00)	99.79	370,044,625.00
5	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	426.600.000.00	422.013.778.00	(3.886.222.00)	99.09	333,109,375.00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

6	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	202.850.000.00	187.262.500.00	(15.587.500.00)	92,32	84,430,000.00
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3.861.080.000.00	2.606.705.385.00	(1.254.374.615.00)	67,51	2,569,693,845.00
8	Program pengembangan data/informasi	1.034.750.304.00	1.000.525.743.00	(34.224.561.00)	98,18	1,913,500,681.00
9	Program peningkatan kesejahteraan petani	986.614.000.00	972.910.000.00	(13.704.000.00)	98,61	1,263,728,400.00
10	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	468.898.000.00	448.906.000.00	(19.992.000.00)	95,74	1,122,614,100.00
11	Program peningkatan produksi pertanian	5.431.314.000.00	5.395.436.500.00	(35.877.500.00)	99,34	8,503,360,000.00
12	Program peningkatan ketahanan pangan	3.245.520.704.00	3.183.742.675.00	(61.778.029.00)	98,10	1,297,610,500.00
13	Program Pengembangan perikanan tangkap	1.777.495.500.00	1.378.986.000.00	(398.509.500.00)	77,58	1,030,373,000.00
14	Program optimalisasi pengembangan dan pemasaran produksi perikanan	-	-	-	-	327,300,450.00
15	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.051.810.000.00	1.012.879.519.00	(38.930.481.00)	96,30	1,319,431,271.00
16	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	93.000.000.00	91.334.149.00	(1.665.851.00)	98,21	66,474,000.00
17	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	4.388.941.750.00	4.044.993.883.00	(343.947.867.00)	92,16	1,694,779,636.00
18	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	-	-	-	-	754,800,000.00
19	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	337.058.580.00	336.032.960.00	(1.025.620.00)	99,70	1,839,761,000.00
20	Program peningkatan kesempatan kerja	907.810.000.00	891.394.500.00	(16.415.500.00)	98,19	6,796,233,616.00
21	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	94.150.000.00	94.062.500.00	(87.500.00)	99,91	613,984,075.00
22	Program pengembangan wilayah transmigrasi	-	-	-	-	1,381,368,080.00
23	Program kemitraan peningkatan layanan kesehatan	-	-	-	-	7,277,800,000.00
24	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.961.864.500.00	841.434.845.00	(1.120.429.655.00)	42,89	776,389,445.00
25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	12.290.140.068.00	11.564.355.269.00	(725.784.799.00)	94,09	6,181,259,022.00
26	Program Pendidikan Non Formal	175.112.100.00	164.481.900.00	(10.630.200.00)	93,93	240,180,000.00
27	Program peningkatan produksi hasil peternakan	3290.043.000.00	3254.422.500.00	(35.620.500.00)	98,92	11,345,909,150.00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018

28	Program Pengembangan Perumahan	4.195.504.000.00	4.125.196.704.00	(70.307.296.00)	98,32	3,503,382,637.00
	TOTAL	58.588.441.631.00	46.261.728.440.00	(321.697.183.00)	76,59	68,740,183,293.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Angka kemiskinan yang meningkat menjadi latar belakang ditetapkannya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu fokus pembangunan daerah. Program di atas dilaksanakan untuk meningkatkan akses ataupun keberdayaan masyarakat miskin. Pada tahun 2018 terkait penanganan kemiskinan yang berdampak pada masalah kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 58.588.441.631,- yang diarahkan pada kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam bentuk pembinaan, rehabilitasi maupun pemberdayaan kelembagaan, kesempatan kerja. Penyerapan anggaran pada program penanggulangan kemiskinan sangat baik mencapai Rp. 46.261.728.440. atau 76,59% dari alokasi anggaran yang ada. Di bandingkan dengan tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 68,740,183,293. Dibandingkan dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

13. Pengendalian penduduk

Tabel 3.67
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Pengendalian Penduduk

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	LEBIH/KURANG	%	REALISASI 2016
1	Program Keluarga Berencana	6.909.334.000.00	5.906.407.246.00	(1.002.926.754.00)	85,48	2,880,923,500.00
	TOTAL	6.909.334.000.00	5.906.407.246.00	(1.002.926.754.00)	85,48	2,880,923,500.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk sasaran pengendalian penduduk sebesar Rp. 6.909.334.000.00,- yang dialokasikan pada 1 program dengan realisasi sebesar Rp. 5.906.407.246.00,- dengan tingkat serapan 85,48 %. Di bandingkan dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas.



14. Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak

Tabel 3.68
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran
Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	340.320.000.00	338.453.041.00	(1.866.959.00)	99,45	327,898,875.00
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	659.425.000.00	659.345.000.00	(80.000.00)	99.99	292,212,500.00
3	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1.937.282.991.00	1.924.679.965.00	(12.603.026.00)	99.35	1,622,596,008.00
	TOTAL	2.937.027.991.00	2.922.478.006.00	(14.549.985.00)	99,59	2,242,707,383.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk sasaran pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebesar Rp. 2.937.027.991,- yang dialokasikan pada 3 program dengan realisasi sebesar Rp. 2.922.478.006,- dengan tingkat serapan 99,59%. Di bandingkan dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Sebagaimana terlihat pada table diatas.

15. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan

Tabel 3.69
Anggaran Dan Realisasi Yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.613.380.000.00	1.574.027.630.00	(39.352.370.00)	97,56	1,241,825,800.00
	TOTAL	1.613.380.000.00	1.574.027.630.00	(39.352.370.00)	97.56	1,241,825,800.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk sasaran meningkatnya ketersediaan data dan informasi kependudukan sebesar Rp. 1.613.380.000,- yang dialokasikan pada 1 program dengan realisasi sebesar Rp. 1.574.027.630.00,- dengan tingkat serapan



97,56%. Di bandingkan dengan tahun 2017 anggaran untuksasaran ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

16. Peningkatan Kualitas Baku Lingkungan Hidup

Tabel 3.70
Anggaran Dan Realisasi Yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Peningkatan Kualitas Baku Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.062.050.000.00	1.061.196.750.00	(853.250.00)	99,92	2,235,646,000.00
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	115.753.864.00	115.740.700.00	(13,164.00)	99,99	205,585,000.00
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	49.050.000.00	48.400.000.00	(650.000.00)	98,67	51,000,000.00
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00	12,000,000.00
5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.131.900.000.00	1.917.078.150.00	214.821.850.00	89,92	313,424,000.00
TOTAL		3.358.753.864.00	3.142.415.600.00	213.305.436.00	97.70	2,817,655,000.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk sasaran peningkatan kualitas baku lingkungan hidup sebesar Rp. 3.358.753.864,- yang dialokasikan pada 6 program dengan realisasi sebesar Rp. 3.142.415.600,- dengan tingkat serapan 97,70 %. Dibandingkan dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

17. Penurunan Tingkat Kerentanan Bencana



Tabel 3.71
Anggaran dan Realisasi Yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Penurunan Tingkat Kerentanan Bencana

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	516.750.000.00	509.825.000.00	(6.925.000.00)	98.66	771,821,230.00
	TOTAL	516.750.000.00	509.825.000.00	(6.925.000.00)	98.66	771,821,230.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Untuk sasaran Penurunan tingkat kerentanan bencana sebesar Rp. 516.750.000,- yang dialokasikan pada 1 program dengan realisasi sebesar Rp. 509.825.000,- dengan tingkat serapan 98,66%.

18. Terlaksananya Kemitraan Antar Daerah Dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen

Tabel 3.72
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Terlaksananya Kemitraan
Antar Daerah dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	573.113.000.00	562.595.300.00	(10.517.700.00)	98,16	405,218,300.00
2	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13.224.490.000.00	12.273.337.698.00	(951.152.302.00)	92.81	10,286,891,343.00
	TOTAL	13,797.603.000.00	12.835932.998.00	(961.670.002.00)	95,49	10,692,109,643.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Penyerapan anggaran pada program kerjasama mencapai Rp. 6.107.360.505. atau 98.49% dari alokasi anggaran yang ada. Di bandingkan dengan tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 16,558,448,172. Dibandingkan dengan tahun 2017 anggaran untuk sasaran ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sebagaimana terlihat pada table diatas.



19. Peningkatan Kontribusi Sektor Swasta dan Lembaga Donor Terhadap Pembangunan Daerah

Tabel 3.73
Anggaran dan Realisasi yang Mendukung Pencapaian Sasaran Peningkatan Kontribusi Sektor Swasta dan Lembaga Donor Terhadap Pembangunan Daerah

No	Program	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/kurang	%	Realisasi 2017
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	573.113.000.00	562.595.300.00	(10.517.700.00)	98,16	405.218.300.00
2	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.224.490.000.00	12.273.337.698.00	(951.152.302.00)	92,81	10.286.891.343.00
	TOTAL	13,797.603.000.00	12.835932.998.00	(961.670.002.00)	95,49	10,692,109,643.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran Peningkatan kontribusi sektor swasta dan lembaga donor terhadap pembangunan daerah pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, terhadap Tahun 2017. Hal ini disebabkan alokasi pada Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya teralokasi sebesar Rp. 10,692,109,643,- pada tahun 2018 memperoleh alokasi Rp. 13,797.603.000,-. Tingkat penyerapan sangat optimal dengan kisaran 90–99 persen.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 menggambarkan kinerja, evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018.

Pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja yang baik, yakni terlampauinya/tercapainya target sejumlah 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau 56 persen dan 3 IKU atau 12 persen yang capaiannya > 90 persen, sementara itu hanya 7 IKU atau 28 persen yang capaian kinerja antara 41 – 90 persen dari total 25 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Belum tercapainya target pada beberapa IKU, lebih disebabkan adanya kendala teknis, terjadinya perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat, pengaruh faktor alam, serta kondisi perekonomian global. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi adalah (1) kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, (2) masih lemahnya sistem perlindungan pendukung



pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, (3) belum tersedianya SDM penilai dan pemeriksa pajak dan retribusi daerah, (4) belum efektifnya pengenaan sanksi untuk pelanggaran perpajakan. Dalam rangka optimalisasi perolehan PAD, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan upaya – upaya, yakni (1) Pendataan/pemungutan data objek/subjek pajak; (2) pemutakhiran data piutang PBB-P2 hasil pelimpahan KPP Pratama; (3) penyesuaian NJOP dengan kondisi saat ini; (4) memberikan reward dan punishment kepada wajib pajak, (5) melaksanakan kerjasama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian; (6) melaksanakan sensus pajak; dan (7) digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;

Dalam hal arah kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menetapkan kebijakan belanja daerah dengan menekankan beberapa hal berikut ini, yaitu : (1) penerapan anggaran berbasis kinerja, dengan meninggalkan metode penganggaran yang selama ini dianut yakni metode perhitungan *incremental budgeting*; (2) pengalokasian belanja diutamakan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah setelah sebelumnya memenuhi pengalokasian pada belanja wajib dan mengikat; (3) belanja tidak langsung untuk membiayai subsidi, hibah, bansos dialokasikan sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah setelah terlebih dahulu telah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat serta alokasi pada prioritas pembangunan daerah; (4) belanja langsung dialokasikan berdasarkan prinsip “*money follow priority program*” yakni dengan mendahulukan program prioritas pembangunan daerah; (5) belanja barang dialokasikan seefisien mungkin dan lebih diutamakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ; dan (6) alokasi belanja modal berangsur-angsur lebih ditingkatkan terutama yang terkait langsung dengan pemenuhan sarana prasarana publik, memiliki daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi dan fiskal daerah maupun dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan perekonomian masyarakat.